

**PENGARUH IDEOLOGI IKHWANUL MUSLIMIN TERHADAP
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)



Oleh;

MIFTAHUDDIN

NIM 102033224774

**JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2008**

**PENGARUH IDEOLOGI IKHWANUL MUSLIMIN TERHADAP
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh

MIFTAHUDDIN

NIM 102033224774

Pembimbing

DR. H. Sirojuddin Aly, M.A

**JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA**

2008

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul PENGARUH IDEOLOGI IKHWANUL MUSLIMIN TERHADAP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 27 Januari 2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Pemikiran Politik Islam.

Jakarta, 27 Januari 2009

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Drs. Agus Darmaji, M.Fils

NIP: 150 262 447

Dra. Wiwi Siti Svajaroh, M.A

NIP: 150 270 808

Anggota,

M. Zaki Mubarak, SP. M.Si

NIP: 150 371 093

Dr. Faris Pari, M.A

NIP: 150 254 627

Dr. H. Sirojuddin Aly, M.A

NIP 150

KATA PENGANTAR

Bismillah ar-Rahman ar Rahim

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, hanya dengan izin-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta sahabat-sahabatnya yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang diridhai Allah SWT, Amin.....

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini adalah berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu penulis selama ini, mereka adalah;

1. Bapak Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.
2. Bapak Dr. Amin Nurdin, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta
3. Bapak Drs. Agus Darmaji, M. Fils selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta
4. Ibu Dra. Wiwi Siti Syajaroh, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta

5. Bapak Dr. H. Sirojuddin Aly, MA Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan dan memberikan ide kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
6. Bapak dan Ibu pegawai Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang telah memberikan fasilitas dan membantu menyediakan referensi selama masa perkuliahan dan pembuatan skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang telah mentransfer ilmu pengetahuan dan pengalamannya
8. Baba' dan Enya' tercinta H. Ahmad Qurthubi dan Hj. Maimunah, keduanya merupakan sosok pendidik yang gigih, tak kenal lelah dalam memberikan pengertian arti hidup bagi penulis
9. Isteriku tercinta (Uswatun Hasanah Sopian) yang telah banyak membantu, materi dan motivasinya agar penulis bisa menjadi seorang sarjana Sosial
10. Sumber inspirasi dan masa depanku, Pinkan Aisyah Humairoh, si kembar (Fauzi & Fauzan el-Mubarak) , kiranya mereka dapat mencontoh apa yang telah penulis lakukan selama ini untuk pendidikan
11. Kanda Syahid Qurthubi, Bang J'benk, In, Monay, Faizah dan Agus, semoga karya ini dapat membuat kalian bangga
12. Rekan-rekan di jurusan Pemikiran Politik Islam, semoga kebersamaan kita tidak hanya di bangku perkuliahan saja, dan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penulisan skripsi ini

Citeureup, 21 Nopember 2008

Penulis,

Miftahuddin



DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL
.....	i
LEMBAR	PENGESAHAN
.....	ii
KATA	PENGANTAR
.....	iii
DAFTAR	
ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	Masalah
.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan	Masalah
.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	Penelitian
.....	8
D. Studi	Kepustakaan
.....	9
E. Metode	Penelitian
.....	11
F. Sistematika	Penulisan
.....	12

BAB II PERKEMBANGAN IKHWANUL MUSLIMIN DI MESIR

A. Latar Belakang Berdirinya Ikhwanul Muslimin
.....14

B. Ideologi Ikhwanul Muslimin dan Landasan Teologisnya
.....23

BAB III PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. Sejarah Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera
.....38

B. Visi dan Misi Partai
.....47

C. Sistem Pengkaderan dan Agenda-agenda Partai Keadilan Sejahtera

a. PKS Sebagai Partai Kader
.....48

b. Strategi Pemenangan PEMILU Partai Keadilan Sejahtera
.....51

c. PKS dan Islam Politik di Indonesia
.....55

BAB IV PENGARUH IDEOLOGI IKHWANUL MUSLIMIN TERHADAP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin dalam Bidang politik
.....59

B. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin dalam Bidang Dakwah
.....66

C. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin dalam Konsep <i>Tarbiyah</i> (Pembinaan dan Kaderisasi)	74
D. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin dalam Konsep Negara Islam	84
E. Analisa Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin Terhadap Partai Keadilan Sejahtera	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki awal abad dua puluh, ada dua fenomena yang menonjol di berbagai belahan dunia yang terjadi hampir bersamaan, pertama kebangkitan agama-agama dan kedua demokratisasi. Dua fenomena tersebut menggambarkan sebuah bukti bahwa di penghujung abad yang lalu dunia berubah dengan sangat cepat. Gerakan kebangkitan agama berjalan seiring dan terkadang malah memperkuat pembentukan sistem politik sebuah negara kearah yang lebih demokratis. Sementara di bagian wilayah lain tidak jarang kedua fenomena itu saling berbenturan. Dunia Islam tidak luput dari pengaruh fenomena tersebut. Kebangkitan Islam di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya muslim memunculkan isu demokratisasi.¹

Dalam rangka merespon kondisi zaman, terdapat banyak gerakan Islam bermunculan. Semuanya mengusung semangat membangun kembali kejayaan umat yang pernah di raih pada masa lalu. Bersamaan dengan itu, diskusi seputar konsep dan pemikiran keislaman pun merebak. Berbagai telaah dan analisis dilakukan untuk merumuskan konsep dan pemikiran sebaik mungkin, yang dapat mengantarkan umat ini menuju kehidupan yang diidam-idamkan. Dalam merumuskan sebuah konsep ada yang memandang persoalan umat dengan semangat perlawanan yang berlebihan hingga melahirkan konsep yang mengedepankan permusuhan terhadap pihak lain. Ada pula yang dilatar belakang

¹ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Jakarta, Teraju, 2002), hal 6-7

oleh kekaguman yang berlebihan juga terhadap kemajuan Barat sehingga kurang percaya diri ketika mengaktualisasikan konsep keislamannya. Di antara berbagai konsep itu, ada beberapa gerakan Islam yang dengan arif, cermat dan mendalam dapat merumuskan dan menjalankan hakikat perjuangan Islam yang ketat dengan bingkai syariat namun tetap mengedepankan strategi yang logis dan realistis.²

Adalah Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan internasional, yang di negranya asal, yaitu Mesir, menjadi organisasi terlarang, mencoba turut serta mengembalikan kejayaan Islam. Lahirnya gerakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928 dilandasi oleh sebuah perasaan yang sangat memilukan hati, yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah yang berpusat di Turki dan penjajahan yang terjadi di negeri-negeri Muslim dan juga yang tak kalah pentingnya adalah keterpurukan moral umat Islam.

Berangkat dari gambaran dunia Islam yang sangat menyedihkan itu, maka umat Islam, khususnya di Mesir membutuhkan sebuah perubahan dan reformasi yang begitu mendasar. Maka sangatlah wajar jika rakyat Mesir simpati kepada sebuah organisasi yang ingin mengadakan perubahan sosial politik di negerinya. Dalam sepuluh tahun pertamanya, semenjak kehadirannya, organisasi ini memusatkan perhatiannya pada kegiatan-kegiatan reformasi moral dan sosial. Setelah merasakan mendapat sambutan yang sangat luas, maka kantor pusat Ikhwanul Muslimin yang tadinya berada di Isma'iliyah pada tahun 1933 dipindahkan ke Kairo ibu kota Mesir³.

² Abdul Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam; Peta Pemikiran Hasan Al Banna*, terj, (Solo; Era Intermedia, 2001), hal 5-6

³ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI press, 1999) hal 145

Gerakan Ikhwanul Muslimin ini dalam waktu cepat berkembang dan merebut simpati-terutama- kalangan mahasiswa dan kalangan profesional muda yang berpendidikan modern, tidak hanya di Mesir, tapi juga di banyak negara muslim. Ajakan untuk membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan structural dan cultural, serta dalam waktu bersamaan memelopori gerakan pemurnian aktifitas keagamaan membuat daya tarik tersendiri dari gerakan ini.⁴ Tidak terkecuali adalah Indonesia, sebuah negeri yang mayoritas penduduknya muslim terkena imbas globalisasi pemikiran keislaman yang dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin.

Banyak gerakan Islam di Indonesia yang menerapkan konsep pemikiran Ikhwanul Muslimin. Di era 1970 dan 1980 an, pola-pola pembinaan gerakan-gerakan Islam di Indonesia sudah mengacu pada pola baku yang diterapkan oleh Ikhwanul Muslimin. Salah satu pola pembinaan yang cukup populer kala itu adalah *Usrah*⁵. Namun sangat disayangkan istilah *Usrah* ini kemudian mengalami pemburukan citra yang berakhir pada pembusukan istilah. Hal ini terjadi karena para anggotanya yang eksklusif dan cenderung tertutup dari dunia luar.

Klimaks dari pembusukan makna *usrah* ini adalah dengan terjadinya kasus-kasus yang dilakukan oleh gerakan Islam yang menggunakan sistem *usrah* sebagai pola pembinaan kadernya⁶, yaitu pembajakan pesawat Garuda di Woyla

⁴ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, hal 8

⁵ *Usrah* adalah istilah bahasa Arab yang artinya “Keluarga”. Sedangkan dalam *sistem* pembinaan Ikhwanul Muslimin, *Usrah* adalah kelompok kecil yang beranggotakan 10-20 orang, digunakan sebagai metode untuk pembinaan. Lihat Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, terj, (Solo; Era Intermedia 2000).

⁶ Untuk lebih jelas mengenai kasus-kasus yang dilakukan oleh gerakan *Usrah* di Indonesia, lihat Abdul Syukur, *Gerakan Usrah di Indonesia; Peristiwa Lampung 1989*, (Jogjakarta; Penerbit Ombak, 2003).

(Thailand) yang dilakukan oleh kelompok *Usrah* Imran, Jama'ah *Usrah* Warsidi di Lampung yang terkenal dengan keeksklusifannya.⁷ Semenjak itu istilah *Usrah* menjadi negatif dan berkonotasi fundamentalis. Dampaknya adalah semakin meredupnya gerakan-gerakan Islam di tanah air karena aparat pemerintah sangat represif terhadap jama'ah *usrah* ini.

Sementara di sisi kehidupan yang lain, tepatnya di kampus, di waktu yang hampir bersamaan, pola pembinaan Ikhwanul Muslimin juga diterapkan. Ihwal digunakannya sistem usroh dalam pola pembinaan mahasiswa muslim di kampus-kampus dipelopori oleh Ir. Imaduddin Abdul Rahim atau yang akrab dengan sapaan bang Imad. Hal ini berawal dari masjid Salman ITB Bandung. Kala itu sekitar awal tahun 1970 an bang Imad, yang menjabat sebagai ketua umum *Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam* (LDMI), sebuah lembaga otonom yang berada di bawah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), mencoba menggagas sebuah konsep pengkajian Islam yang sistematis dan terarah. Dalam kapasitasnya sebagai ketua Umum LDMI, bang Imad juga terpilih sebagai Sekjen IIFSO (*International Islamic Federation of Student Organization*).

Dari sinilah ia mulai banyak bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran gerakan Islam tingkat internasional. Pada akhirnya ia tertarik dengan pemikiran yang dikembangkan oleh Ikhwanul Muslimin yang saat itu pengaruhnya sangat kuat di berbagai penjuru dunia, karena interaksi yang cukup intens dengan aktifi gerakan Islam Internasional tadi dalam forum IIFSO⁸.

⁷ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, hal 88

⁸ Abdul Aziz, Tholhah Imam dan Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta; Pustaka Firdaus) hal 217

Setelah dirasakan cukup mendapatkan banyak ide, bang Imad mulai menggagas sebuah bentuk perekrutan kader yang diberi nama *Latihan Mujahid Dakwah* (LMD). Hal ini mulai dilakukan pada tahun 1974 setelah ia tidak lagi menjabat ketua umum LDMI. Tindak lanjut dari program LMD ini adalah para anggota diberikan kajian keislaman yang tematis dan sistematis dalam kelompok-kelompok kecil, yang kemudian dikenal dengan sistem usrah. Tidak hanya sistem pembinaannya saja yang disajikan dalam kajian keislaman Masjid Salman pun banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin⁹. Kegiatan keislaman yang dilakukan oleh para mahasiswa di Masjid Salman ITB inilah yang kemudian menjadi prototype kegiatan keislaman para mahasiswa di kampus-kampus lain di Indonesia seperti UGM, UI, IPB, dll¹⁰ yang pada akhirnya diformalisasikan dalam sebuah organisasi yang akrab disebut dengan *Lembaga Dakwah Kampus* (LDK).

Melalui lembaga dakwah kampus inilah ide-ide dan pemikiran Ikhwanul Muslimin dikaji dan diimplementasikan. Perkembangan pemikiran Ikhwanul Muslimin di kalangan aktifis dakwah kampus menjadi semakin semarak dan bergairah setelah pulangnya para sarjana yang kuliah di Timur Tengah, yang notabene banyak bersentuhan secara langsung dengan pemikiran maupun aktifis Ikhwanul Muslimin di tempat gerakan ini lahir dan berkembang. Para sarjana lulusan universitas-universitas Timur Tengah inilah yang kemudian menjadi fasilitator transformasi pemikiran dan ideologi Ikhwanul Muslimin ke kalangan aktifis dakwah kampus. Mereka banyak menterjemahkan buku-buku yang ditulis

⁹ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, hal 72-73

¹⁰ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan*, hal 71

oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Selain itu mereka banyak diundang untuk memberikan materi kajian keislaman di kampus-kampus. Hal ini terjadi di era akhir 1980 an sampai dengan sekarang yang berjalan cukup intens.

Di akhir tahun 1990 an kondisi sosial politik Indonesia mulai berubah secara drastis, gerakan-gerakan Islam yang tadinya ditekan oleh aparat pemerintah agar tidak hidup, malah sebaliknya berkembang pesat. Puncak dari perubahan ini adalah terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 di mana orang nomor satu di Indonesia presiden Soeharto mundur dari jabatannya setelah mendapat tekanan yang sangat massif dari rakyat yang dimotori oleh para mahasiswa dan juga para tokoh nasional. Setelah Soeharto tumbang, kepemimpinan negarapun beralih ke tangan B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa inilah era multi partai dimulai yang selama 32 tahun rakyat Indonesia dipaksa untuk memilih diantara 3 partai saja.

Euforia politik pun terus berlangsung ditandai dengan berdirinya partai-partai baru. Para mantan aktifis dakwah kampus generasi pertama dan juga sarjana-sarjana lulusan Timur Tengah yang selama ini aktif di dunia dakwah pun mencoba memanfaatkan situasi yang sedang berkembang. Akhirnya lewat sebuah proses panjang, para pegiat dakwah inipun mendeklarasikan sebuah partai politik yang diberi nama *Partai Keadilan (PK)*¹¹, yang dideklarasikan pada hari Ahad tanggal 15 Rabi'ul Tsani 1419 H bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 1998¹², tetapi sebenarnya Partai ini didirikan pada tanggal 20 Juli 1998¹³.

¹¹ Majalah SAKSI, No 14 tahun V, 22 April 2003, hal 14

¹² Piagam Deklarasi Partai Keadilan

¹³ Majalah SAKSI, No 14 tahun V, 22 April 2003, hal 14

Sesuai dengan latar belakang pembinaan ideologis yang selama ini mereka dapat dan terapkan, maka ketika gerakan dakwah ini menggunakan partai politik sebagai payungnya ide-ide dan pemikiran Ikhwanul Muslimin tetap melekat kental dalam tubuh gerakan dakwah ini. PK yang pada Pemilu 1999 mendapatkan 1,4 juta suara atau 1,36 % berhasil mendudukkan 7 orang wakilnya di Senayan. PK menempati 7 besar partai pemenang Pemilu¹⁴. Karena terganjal Undang-undang Pemilu mengenai *Electoral Treshold* (batas suara minimal harus 2 %) maka PK mengubah nama menjadi *Partai Keadilan Sejahtera* (PKS), setelah sebelumnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendeklarasian Partai Keadilan Sejahtera ini dilakukan di lapangan Monas Jakarta pada hari Ahad tanggal 18 Shafar 1424 H bertepatan dengan tanggal 20 April 2003¹⁵.

Ide-ide pemikiran Ikhwanul Muslimin yang diterapkan oleh PKS yang mulai dari proses kemunculannya sampai sekarang adalah sebuah hal yang cukup menarik untuk diteliti. Karena ide dan gagasan Ikhwanul Muslimin merupakan dua metode gerakan perubahan, yaitu metode Jamaluddin Al Afghani dan metode Muhammad Abduh disertai studi pendalaman dan ketajaman intelektual serta bimbingan dari Allah SWT¹⁶. Pengaruh Ikhwanul Muslimin yang telah melekat diaplikasikan dengan sangat baik sekali oleh para kader dan aktivis PKS. Hal inilah yang sangat menarik perhatian penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam untuk dituangkan ke dalam sebuah karya tulis yang berjudul “**Pengaruh**

¹⁴ Majalah SAKSI, No 14 tahun V, 22 April 2003, hal 15

¹⁵ Majalah SAKSI, No 15 tahun V, 6 Mei 2003, hal 39

¹⁶ Fathi Yakan, *Revolusi Hasan Al Banna*, terj, (Jakarta; Harakah 2002), hal 1

Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dan terarahnya pembuatan skripsi ini, penulis membatasi masalah kepada Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut;

- Apakah Partai Keadilan Sejahtera terpengaruh oleh ideologi Ikhwanul Muslimin
- Bagaimanakah pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera dalam bidang politik dan keagamaan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin yang ada pada PKS dan juga bagaimana pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin di terima Partai Keadilan Sejahtera. Tujuan tersebut akan tercapai dengan terlebih dahulu mengetahui seperti apa ideologi Ikhwanul Muslimin dan juga dalam hal apa saja Partai Keadilan Sejahtera terpengaruh dan menerapkan ideologi tersebut.

Kegunaan penelitian dari pembahasan di atas adalah diantaranya;

1. Untuk dapat menganalisis beberapa pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap PKS

2. Untuk lebih memperkaya khazanah pemikiran keislaman, khususnya dalam bidang pemikiran politik Islam di Indonesia.

D. Studi Kepustakaan (Tinjauan Literatur)

Buku-buku yang berkaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera antara lain adalah karangan Ali Said Damanik yang berjudul *Fenomena Partai Keadilan Sejahtera; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*.¹⁷ Buku ini merupakan Skripsi S1 Ali Said Damanik yang kuliah di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi pada tahun 2001, adapun judul aslinya adalah *Transformasi Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia; Studi tentang Gerakan Dakwah Kampus menjadi Partai Keadilan*. Dalam buku ini dijelaskan tentang sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera sejak dari perintisannya yang dimulai dari kalangan kampus sampai dengan tampil terbuka dalam sebuah partai politik.

Kemudian buku yang lain adalah *Penegakan Syariat Islam menurut Partai Keadilan* yang ditulis oleh H. Nandang Burhanuddin Lc, M.Si¹⁸. Buku ini aslinya adalah Tesis Nandang Burhanuddin yang kuliah di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jurusan Kajian Timur Tengah dan Islam. Buku ini banyak menjelaskan tentang bagaimana perjuangan Partai Keadilan dalam rangka menerapkan syariat Islam dan juga tentang hubungan antara Islam dan negara.

Selain kedua buku tersebut, ada buku yang memang diterbitkan langsung oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera yang berjudul "*Menyelamatkan Bangsa;*

¹⁷ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Jakarta, Teraju, 2002)

¹⁸ H. Nandang Burhanuddin, *Penegakan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan* (Jakarta; Al Jannah; 2004)

*Platform dan Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*¹⁹. Buku ini bercerita tentang cita-cita politik Partai Keadilan Sejahtera, dimana platform kebijakan yang akan dijalani untuk mensejahterakan rakyat.

Sedangkan buku-buku yang terkait Ikhwanul Muslimin dan pemikiran para tokohnya, antara lain yang ditulis oleh Prof. Dr. Taufiq Al-Wa'iy yang dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia berjudul *Pemikiran Politik Kontemporer Al Ikhwan Al Muslimun; Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif*²⁰. Buku ini banyak menjelaskan tentang bagaimana sikap Ikhwanul Muslimin dalam berjuang di dunia politik dan apa saja batasan-batasan yang dibolehkan oleh hukum syara' dalam memperjuangkan perilaku politik para tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin di masa-masa awal.

Buku lain yang membahas tentang ideologi Ikhwanul Muslimin adalah buku yang berjudul *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan; Kajian Analitik terhadap Risalah Ta'alim*²¹ yang judul aslinya dalam bahasa Arab adalah *Nazharat fi Risalatut Ta'alim*. Buku ini ditulis oleh Muhammad Abdullah Al Khatib dan Muhammad Abdul Halim Hamid, yang isinya menjelaskan tentang doktrin-doktrin yang wajib diamalkan oleh para kader Ikhwanul Muslimin, yang kesemuanya berjumlah 10 rukun atau yang dikenal juga dengan istilah *Arkanul Bai'ah*.

¹⁹ DPP PK Sejahtera, *Menyelamatkan Bangsa; Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta; Al F'tishom 20004)

²⁰ Prof. Dr. Taufiq Al-Wa'iy *Pemikiran Politik Kontemporer Al Ikhwan Al Muslimun; Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif*, terj, (Solo; Era Intermedia 2002)

²¹ Muhammad Abdullah Al Khatib, Muhammad Abdul Halim Hamid, *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan; Kajian Analitik terhadap Risalah Ta'alim*, terj, (Bandung; Asy Syamil 2001)

Wacana tentang pemikiran para tokoh Ikhwanul Muslimin maupun konsep ideologinya telah banyak dimuat dalam buku dan juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan tulisan-tulisan mengenai Partai Keadilan Sejahtera pun juga telah banyak yang dijadikan buku. Kedua institusi di atas secara konsep dan ideologi saling bertautan, tetapi tulisan maupun penelitian tentang dua institusi tersebut sejauh yang penulis ketahui belum pernah ada. Oleh karena itu, penulis mengambil tema ini untuk dijadikan bahan kajian skripsi.

E. Metode Penelitian

Untuk meneliti Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui pencarian sumber data tertulis. Sumber data ini terdiri atas data primer meliputi buku-buku jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen serta surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Serta data sekunder yang terdiri dari buku-buku yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera.

Selain itu juga, penulis mengadakan wawancara (*interview*) untuk mendapatkan data dan informasi dari nara sumber yang terkait dengan pembahasan. Adapun wawancara dilakukan dengan beberapa tokoh yang merepresentasikan pandangannya mengenai PKS, yakni Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS, Ir. H. Untung Wahono, M.Si dan juga salah seorang Anggota Majelis Pertimbangan Daerah DPD PKS Kabupaten Bogor, KH. Sopian Tsauri Lc.

Dalam pembahasan berikutnya, penulisan skripsi ini lebih banyak menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan masalah dari sumber-sumber yang telah ditentukan dan menganalisa masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Penulis juga menggunakan metode Komparatif; yakni mencari persamaan-persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih yang kemudian dibandingkan diantara keduanya, untuk menghasilkan data yang valid dan objektif.

Adapun pedoman yang digunakan untuk menyusun skripsi ini, penulis berpegang pada buku *Pedoman Akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

F. Sistematika Penulisan

Bahasan-bahasan studi ini akan dituangkan ke dalam lima bab termasuk diantaranya bab pendahuluan dan bab penutup yang berisi sejumlah hasil pembahasan secara keseluruhan.

Bab pertama, pendahuluan berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tentang Sejarah Perkembangan Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang meliputi Sejarah berdirinya Ikhwanul Muslimin, Orientasi gerakan Ikhwanul Muslimin, Konsep Ideologi Ikhwanul Muslimin dan Landasan Teologisnya, Proses Masuk dan Berkembangnya Ideologi Ikhwanul Muslimin di Indonesia

Bab ketiga lebih dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera. Bab ini mengemukakan sejarah lahirnya Partai Keadilan Sejahtera, Platform Partai

Keadilan Sejahtera, yang menjelaskan identitas partai, visi dan misi partai serta tujuan partai. Sistem pengkaderan Partai Keadilan Sejahtera

Bab keempat. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin Terhadap Partai Keadilan Sejahtera, yang meliputi; Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin dalam Bidang Politik dan Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin dalam Bidang Keagamaan dan Dakwah, pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin dan konsep *Tarbiyah* (Pembinaan dan Kaderisasi), serta dalam konsep negara Islam

Bab kelima, penutup. Bab ini mencakup kesimpulan dan saran.



BAB II

PERKEMBANGAN IKHWANUL MUSLIMIN DI MESIR

A. Latar Belakang Berdirinya Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi pergerakan Islam kontemporer yang terbesar di zaman modern ini. Seruannya adalah kembali kepada Islam sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, serta mengajak kepada penerapan syari'at Islam dalam kehidupan nyata. Dengan tegar gerakan ini telah mampu membendung arus sekularisasi di dunia Arab dan Islam.²² Gerakan inilah yang pada gilirannya banyak mewarnai gerakan-gerakan Islam lainnya di dunia. Dengan semangat juang keislaman yang tinggi, di bawah komando pendirinya yakni Hasan al-Banna.²³

Kelahiran Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai sebuah gerakan reformasi Islam, tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh kuncinya yakni Hasan al-Banna. Nama lengkapnya adalah Hasan Ahmad Abdurrahman Al-Banna al-Sa'ati. Beliau lahir pada tanggal 14 Oktober 1906 M bertepatan dengan 1324 H di kota Mahmudiah, propinsi Buhairoh Mesir. Hasan al-Banna tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama, yang menerapkan Islam secara nyata dalam seluruh aspek kehidupannya.

Di samping belajar agama di rumah dan di masjid, beliau juga belajar pada sekolah pemerintah. Kemudian melanjutkan pelajarannya ke Dar al-'Ulum Kairo dan tamat pada tahun 1927. Setelah tamat dari Dar al-'Ulum beliau menjadi guru

²² Fathi Yakan, *Revolusi Hasan al-Banna (Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Quthb sampai Rasyid al-Ghannusy)*, terj (Jakarta; Penerbit Harakah, 1998) hal 13 -14

²³ M. Aunul Abied Shah, *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Timur Tengah*, terj (Bandung; Mizan, 2001) hal 58

pada sebuah Sekolah Dasar di Isma'iliyah. Dari Isma'iliyah inilah beliau memulai aktifitas keagamaannya di tengah-tengah masyarakat, terutama warung-warung kopi di hadapan para karyawan proyek terusan Suez.²⁴ Beliau mempunyai cara dan tehnik yang menarik dalam menyampaikan dakwahnya baik kepada jama'ah masjid maupun para pengunjung kedai kopi, sehingga mereka merasa terkesan dan mau menerima apa-apa yang disampaikan oleh Hasan al-Banna.

Pada bulan Zulkaidah 1346 H/Maret 1928 M Syaikh Hasan al-Banna didatangi oleh enam orang yang mengaku tertarik dengan kepribadian dan terkesan pada pola-pola dakwahnya. Mereka ialah al-Hafidh Abdul Hamid (berprofesi sebagai tukang kayu), Ahmad al-Hushay (berprofesi sebagai tukang pangkas rambut), Ismail Izz (berprofesi sebagai tukang kebun), Zaki al-Maghriby (berprofesi sebagai penyewa dan montir sepeda), dan Abdurrahman Abdullah (berprofesi sebagai sopir). Mereka menyatakan kepada Hasan Al- Banna untuk melakukan dakwah Islam dan mereka bermaksud mengembangkan diri. Dengan senang hati Hasan al-Banna menyambut baik mereka.²⁵

Keenam orang tersebut merupakan pengikut Hasan al-Banna yang menghayati ajarannya dengan penuh keyakinan. Mereka dengan penuh keimanan yang kuat dan cita-cita yang luhur berjuang meninggikan ajaran agama Islam. Hal tersebut merupakan bai'at sekaligus sumpah setia bahwa mereka saat itu telah mengikat tali persaudaraan dan sepakat untuk mengabdikan kepada Islam dan berjihad di jalan Allah SWT. Kemudian Hasan al-Banna mengusulkan nama

²⁴ LPP WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj, (Jakarta; Al-F'tishom, 2003), cet, 4 hal 7

²⁵ Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin Konsep Gerakan Terpadu*, Jilid I, terj, (Jakarta; Gema Insani Press, 1997) hal 25

untuk jama'ah atau perkumpulan mereka dengan Ikhwanul Muslimin atau Persaudaraan Muslim, alasannya karena tujuan mereka bersatu padu dalam sebuah persaudaraan tersebut semata-mata mengabdikan kepada Islam.

Ikhwanul Muslimin secara resmi berdiri di Kota Isma'iliyyah, di tepi terusan Suez Mesir, pada awal bulan Dzulqaidah 1347 H/Maret 1928. Ikhwanul Muslimin memiliki 7 dasar-dasar pokok;

1. Adanya aktifitas dakwah
2. Memiliki keistimewaan, kepribadian yang jelas dan memiliki sifat-sifat yang konkret
3. Memiliki kepemimpinan yang berkesadaran tinggi, bijak yang sasaran dan metodenya jelas
4. Memiliki pendukung setia yang siap membawa misi dengan keyakinan dan komitmen yang tinggi
5. Tujuan yang hendak dicapai jelas, tidak tergoyahkan oleh situasi apapun, dan gangguan-gangguan yang menghalangi di tengah jalan
6. Cara-cara untuk mencapai tujuan jelas, diketahui tahapan-tahapan dan langkah-langkahnya
7. Mempunyai sikap yang jelas terhadap isu-isu yang beredar²⁶

Dalam perkembangannya antara tahun 1925-1936 anggota gerakan Ikhwanul Muslimin semakin bertambah, sejak didirikan di Kota Isma'iliyyah pada tahun 1928 dakwah Islam dengan sangat cepat diterima oleh masyarakat. Banyak orang yang tertarik terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. Sehingga hal tersebut

²⁶ Yusuf al-Qardhawi, *70 Tahun al- Ikhwan al-Muslimun; Kilas Balik Dakwah Tarbiyah dan Jihad*, terj. (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 1999) hal 17

menyebabkan Hasan al-Banna termotifasi untuk mengembangkan organisasinya ke seluruh Mesir yaitu;

1. Di Kota Kairo, berpusat di sebuah gedung di kampung Nafi' dengan pimpinannya ustadz Abdurrahman Effendi
2. Di Kota Bur Said, kantor pusatnya di jalan Taufik dengan pimpinannya Mohammad Effendi Mustafa
3. Di Kota Balakh dan kantornya di kampung Jayasid al-Balakh dengan pimpinannya Syaikh Muhammad Ferry Wafa
4. Di Suez yang cabangnya ada dua tempat, yaitu;

- a. Di Kota Suez yang dipimpin oleh Ustadz Syaikh Abdul Razaq al-Buhainy

- b. Di kampung Hasan al-'Arbain dipimpin oleh Ustadz Syaikh Afify Empat tahun setelah didirikannya Ikhwanul Muslimin, tepatnya pada tahun 1932, kantor pusat Ikhwanul Muslimin berpindah dari Isma'iliyyah ke Kairo bersamaan dengan kepindahan Hasan al-Banna untuk mengajar di Madrasah al-Abbas. Sebelum kepindahan tersebut, di Kairo sudah didirikan cabang Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Abdurrahman.

Setelah Hasan al-Banna pindah ke Kairo, ia melakukan lebih banyak aktifitas dakwah Islam. Ia semakin konsisten dan intens membangun sarana dan prasarana serta dasar-dasar dakwah bagi para jama'ahnya. Ia mengadakan dialog-dialog dan diskusi serta membuka kelas-kelas pelajaran di kantor pusat. Pada musim panas berkeliling ke kampung-kampung di sebelah Utara dan Barat Kairo dalam rangka memperluas wilayah dakwah. Usaha tersebut menampakkan hasil

yang sangat memuaskan karena belum satu tahun kepindahannya ke Kairo, ia telah berhasil merangkul 50 desa untuk menyokong perjuangannya.

Pengaruh Hasan al-Banna semakin luas dan dari hasil adaptasinya dengan lingkungan hidup yang baru, memberinya inspirasi untuk menempuh sarana-sarana baru dalam berdakwah. Ia menulis beberapa petunjuk umum tentang dakwahnya, sebagai dasar-dasarnya dan tujuan perjuangan organisasi Ikhwanul Muslimin. Penerbitan majalah Ikhwanul Muslimin berkala mingguan, edisi perdana mulai diluncurkan pada bulan Mei 1933 (27 Shafar 1352) dan Muhibuddin al-Khatib ditunjuk sebagai pemimpin redaksinya atas dasar pengalamannya dalam bidang penerbitan dan jurnalistik.²⁷

Berikut adalah karya-karya Imam Hasan al-Banna;

1. *Ahaditsul Jum'ah* (Pesan setiap Jum'at)
2. *Mudzakkiratud Dakwah wa ad-Da'iyah* (Pesan – pesan buat dakwah dan da'i)
3. *Al-Ma'tsurat* (Wasiat-wasiat)

Karya-karyanya dalam bentuk kumpulan pesan (*Majmu'atur Rasail*) adalah;

1. *Da'watuna* (Misi Dakwah Kita)
2. *Nahwa an-Nuur* (Menuju Cahaya)
3. *Ila asy-syabab* (Kepada Para Pemuda)
4. *Bain al amsi wa al yaumi* (Antara Kemarin dan Hari ini)
5. *Risalatul Jihad* (Pesan Jihad)

²⁷ Disertasi Muh. Hatta, *Ikhwanul Muslimin (Kajian dari Konsep dan Strategi Dakwah)*, (Jakarta, Pasca Sarjana UIN, 2001) hal 39

6. *Risalat al-Ta'lim* (Pesan-pesan Pendidikan)
7. *Al-Mu'tamar al-Khamis* (Kumpulan Ceramah-ceramah Hari Kamis)
8. *Nizhamul Hukm* (Sistem Pemerintahan)
9. *Al-'Aqid* (Prinsip-prinsip)
10. *Nizhamul Usar* (Sistem Kelompok Kecil Pembinaan)
11. *Al-Ikhwān Tahta Rayat al-Qur'an* (Di Bawah Bendera al-Qur'an)
12. *Da'watuna Fi Thaurin Jadid* (Misi Kita dalam Masa Baru)
13. *Ila Ayyi Syai'in Nad'un Naas* (Kearah mana kita menyeru manusia
An-Nizham al-Iqtishadi (Sistem Perekonomian) ²⁸

Hasan al-Banna menyebutkan bahwa karakteristik yang paling utama dari gerakan Ikhwanul Muslimin adalah;

1. Berorientasi Ketuhanan (*Rabbaniyah*); maksudnya gerakan Ikhwanul Muslimin berdiri di atas 4 fondasi yang berusaha mendekatkan manusia kepada Tuhannya
2. Bersifat Internasional (*'Alamiyah*); maksudnya gerakan Ikhwanul Muslimin ditujukan kepada manusia secara keseluruhan, karena manusia pada dasarnya adalah bersaudara, nenek moyang dan keturunan mereka adalah satu (Nabi Adam) tidak ada kelebihan-superioritas- antara yang satu dengan yang lain, kecuali dengan taqwa dan kebaikan serta jasa-jasa yang mereka sumbangsikan kepada lingkungan masyarakat.
3. Bersifat Islami (*Islamiyah*); maksudnya bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin bersandarkan pada Islam.

²⁸ Fathi Yakan, *Revolusi Hasan al-Banna*, hal 13

Adapun perincian dan tujuan serta orientasi gerakan Ikhwanul Muslimin sebagai berikut;

- a. Memperbaiki diri pribadinya (*Ishlah an-Nafs*) sehingga mempunyai fisik kuat, berakhlak mulia, berintelektual, mampu berusaha, berakidah lurus dan benar-benar dalam beribadah
- b. Membentuk rumah tangga yang Islami (*Ishlah al-Bait al Muslim*) yang mampu membawa keluarganya untuk berpegang teguh pada pemikiran dan etika Islam di dalam setiap perilaku kehidupan rumah tangga
- c. Mengayomi masyarakat (*Ishlah al-Mujtama'*) dengan mengembangkan misi kebaikan dan memerangi kerusakan dan kemunkaran
- d. Membebaskan bangsa (*Tahrir al-Wathan*) dari segala bentuk penjajahan, kekuasaan asing yang non-Islam, baik di bidang politik, ekonomi maupun mental
- e. Memperbaiki pemerintahan (*Ishlah al-Hukumah*) sehingga benar-benar islami
- f. Mengembalikan keberadaan kekuatan internasional ke tangan umat Islam dengan cara membebaskan negara-negara Islam yang terjajah serta membangun kejayaannya
- g. Memimpin dunia, dengan cara menyebarkan dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia sehingga tidak ada lagi fitnah kesesatan dan seluruhnya tunduk kepada agama Allah SWT.²⁹

²⁹ Fathi Yakan, *Revolusi Hasan al-Banna*, hal 22

Dalam kesempatan yang lain Hasan al Banna mengungkapkan bahwa tujuan atau orientasi dari Ikhwanul Muslimin sebenarnya terbatas pada pembentukan generasi baru kaum beriman yang berpegang pada ajaran Islam yang benar, generasi tersebut akan bekerja untuk membentuk bangunan umat ini dengan Shibghat Islamiyah dalam semua aspek kehidupannya. “*Shibghah Allah dan adakah shibghah yang lebih baik dari shibghah Allah*” (QS; al-Baqarah; 138).

Selain Hasan al-Bana, gerakan Ikhwanul Muslimin juga mempunyai tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjalanan organisasi tersebut, yaitu Sayyid Quthb, nama lengkapnya adalah Sayyid Ibn al-Haj Quthb Ibrahim Husain Syadhili, dikenal sebagai kritikus sastra, pemikir Islam, aktivis muslim terkenal abad 20 dan tokoh gerakan Ikhwanul Muslimin.

Sayyid Quthb dilahirkan pada tanggal 09 Oktober 1906 di Musyah salah satu wilayah di Provinsi Asyuth Mesir³⁰, Sayyid Quthb menempuh pendidikan dasarnya ketika berusia 6 tahun di Madrasah Ibtidaiyah tempat ia lahir selama 4 tahun, kemudian melanjutkan pendidikannya ke madrasah Tsanawiyah Tajhiyah Daarul Ulum, kemudian melanjutkan Lagi ke Madrasah Aliyah Mu'allimin.³¹

Setelah menyelesaikan studinya di Madrasah Mu'allimin pada tahun 1930 Sayyid Quthb masuk ke Institut Darul Ulum, kemudian lulus dengan meraih gelar Sarjana Muda bidang Sastra. Pendidikan Sastra inilah yang menjadikan Sayyid Quthb selain sebagai sastrawan juga sebagai seorang pemikir, ia banyak menulis

³⁰ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Zhilal*, terj. (Solo; Era Intermedia, 2001) h.9

³¹ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Zhilal*, hal 31

berbagai artikel di berbagai surat kabar dan majalah serta menyampaikan ceramah-ceramah kritisnya di mimbar Fakultas semasa kuliah.

Setelah tamat dari Institut Daarul Ulum, Sayyid Quthb bekerja di Departemen Pendidikan sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah milik Departemen Pendidikan, kemudian ia diangkat menjadi pegawai di kantor Departemen Pendidikan sebagai penilik.

Pada tahun 1951, Sayyid Quthb aktif dalam berpolemik yakni perdebatan mengenai negeri Mesir melalui tulisan-tulisan, ceramah-ceramah dan pertemuan, ia mengkritik segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap keadaan sosial politik di negeri Mesir.

Pada bulan Januari 1951, Sayyid Quthb ditangkap dan dipenjara bersama aktifis Ikhwanul Muslimin dengan tuduhan pemikirannya menghujat pemerintah, tapi 3 bulan kemudian ia dibebaskan, beberapa waktu kemudian ia ditangkap kembali dan dipenjara selama 15 tahun dengan berbagai macam siksaan selama di penjara sehingga kesehatannya memburuk.

Belum lama menikmati kebebasan setelah 15 tahun dipenjara, pada tahun 1965 dia ditangkap kembali dengan tuduhan ingin menjatuhkan pemerintahan Gamal Abdul Nasser serta ingin merobohkan Mesir, tuduhan inilah yang akhirnya mengantarkannya ke tiang gantungan pada tanggal 29 Agustus 1966.³²

Karya-karya Sayyid Quthb yang terkenal;

1. *At-Tashwirul Fanniy fi al-Qur'an* (Seni Penggambaran dalam al-Qur'an)
2. *Masyid al-Qiyamah fi al-Qur'an* (Hari akhir menurut al-Qur'an)

³² Shalah Abdul Fatah, *Pengantar Memahami Tafsir fi Zhilal al- Qur'an Sayyid Quthb*, terj, (Solo Intermedia; 2001) hal 34

3. *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an* (Di Bawah Naungan al-Qur'an)
4. *As-Salam al-'Alami wa al-Islam* (Perdamaian Dunia Islam)
5. *Al Ma'rakat al-Islam wa ar-Raymaliyah* (Pergulatan antara Islam dan Kapitalisme)
6. *Hadza ad-Din* (Inilah Agama)
7. *Al-Mustaqbal li Hadza ad-Din* (Masa Depan Milik Agama Ini)
8. *Khasa'is at-Tashawwar al-Islami wa Muqawwamatuhu* (Ciri dan Nilai Visi Islam)
9. *Al-Islam wa al Musykilat al-Hadarah* (Islam dan Problem Peradaban)
10. Karya terpentingnya; *Ma'alim fi Thariq* (Petunjuk Jalan)

B. Ideologi Ikhwanul Muslimin dan Landasan Teologisnya

Pemikiran Ikhwanul Muslimin bersifat komprehensif, tidak mementingkan satu sisi perbaikan dan mengabaikan sisi yang lain. Ikhwanul Muslimin juga selalu digih di dalam memperluas daerah aktifitas pergerakan dakwahnya sehingga benar-benar bersifat internasional dan mendunia.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Imam Syahid Hasan al-Banna adalah sebuah gerakan pemikiran, sehingga dengan pemikiran tersebut gerakan ini menjadi laten yang tidak bisa diberangus oleh siapapun kecuali oleh sang Khaliq. Walaupun gerakan ini telah memasuki masa tribulasi dan dibekukan organisasinya, juga para anggota dan pengurusnya banyak yang dipenjara, tetapi gerakan ini masih tetap bisa bertahan dan malah makin membesar dan meluas ke berbagai belahan penjuru dunia.

Hal tersebut di atas dikarenakan sang ideologinya mempunyai orientasi dan pemikiran yang jelas dan terarah dalam membawa organisasi ini dan juga pembentukan para kadernya. Adalah imam Syahid Hasan al-Banna yang merumuskan konsep ideologi yang dikenal dengan nama *Arkanul Bai'ah* (10 Rukun Bai'at) dan juga *Ushul al 'Isyriin* (yang terdiri dari 20 prinsip) yang menguraikan tentang rukun bai'at yang pertama (*al-Fahm*).

Adapun keterangan tentang *Arkanul Bai'ah* (10 rukun Bai'at) adalah sebagai berikut;

A. Rukun Pertama; Al-Fahm (Pemahaman).

Menurut Hasan al-Banna meyakini bahwa fikrah manusia adalah fikrah Islamiyah yang murni serta memahami Islam sebagaimana yang difahaminya dalam batas-batas *Ushul al 'Isyriin* (20 prinsip).³³

Pentingnya pemahaman yang benar menurut Hasan al-Banna dapat membantu mewujudkan amal yang benar dan dapat memelihara pemiliknya dari ketergelinciran. Adapun kedua puluh prinsip (*Ushul al 'Isyriin*) yang dimaksudkan oleh Hasan al-Banna sebagai berikut;

1. Prinsip Pertama; *Kesempurnaan Islam*³⁴

Islam adalah sistem yang menyeluruh yang mencakup seluruh segi kehidupan, maka ia adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan ummat, moral dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu pengetahuan dan hukum, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan,

³³ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abdul Halim Hamid; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan; Kajian Analitik terhadap Risalah Ta'lim*, terj. (Bandung; Asy-Syamil, 2001) hal 21. Abdullah bin Qasim al-Wasyli, *Syarah Ushul 'Isyriin, Menyelami Samudra 20 Prinsip Hasan al-Bana*, (Solo; Era Inter Media; 2005)

³⁴ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 24

jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia adalah akidah yang murni dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih.

Prinsip ini menegaskan hakikat penting dari ajaran Islam yaitu keuniversalan dan keintegralan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

2. Prinsip Kedua; Sumber-sumber Hukum Islam ³⁵

Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasul yang suci adalah rujukan setiap muslim untuk mengenal dan memahami hukum-hukum Islam. Al-Qur'an harus dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, tanpa "*takalluf*" (sikap memaksakan diri dalam memaknai suatu ayat sehingga melampaui arti sewajarnya) dan "*ta'assuf*" (secara serampangan), sedangkan sunnah suci harus dipahami melalui para ahli hadist yang terpercaya.

Pada prinsip yang kedua ini mempunyai kaitan erat dengan prinsip sebelumnya, dimana pada prinsip yang kedua ini menetapkan referensi yang harus dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum-hukum yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan yang tercakup dalam ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

3. Prinsip Ketiga; Iman, Ibadah dan Mujahadah ³⁶

Keimanan yang murni, ibadah yang benar, dan *mujahadah* (bersungguh-sungguh dalam beribadah) adalah cahaya kelezatan yang Allah curahkan pada hati hamba-hamba-Nya yang dia kehendaki. Sementara ilham, lintasan pikiran, *kasyf* (ketersingkapannya rahasia gaib) dalam mimpi-mimpi, itu semua bukan termasuk syari'at Islam. Maka semua itu tidak perlu diperhatikan kecuali bila tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan teks-teksnya.

³⁵ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 24

³⁶ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 39

Pada prinsip ini dijelaskan tentang referensi yang harus dijadikan rujukan oleh setiap muslim dalam mengetahui hukum-hukum Islam dan menjelaskan tentang layak tidaknya referensi tersebut.

4. Prinsip Keempat; Menggunakan Sarana Selama Bukan Sarana Jahiliyah³⁷

Jimat, jampi (*ruqyah*), guna-guna, peramalan, perdukunan, mengaku tahu hal-hal ghaib adalah kemungkarannya yang wajib diberantas, kecuali jimat yang berasal dari al-Qur'an atau jampi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam prinsip yang keempat ini memfokuskan pembahasannya pada pemurnian akidah dari hal-hal yang dapat mengerukan dan membebaskan akal serta hati dari ketergantungan terhadap berbagai praduga, prasangka dan khurafat.

5. Prinsip Kelima; Pendapat Imam³⁸

Pendapat Imam (pemimpin) dan wakilnya tentang hal-hal yang tidak ada teks hukumnya, hal-hal yang mengandung beragam interpretasi, dan hal-hal yang membawa kemaslahatan umum yang tidak ada nashnya (*Maslahat Mursalah*), harus diamalkan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syari'at. Pendapat tersebut mungkin akan berubah sejalan situasi, kondisi, adat dan tradisi. Pada dasarnya ibadah adalah kepatuhan total, tanpa mempertimbangkan makna-maknanya, sedangkan adat istiadat (urusan selain ibadah ritual) harus mempertimbangkan rahasia-rahasianya, hikmah, maksud dan tujuannya.

Pada prinsip ini Imam Hasan Al-Banna menjelaskan beberapa prinsip tentang *siyasah syar'iyah* (kebijakan syariat), hal-hal yang diperbolehkan untuk Imam dan wakilnya serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ia juga menetapkan

³⁷ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 44

³⁸ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 47

beberapa kaidah dalam prinsip tersebut, dimana bila kaidah tersebut diabaikan, maka hukum-hukum tidak akan terlaksana, hak-hak akan terlantar, dan pintu-pintu kejahatan serta kerusakan akan terbuka.

6. Prinsip Keenam; Neraca untuk Menimbang Pendapat-pendapat Para Ulama dan Tata Etika Kepada Para Pendahulu Umat ini ³⁹

Setiap orang dapat ditolak ucapannya kecuali *al-Ma'shum* (Rasulullah SAW). segala yang datang dari para pendahulu (*salafus shalih*) yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah kita terima sepenuh hati. Bila tidak, maka al-Qur'an dan Sunnah lebih utama untuk diikuti. Namun demikian, kita tidak boleh mencaci dan menjelek-jelekkan pribadi mereka dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, serahkan saja pada niat mereka masing-masing, sebab mereka telah memperoleh apa yang telah mereka kerjakan.

Prinsip ini menetapkan beberapa hal yang dapat menjaga keistiqamahan seseorang pada jalan yang lurus; tidak ada sikap berlebih-lebihan dan pengabdian, tidak ada sikap menjilat dan meremehkan, serta tidak ada caci maki dan kesewenang-wenangan.

7. Prinsip Ketujuh; Ijtihad, Taklid dan Kemazhaban ⁴⁰

Setiap muslim yang belum mempunyai kemampuan telaah terhadap dalil-dalil hukum *furu'*(cabang), hendaklah mengikuti salah seorang imam (pemimpin agama). Namun lebih baik lagi sikap tersebut diiringi dengan upaya semampunya dalam memahami dalil-dalil yang dipergunakan oleh imamnya, dan hendaklah ia menerima setiap masukan yang disertai dalil, bila ia dipercaya pada kesalehan dan

³⁹ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 56

⁴⁰ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 59

kapasitas orang yang memberi masukan tersebut. Bila ia termasuk ahli ilmu, maka hendaklah ia selalu berusaha menyempurnakan kekurangannya dalam keilmuan sehingga dapat mencapai derajat penelaah.

8. Prinsip Kedelapan; Perbedaan dalam Masalah Furu' dan Etika dalam Perbedaan⁴¹

Perbedaan faham dalam masalah-masalah *furu'*, hendaklah tidak menjadi faktor pemecah belah dalam agama, dan tidak menyebabkan permusuhan dan kebencian. Setiap mujtahid akan mendapatkan pahala masing-masing, tidak ada larangan melakukan studi ilmiah yang objektif dalam persoalan-persoalan khilafiyah, dalam suasana saling mencintai karena Allah dan tolong menolong untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya. Studi tersebut tidak boleh menyeret pada debat yang tercela dan fanatik buta. Dalam prinsip ini Hasan al-Banna menjelaskan sikap yang harus diambil dalam menghadapi perbedaan faham dalam masalah-masalah dan menjelaskan berbagai pengaruh dari perbedaan-perbedaan pendapat tersebut.

Banyak manusia yang tidak tepat dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fiqih, sehingga dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, kebencian, fanatisme, debat dan lainnya yang justeru menambah kelemahan ummat Islam. Oleh karena sikap yang tepat untuk menghadapi perbedaan pendapat tersebut menurut Hasan al-Banna adalah dengan memelihara kesatuan hati dan kejernihan jiwa.

9. Prinsip Kesembilan; Mempersulit Diri dalam Beragama adalah Dilarang⁴²

⁴¹ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 63

Memperdalam pembahasan tentang masalah-masalah amal yang tidak dibangun di atasnya (tidak menghasilkan amal nyata) adalah sikap *takalluf* (mamaksakan diri) yang dilarang oleh Islam, misalnya memperluas pembahasan tentang berbagai hukum bagi masalah-masalah yang tidak benar-benar terjadi, memperbincangkan makna ayat-ayat al-Qur'anul Karim yang belum dijangkau oleh ilmu pengetahuan, perdebatan dalam membandingkan keutamaan para sahabat atau memperbincangkan perselisihan yang terjadi diantara mereka, padahal masing-masing memiliki keutamaan sebagai sahabat Nabi SAW serta pahala dari niat mereka.

Prinsip ini meletakkan kaidah yang dapat memelihara muslim dari kesia-siaan tenaga, pemborosan potensi, dan perpecahan sesama, sehingga ia menjadi muslim yang realistis, dinamis, kreatif dan konstruktif (pembangun), bukan muslim yang hanya teoritis, pandai berdebat dan memaksakan diri.

10. Prinsip Kesepuluh; Iman Kepada Allah dan Sifat-sifatnya⁴³

Ma'rifah (menenal) Allah SWT, mengesakan-Nya dan memahasucikan Dia adalah setinggi-tinggi tingkatan aqidah Islam, sedangkan ayat-ayat dan hadist-hadist sahih tentang sifat-sifat Allah adalah *mutasyabihat*, kita wajib mengimaninya sebagaimana adanya, tanpa menta'wilkan dan tanpa pengingkar (*ta'thil*), serta tidak perlu memperuncing perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal tersebut, kita mencukupkan diri seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Prinsip ini menjelaskan tentang kedudukan *tauhid* (mengesakan Allah) dalam akidah Islam, prinsip ini juga menjelaskan

⁴² M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 66

⁴³ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 73

tentang sikap yang moderat dalam menyikapi ayat-ayat dan hadist-hadist sahih yang terkait dengan sifat-sifat Allah.

“Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata; kami beriman kepada ayat-ayat Mutasyabihaat, semua itu dari sisi Tuhan kami” (QS; al-Imran 3-7)

11. Prinsip Kesebelas; Bid'ah⁴⁴

Segala bentuk bid'ah dalam agama yang tidak mempunyai dasar pijakan tetapi dianggap bagus oleh hawa nafsu manusia, baik penambahan maupun pengurangan, adalah kesesatan yang wajib diperangi dan diberangus dengan menggunakan cara yang sebaik-baiknya, agar tidak menimbulkan keburukan yang lebih parah.

Prinsip ini menegaskan keharusan komitmen pada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, serta tunduk pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah tanpa menambah atau mengurangi, dengan demikian setiap muslim harus menghindari segala bentuk bid'ah dalam agama bahkan harus memeranginya dengan cara yang paling baik.

12. Prinsip Kedua Belas; Jenis-jenis Bid'ah dan Hukumnya⁴⁵

Bid'ah Idhafiyah, *bid'ah Tarqiyah* dan *Bid'ah Iltizam* pada ibadah-ibadah yang *muthlaq* (tidak ditentukan tempat, waktu dan bilangannya) adalah masalah khilafiyah dalam bab fiqih, masing-masing orang mempunyai pendapat dalam masalah tersebut. Namun tidaklah mengapa jika dilakukan penelitian untuk sampai pada hakikatnya dengan dalil dan argumentasi, pada prinsip ini Hasan al-Banna menjelaskan tentang pembagian *bid'ah* serta tingkatan-tingkatan *bid'ah*.

⁴⁴ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 86

⁴⁵ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 90

13. Prinsip Ketiga Belas; Mencintai Orang-orang Saleh ⁴⁶

Mencintai orang-orang shaleh, menghormati mereka dan memuji mereka karena amal-amal baik mereka yang nampak adalah bagian dari taqarrub kepada Allah SWT, sedangkan para wali adalah orang-orang yang disebut dalam firman Allah SWT; “yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu bertaqwa”.

Karomah pada mereka itu benar adanya bila memenuhi syar’inya dan harus diyakini bahwa mereka tidak mempunyai mudharat maupun manfaat bagi dirinya sendiri, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia, apalagi bagi orang lain. Prinsip ini menjelaskan sikap yang benar dan obyektif terhadap orang-orang shaleh, para wali dan karamah mereka, yaitu sikap yang tidak berlebihan dan tidak mengabaikan pihak yang lain.

14. Prinsip Keempat Belas; Ziarah Kubur ⁴⁷

Ziarah kubur adalah sunnah yang disyariatkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi meminta pertolongan kepada penghuni kubur-siapapun mereka- berdo’a kepadanya, memohon pemenuhan hajat kepadanya (baik dari dekat maupun dari jauh), bernadzar untuknya, membangun kuburnya, memberinya penerangan dan mengusapnya (untuk mengambil berkah), juga bersumpah dengan selain Allah SWT dan segala sesuatu yang serupa dengannya adalah bid’ah besar yang wajib diperangi. Dilarang keras mencari *takwil* (pembenaran) terhadap amalan-amalan tersebut, demi menutup pintu fitnah yang lebih besar lagi, pada prinsip ini Hasan al-Banna memfokuskan

⁴⁶ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 93

⁴⁷ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 100

pada pemeliharaan akidah agar tetap bersih, jernih dan bebas dari berbagai *bid'ah* dan *khurafat*.

15. Prinsip Kelima Belas; Doa dan Tawassul ⁴⁸

Berdo'a kepada Allah disertai *tawassul* (perantara) dengan salah satu makhluk-Nya adalah perbedaan dalam masalah *furu'* tentang tata cara berdoa, bukan termasuk masalah akidah. Prinsip ini menjelaskan tentang hukum suatu masalah yang telah lama diperdebatkan di berbagai masjid, majalah dan surat kabar.

16. Prinsip Keenam Belas; Tradisi dan Adat Istiadat ⁴⁹

Tradisi yang salah tidak dapat mengubah hakikat arti lafal-lafal yang sudah baku dalam syari'at, maka seharusnya dipahami kembali makna yang dimaksud oleh lafal-lafal syari'at dan tunduk kepadanya. Sebagaimana juga kita wajib berhati-hati terhadap berbagai istilah yang menipu, yang sering digunakan dalam pembahasan masalah-masalah dunia dan agama. Ibroh (yang dijadikan patokan) itu pada esensi di balik suatu nama, bukan pada nama itu sendiri. Pada prinsip ini Hasan al-Banna menegaskan pengendalian syariat atas perilaku manusia, dan bahwa syariatlah yang berhak menentukan hukum, bukan adapt istiadat dan kebiasaan manusia.

17. Prinsip Ketujuh Belas; Akidah dan Perbuatan Hati ⁵⁰

Aqidah adalah asas bagi aktifitas, amal hati itu lebih penting dari pada amal anggota badan, namun mencapai kesempurnaan pada kedua hal tersebut merupakan tuntutan syari'at, meskipun kadar tuntutan masing-masing berbeda.

⁴⁸ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 104

⁴⁹ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 107

⁵⁰ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 111

Prinsip ini menegaskan tentang beberapa hakikat yang telah disyari'atkan oleh al-Qur'anul Karim dan dijelaskan oleh rasulullah SAW yaitu beberapa hakikat yang memiliki pengaruh besar pada perilaku seseorang dan pembinaannya.

18. Prinsip Kedelapan Belas; Kedudukan Akal Pikiran⁵¹

Islam itu membebaskan akal pikiran, menganjurkan penelitian pada alam, mengangkat derajat ilmu dan para ulama, dan menyambut kehadiran segala sesuatu yang baik dan bermanfaat, “hikmah adalah barang hilang milik orang yang beriman, di manapun didapatkan, ia adalah orang yang paling berhak atasnya”. Prinsip ini menegaskan sikap Islam terhadap akal dan ilmu, pada masa di mana akal terpenjara, ilmu terpasung dan manusia membutuhkan pandangan yang jelas terhadap sikap yang benar dan tepat, saat itulah kata – kata ulama harus dikumandangkan.

19. Prinsip Kesembilan Belas; Syariat Lebih Didahulukan Dibanding Akal⁵²

Pandangan Syar'i dan pandangan logika memiliki wilayah sendiri-sendiri yang tidak dapat saling memasuki secara sempurna, namun demikian, keduanya tidak akan pernah berbeda dalam hal-hal yang *qath'i* (absolute). Hakikat ilmiah tidak mungkin bertentangan dengan kaidah syari'at yang shahih, sesuatu yang bersifat *zhanni* (tidak *qath'i*) dari salah satunya harus ditafsiri dengan yang sejalan dengan yang *qath'i*, bila kedua-duanya bersifat *zhanni*, maka pandangan syari'at lebih utama untuk diikuti, sampai logika mendapatkan legalitas kebenarannya, atau gugur sama sekali.

⁵¹ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 114

⁵² M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 117

Prinsip ini menjelaskan wilayah garapan akal serta wilayah garapan syari'at, dalam prinsip ini pula juga menjelaskan bahwa hakikat syari'at tidak akan bertabrakan dengan hakikat ilmu.

20. Prinsip Kedua Puluh; Batas-batas Pengkafiran⁵³

Kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, mengamalkan tuntutan-tuntutannya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik karena pendapat maupun kemaksiatannya, kecuali jika ia mengatakan kata-kata kufur, atau mengingkari sesuatu yang telah diakui sebagai asas dari agama, atau mendustakan ayat-ayat al-Qur'an yang sudah jelas maknanya, atau menafsirkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, atau melakukan perbuatan yang tidak dapat ditafsiri kecuali kekufuran.

Pada prinsip ini Hasan al-Banna menjelaskan masalah yang paling berbahaya yaitu masalah pengkafiran, ada sebagian kaum yang berlebih-lebihan dalam menyikapi masalah ini, namun ada juga yang mengabaikannya, dan kedua sikap ini tidak terpuji. Dalam hal ini Hasan al-Banna memberikan solusi dengan membawa sikap yang moderat; yaitu tidak mebesar-besarkan masalah dan tidak menganggap enteng masalah tersebut sehingga dapat memelihara pemahaman al-akh muslim dari penyimpangan yang berbahaya dan pengabaian yang tercela.

B. Rukun Kedua; al-Ikhlas⁵⁴

Menurut Hasan al-Banna yang dimaksud dengan ikhlas adalah bahwa seorang manusia hendaknya mengorientasikan perkataan, perbuatan dan jihadnya

⁵³ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 122

⁵⁴ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 127

hanya kepada Allah SWT, mengharap keridhaan-Nya, tanpa mengharapkan keuntungan materi, prestise, pangkat, gelar, kemajuan dan kemunduran. Dengan itulah ia menjadi tentara akidah, bukan menjadi tentara kepentingan dan hanya mencari kemanfaatan dunia.

C. Rukun Ketiga; al-Amal⁵⁵

Dalam kesempatan kali ini Hasan al-Banna menjelaskan tentang nilai sebuah amal, ia menyatakan bahwa sebuah amal merupakan buah dari ilmu dan keikhlasan. Sebuah ilmu akan menjadi cacat dan sangat dangkal, bila tidak dapat mendorong pemiliknya untuk melakukan amal yang positif dan konstruktif. Ilmu dan keikhlasan yang tidak disertai dengan amal nyata ibarat pohon besar dan rindang yang tidak berbuah.

Perincian yang amat menarik tentang sifat-sifat al-akh yang tulus yang diutarakan oleh Hasan al-Banna memberikan dorongan kepada para pengurus dan anggota Ikhwanul Muslimin untuk beramal dan memfokuskan perhatian pada amal.

D. Rukun Keempat; Jihad⁵⁶

Urutan jihad yang pertama adalah pengingkaran hati dan puncaknya berperang di jalan Allah SWT, diantara keduanya ada jihad dengan lisan, pena, tangan dan kata-kata yang benar dihadapan penguasa yang zhalim, tanpa jihad dakwah tidak akan pernah hidup. Ketinggian dan luasnya cakrawala dakwah menjadi tolak ukur bagi sejauhmana keagungan jihad di jalan-Nya, besarnya harga

⁵⁵ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 137-138

⁵⁶ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 147

yang harus dibayar untuk mendukungnya, dan banyaknya pahala yang disediakan untuk para aktifisnya.

E. Rukun Kelima; at-Tadhiyyah (Pengorbanan) ⁵⁷

Yang dimaksud dengan *at-Tadhiyyah* adalah mengorbankan jiwa, harta, waktu, kehidupan dan segala-galanya demi mencapai tujuan, tidak ada jihad di dunia ini yang tidak disertai dengan pengorbanan.

F. Rukun Keenam; at-Tha'ah (Ketaatan) ⁵⁸

Maksud dari *at-Tha'ah* adalah melaksanakan perintah dan merealisasikan dengan serta merta baik dalam keadaan sulit maupun mudah, saat bersemangat maupun malas.

G. Rukun Ketujuh; ats-Tsabat (Keteguhan) ⁵⁹

Yang dimaksud dengan *ats-Tsabat* adalah bahwa hendaknya seorang al-akh senantiasa bekerja sebagai mujahid dalam memperjuangkan tujuannya, betapapun jauh jangkauan dan lama waktunya sampai bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan seperti itu, ia akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan yaitu mencapai hidup mulia atau mati syahid.

H. Rukun Kedelapan; at-Tajarrud (Loyalitas) ⁶⁰

Tajarrud (kemurnian dan totalitas) artinya tulus pada fikrah dan membersihkannya dari prinsip-prinsip lain serta pengaruh orang lain.

I. Rukun Kesembilan; al-Ukhuwwah (Persaudaraan) ⁶¹

⁵⁷ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 159

⁵⁸ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 169

⁵⁹ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 171

⁶⁰ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 188

⁶¹ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 193

Ukhuwwah merupakan wujud dari keimanan, sedang perpecahan wujud dari kekufuran, oleh karena itu hendaknya berbagai hati dan ruh berpadu dengan ikatan akidah, karena aqidah adalah ikatan yang paling kokoh dan paling mahal.

J. Rukun Kesepuluh; ats-Tsiqah (Kepercayaan)⁶²

Yang dimaksud dengan *Tsiqah* adalah rasa puasny sorang *jundi* (prajurit) Allah terhadap *qa'id* (pimpinannya) dalam hal kemampuan dan keikhlasannya, dengan kepuasan yang mendalam yang dapat menimbulkan rasa cinta, penghargaan dan penghormatan ketaatan.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Ikhwanul Muslimin adalah tegaknya Daulah Islam dan Khilafah Islam, atau dengan kata lain tegaknya agama yang diridhai Allah SWT agar dipeluk oleh semua manusia sampai hari kiamat.

Dengan demikian khilafah akan tegak apabila pemahaman terhadap Islam benar dan menyeluruh, yaitu pemahaman yang murni dan jernih seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW telah dimiliki oleh kaum Muslimin, sebab tidak mungkin agama ini kokoh atas dasar yang parsial, menyimpang apalagi keliru.

BAB III

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. Sejarah Lahirnya PKS

Sejarah lahirnya Partai Keadilan yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera tak lepas dari kondisi riil sejarah umat Islam Indonesia dari Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto di era orde baru. Itu bisa dilihat dari diskriminasi yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini terhadap umat Islam.

⁶² M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 199

Partai Keadilan adalah partai politik yang didirikan oleh sejumlah aktivis muslim Indonesia baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa pendiri Partai Keadilan yang berasal dari kalangan kampus dalam negeri yang diantaranya berasal dari mantan aktivis Universitas Negeri ternama di Indonesia, seperti, UI, IPB, UNDIP, ITB dan UGM.

Lahirnya gerakan dakwah kampus yang merupakan cikal bakal kemunculan kader-kader Partai Keadilan di era reformasi berawal dari munculnya kelompok anak muda yang memiliki semangat tinggi dalam mempelajari dan mengamalkan Islam, sebagai respon dari tekanan politik yang dilakukan pemerintah orde baru ketika itu terhadap umat Islam, dan juga adanya ruang publik yang relatif lapang yang bernama masjid atau mushalla kampus, tempat dimana idealisme kaum muda Islam itu mengalami persemaian ideal secara tepat. Sementara masjid kampus adalah basis yang dijadikan benteng pertahanan sekaligus basis gerakan dan faktor diatas membuat anak-anak muda bersemangat dalam perjuangan dakwah Islam yang semuanya bermula dari masjid Salman ITB (Institut Teknologi Bandung). Kelompok santri inilah yang pertama kali membuat kelompok-kelompok kecil bercirikan Islam.

Mereka terlembagakan dalam lingkungan usrah-usrah⁶³ yang akrab dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Orientasi ke-ikhwanul muslimin-an inilah yang menjadi pintu masuk bagi alumni Timur Tengah sebagai narasumber atau penterjemah gagasan-gagasan Islam Timur Tengah di Indonesia, mereka terlibat dalam kegiatan dakwah kampus. Kenyataan bahwa Timur Tengah merupakan

⁶³ Usrah adalah istilah dalam Bahasa Arab yang artinya “keluarga”, merupakan bentuk gerakan keagamaan yang dikembangkan oleh para aktivis mahasiswa Islam di masjid Salman ITB dan kemudian dikenal di kalangan aktivis muda Islam pada akhir 70 an dan awal 80-an

wilayah yang memiliki keterikatan erat dengan Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah dan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor agama dan politik, di mana sejak lama Timur Tengah telah memberikan kontribusi pemikiran dan gerakan dalam dinamika keagamaan dan politik di Indonesia.

Pada era sebelum kemerdekaan bermunculan setelah pendirinya berinteraksi dengan pemikiran dan gerakan Islam di Arab Saudi maupun Mesir contohnya, Muhammadiyah. PKS yang terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, gerakan tarbiyah yang merupakan tulang punggung dan pendukung utama partai ini mencoba untuk memformulakan ajaran ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari.⁶⁴

Namun bayang-bayang Ikhwanul Muslimin dalam diri partai ini membuat banyak pengamat Islam dan politik menganggap PKS tidak ada bedanya dengan kelompok-kelompok fundamentalis saat ini, karena mengingat Ikhwanul Muslimin dalam persepsi mereka adalah organisasi fundamentalis terlarang di Mesir yang dianggap ancaman bagi kelangsungan pemerintah yang berkuasa apabila dilihat dari sisi politik.

Momen keterbukaan politik yang diawali sejak dekade 1990-an telah menjadikan model dakwah tarbiyah ini semakin luas. Keterbukaan politik yang diawali pemerintah ini, ditambah dengan kecenderungan mengakomodasi kepentingan ummat Islam telah membawa angin segar bagi dakwah-dakwah dikampus. Bagi gerakan tarbiyah, era keterbukaan ini membawa berkah yang luar biasa untuk ekspansi gerakan-gerakan kampus. Usaha-usaha untuk kembali

⁶⁴ Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera; Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, (Bandung; Harkatuna, 2005) h, 59

berpartisipasi dalam dinamika politik dan social Indonesia semakin terbuka. Aktivis-aktivis gerakan ini mulai meluaskan sayapnya. Kesempatan untuk partisipasi langsung dalam kancah politik nasional menjadi terbuka setelah rezim yang berkuasa selama 32 tahun mengalami kehancuran.⁶⁵

Lengsernya Soeharto memungkinkan iklim kebebasan mulai terkuak, akan tetapi bukan berarti perjuangan untuk merealisasikan cita-cita dakwah sudah selesai. Perjalanan masih panjang karena dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam masih jauh dari tuntunan ajaran Islam. Struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat belum kondusif bagi upaya penumbuhan kepribadian Islam yang dicita-citakan. Sedangkan dalam bidang kesejahteraan umat Islam dapat dikatakan sebagai penghuni terbesar dari mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Perjuangan gerakan dakwah harus dilanjutkan. Musyawarah yang dilakukan oleh para aktifis dakwah Islam akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa iklim yang berkembang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya peraihan cita-cita, mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang diridhoi Allah SWT. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam merupakan bentuk transformasi terakhir yang dijalani oleh gerakan dakwah kampus, guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak orang, maka akhirnya merekapun sepakat untuk mengokohkan sebuah partai yang diberi nama Partai Keadilan.⁶⁶

⁶⁵ Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera; Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, h 69

⁶⁶ Sekretariat DPP Partai Keadilan, *Sekilas Partai Keadilan*, (Jakarta:DPP Partai Keadilan, Desember 1998) Cet-1, h.18

Partai Keadilan didirikan dengan sebuah keputusan yang diambil berdasarkan survey yang dilakukan kepada para aktivis gerakan dakwah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Inti pertanyaan yang diajukan dalam jajak pendapat tersebut adalah bentuk apa yang ditampilkan untuk muncul ke tengah public pada era reformasi, apakah bentuk organisasi massa atau organisasi politik, atau tetap mempertahankan penampilan yang selama ini digunakan yaitu dalam bentuk yayasan atau lembaga-lembaga dakwah.⁶⁷

Bentuk transformasi GDK (Gerakan Dakwah Kampus) menjadi Partai Keadilan (PK) barangkali bentuk transformasi paling fenomenal yang dilakukan oleh gerakan dakwah ini. Dikatakan fenomenal karena beberapa alasan, diantaranya;

- Pilihan mendirikan partai politik merupakan bentuk pemunculan publik yang paling utuh dari gerakan dakwah yang selama ini bergerak dengan banyak nama dan banyak kantong-kantongnya itu.
- Pilihan untuk mendirikan partai politik itu adalah sebuah keputusan yang tidak pernah diduga sebelumnya bahkan oleh para kadernya sendiri dan memicu kontroversi
- Pilihan tersebut membawa konsekuensi pada masuknya gerakan dakwah ke dalam politik praktis dengan logika dan sistemnya sendiri yang di masa lalu merupakan sesuatu yang sempat mereka jauhi. Artinya selama ini

⁶⁷ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* hal 228

trade mark mereka adalah aktivitas dakwah sedangkan berpolitik selama ini hampir-hampir mereka tidak pernah sentuh⁶⁸

Menurut Nur Mahmudi Isma'il (Presiden PK pertama), menyebut akar histories dari ideologis Partai Keadilan sangatlah panjang.⁶⁹ Karena itu sangat sulit untuk mengelompokkan mereka ke dalam genre politik tertentu, karena dalam sejarahnya pada level yang nyaris tidak bersentuhan dengan kekuatan politik manapun.⁷⁰

Kemunculan awal gerakan dakwah kampus yang menjadi cikal bakal Partai Keadilan ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran kalangan modernis Islam yang masa lalu direpresentasikan dengan baik oleh Masyumi-tidak secara otomatis membuat jamaah gerakan dakwah ini juga mewakilkan aspirasi politiknya kepada penerus-penerus Masyumi tersebut.⁷¹ Sebelumnya memang ada dugaan bahwa kelompok aktivis dakwah yang mendirikan Partai Keadilan ini mempunyai kedekatan emosional dan politik dengan kelompok Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), organisasi dakwah yang didirikan para mantan aktivis Masyumi dan juga tempat dimana sejumlah tokoh gerakan dakwah ini sebelumnya berbasis. Akan tetapi pasca reformasi jelaslah sudah

⁶⁸ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* hal 215-216

⁶⁹ *Republika* 10 Agustus 1998, h.3. Sementara dalam *Majalah Tempo*, edisi 18 Januari 1999, h.58, Nur Mahmudi menyebutkan akar histories itu hampir selama 20 tahun

⁷⁰ Menurut Fahri Hamzah, salah seorang deklarator PK, para pengurus PK merupakan personel baru yang selama ini tidak pernah tampil baik di masa Orde Baru maupun Orde Lama "Para pengrus PK murni orang-orang baru, yaitu dari kelompok muda yang akar historisnya memang bisa dicarikan, mereka itu sebelumnya tidak ada yang ikut Golkar, PPP, maupun PDI, apalagi PKI" (*Republika*, 10 Agustus 1998) h.3

⁷¹ Dalam konteks Orde Baru, penerus Masyumi itu adalah sebuah partai bernama Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang kemudian berubah menjadi Muslimin Indonesia (MI), pada tahun 1973, MI "dipksa" berfusi dengan beberapa partai Islam lain menjadi partai politik baru yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (*Republika*, 08 Mei 2000)h.8

perbedaan diantara keduanya. DDII membidani lahirnya Partai Bulan Bintang (PBB), sedangkan anak-anak muda aktivis Tarbiyah ini mendirikan Partai Keadilan. Para aktivis gerakan dakwah ini memakai proses reformasi yang terjadi sebagai Harakatul Ishlah (gerakan perbaikan) yang merupakan buah dari komitmen dakwah yang selama ini mereka kembangkan.⁷²

Partai Keadilan didirikan pada tanggal 20 Juli 1998, dan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di lapangan Masjid al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan jumlah massa yang hadir pada saat itu lebih dari 50.000 orang.⁷³ Kehadiran Partai Keadilan dalam pentas perpolitikan Indonesia pasca jatuhnya Soeharto menjadi sebuah fenomena yang menakjubkan banyak pihak. Betapa tidak, dari seluruh partai besar yang ada pada era reformasi, hanya PK-lah yang konstituennya tidak berasal dari kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas politik yang pernah eksis sebelumnya, juga sulit memastikan mereka dari bagian-bagian mainstream Islam seperti NU dan Muhammadiyah.⁷⁴

Dari segi kelahirannya PK sangat dipengaruhi oleh gerakan Islam di Mesir yaitu Ikhwanul Muslimin. Tesis ini diakui oleh pemikir ternama Ikhwanul Muslimin DR. Yusuf al-Qardhowi, namun hal ini dibantah oleh Sekjend PK H. Anis Matta, Lc, ia menegaskan, “Konteks pernyataan DR Yusuf al-Qordhowi diatas menjelaskan, bahwa pengaruh Ikhwanul Muslimin ada di seluruh dunia dan salah satu yang dekat dengan pemikiran IM di Indonesia adalah PK”⁷⁵. Namun demikian Presiden PK yang kedua DR Hidayat Nurwahid mengatakan “Substansi

⁷² Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* hal 220-221

⁷³ *Republika* 10 Agustus 1998, h.3

⁷⁴ *Panjimas* edisi 20 Februari-05 Maret 2003 h.39

⁷⁵ *Panjimas* edisi 20 Februari-05 Maret 2003, h.11 (Wawancara dengan H.Anis Matta)

itu lebih penting daripada nama, nama besarpun tak ada nilainya kalau tidak dijabarkan dalam kehidupan”⁷⁶, tetapi lain lagi pendapat yang dikemukakan oleh Cendekiawan Muslim, Nurcholis Madjid, ia berpendapat bahwa Partai Keadilan tidak mengambil contoh atau inspirasi dari mana-mana, ia mempunyai style tersendiri bagi seorang yang terpelajar.⁷⁷

Bulan Agustus 1999, pesta demokrasipun digelar dan PK merupakan salah satu peserta Pemilu saat itu, pada tanggal 2 Agustus 1999 PK menandatangani hasil penghitungan suara Pemilu. Prestasi perolehan suara pada saat itu cukup membuat banyak kalangan berdecak kagum, PK masuk dalam urutan tujuh besar partai pemenang Pemilu, PK meraih 1.436.565 suara atau 1,36 % dari total suara dan menempatkan tujuh wakilnya di DPR RI (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Provinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). Bahkan untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perolehan suara PK melebihi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang memiliki hubungan histories dengan NU dan Masyumi.⁷⁸

Pada pesta demokrasi tahun 2004, pemerintah membuat peraturan baru untuk peserta Pemilu, yaitu partai-partai yang ingin menjadi peserta Pemilu 2004 baik partai baru maupun partai lama harus memenuhi 2% atau lebih perolehan suara dari pendukungnya. Maka pada tanggal 17 April 2003, PK mengadakan Musyawarah Majelis Syuro XIII (Musyawarah Nasional Istimewa) di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi dan menghasilkan keputusan untuk merekomendasikan PK

⁷⁶ Nandang Burhanuddin, *Penegakan Syariat Islam menurut PK* (Jakarta; Al-Jannah Pustaka, Februari 2004), h.24

⁷⁷ Dikutip dari www.pk-sejahtera.or, rubric liputan media tanggal 1 Mei 1999

⁷⁸ Nandang Burhanuddin, *Penegakan Syariat Islam menurut PK*, h. 25

untuk bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2002 M atau bertepatan dengan 7 Shafar 1423 H, selanjutnya dideklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Silang Monas Jakarta yang dihadiri 40.000 massa.⁷⁹

Sesuai hasil Musyawarah Nasional Istimewa Partai Keadilan pada tanggal 17 April 2003 di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi yang merekomendasikan penggabungan Partai Keadilan (PK) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita, maka mereka menandatangani kesepakatan di hadapan notaries pada tanggal 3 Juli 2003 untuk menggabungkan diri dalam sebuah partai yang disepakati bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan professional. Karena itu, PKS sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.

Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai, dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini, sebagai partai yang menduduki peringkat 6 dalam Pemilu 2004 lalu.

Dalam menjalankan roda organisasi dan aktivitasnya, PKS dibingkai oleh Piagam Deklarasi, Visi dan Misi, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), kebijakan dasar partai dan peraturan-peraturan lainnya yang

⁷⁹ Dikutip dari www.pk-sejahtera.org

mengikat seluruh anggota partai. Roda organisasi dikendalikan oleh sebuah Dewan Pimpinan Pusat (*Central Board*) yang berpusat di Jakarta yang dikelola secara full time, selain itu ada Dewan Pimpinan Wilayah (Regional Board) dan Dewan Pimpinan Daerah (*District Board*) yang mengelola wilayah setingkat propinsi dan kota/kabupaten.

Saat ini, PKS memiliki pengurus di 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW=setingkat provinsi), 312 Dewan Pimpinan Daerah (DPD=setingkat kota/kabupaten) dan 2155 Dewan Pimpinan Cabang (DPC=setingkat kecamatan) di seluruh Indonesia. Selain itu, PKS juga memiliki 13 perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Pusat Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PIPKS).

PKS adalah partai politik modern yang terorganisir secara baik dan rapi. Hal ini tercapai berkat manajemen yang baik dan kontribusi dari kader-kadernya yang saat ini tercatat lebih dari 400.000 kader yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri.⁸⁰

B. Visi dan Misi Partai

Visi Umum:

- “SEBAGAI PARTAI DA’WAH PENEGAK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT DAN BANGSA.”

Visi Khusus:

- PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN OPINI DALAM

⁸⁰ Dikutip dari www.pk-sejahtera.or.id/organisasi.php.op=struktur

MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil 'alamin.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

MISI

1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.⁸¹

C. Sistem Pengkaderan dan Agenda-agenda Partai Keadilan Sejahtera

a. PKS Sebagai Partai Kader

1. Sistem Pembinaan

Metamorfosa gerakan Islam memasuki tahapan baru ketika lahirnya Partai Keadilan mengalami transformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan pelanjut perjuangan. Pola rekrutmen dan pembinaan yang diterapkan adalah melalui halaqoh-halaqoh tarbiyah yang sekarang tidak hanya ada di masjid-masjid kampus.

Pola hubungan dalam proses pendidikan antar aktifis dakwah diatur dalam sebuah strata yang ketat, dimana intensitas keterlibatan seorang aktifis diatur dalam sebuah tata kerja yang rapih.

Proses pembinaan yang ada di PKS dilaksanakan dengan pola-pola pembinaan dalam system tarbiyah seperti liqo', dauroh, rihlah, mabit, dll. Program-program pembinaan yang ada bukan hanya diperuntukkan bagi anggota yang baru masuk (pendatang), melainkan diperuntukkan bagi semua tingkat. Hal itu ditunjukkan dari program pertemuan dan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan satu pecan sekali di kepengurusan DPP PKS.

Pertemuan dan pembinaan agama tersebut bersifat komprehensif (menyeluruh), terkadang pembinaan tersebut dilakukan pada bagian masing-masing departemen yang ada secara terpisah atau secara penggabungan dari

⁸¹ Dikutip dari www.pk-sejahtera.or.id/organisasi.php.op=struktur

seluruh departemen yang ada, dari tingkat DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sampai DPRa (Dewan Pimpinan Ranting).

Adapun tingkat pengkaderan yang ada di Partai Keadilan Sejahtera adalah;

- Jenjang Pemula
- Jenjang Madya; Kader memiliki sifat-sifat merasakan urgensi berkorban dengan waktu dan harta, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam lingkup amal jama'I dan melakukan pembelaan terhadap dakwah
- Jenjang Dewasa; Kader melaksanakan semua tugas dan beban yang diminta, disertai upaya-upaya pengenalan berbagai kondisi dakwah (partai) dan sejarahnya. Kader menjadi seorang sufi total dari segi ruhiyah, bercorak disiplin militer dari segi praktek dan tidak merasa terpaksa dalam beramal
- Jenjang Ahli; Kader melanjutkan tujuan kaderisasi Anggota Dewasa, sekaligus menjadi cermin atau teladan bagi kader dalam pelaksanaan tugas-tugas dakwah.

2. Manajemen Organisasi

Dalam rangka membentuk organisasi yang baik, maka seseorang perlu memperhatikan prinsip-prinsip organisasi dan mempunyai manajemen organisasi yang baik. Para ahli memberikan beragam prinsip-prinsip organisasi yang dapat diringkas sebagai berikut;

1. Mempunyai tujuan yang jelas
2. Terdapat jenjang kepemimpinan dan system kepemimpinan yang layak

3. Mempunyai satu kesatuan perintah/komando
4. Terdapat pembagian wewenang yang jelas antar pemimpin
5. Terdapat system pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang jelas
6. Terdapat system pengendalian /rentang kendali
7. Terdapat garis koordinasi antara pimpinan dan anggota organisasi
8. Terdapat fleksibilitas cara pelaksanaan berbagai kegiatannya

Melihat poin-poin persyaratan agar bisa dikategorikan kedalam organisasi yang baik tersebut sebenarnya sudah dimiliki oleh PKS, misalnya; tujuan pendirian partai termanifestasi ke dalam visi dan misi yang jelas yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu. Kejelasan tentang jenjang kepemimpinan dan sistemnya terlihat pada struktur organisasi dan tugas-tugas pengurus organisasi yang jelas. Memiliki satu kesatuan komando, misalnya; dalam system kepengurusan ada Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) yang menjabat sebagai lembaga tertinggi partai.

b. Strategi Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera

Prinsip emas atau *golden principle* yang harus diperjuangkan bersama oleh seluruh komponen menurut PKS adalah mewujudkan “Ekonomi Nasional yang Mandiri, Adil dan Sejahtera”.

Menegakkan prinsip syuro dalam partai, menurut mantan Presiden PKS, DR.H.M. Hidayat Nurwahid mempengaruhi proses penegakkan prinsip demokrasi dalam skala nasional. Musathil dapat meraih cita-cita bangsa yang adil, demokratis, dan sejahtera, apabila PKS tidak memulainya sendiri, PKS harus

senantiasa mematangkan diri dalam proses belajar di bawah naungan pentadbiran Ilahi.

Dalam hal penjangkaran suara konstituen itu, peran sebuah platform menjadi penting selain memiliki AD/ART dan Prinsip Kebijakan yang diperjuangkan. Kejelasan platform merupakan modal yang berharga bagi para kader dan simpatisan untuk memperkenalkan partai di tengah masyarakat yang beragam. Kejelasan Platform PKS dituntut untuk tidak hanya sebagai kajian, akan tetapi memanifestasikan platform tersebut kedalam kegiatan yang nyata.

Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa kehadiran PKS dalam lapangan ekonomi, social, budaya dan kegiatan keagamaan jauh melampaui tugas-tugas politik formal yang kita gencarkan. PKS telah menanam investasi moral (moral investmen) dan memupuk modal social (*social capital*) dalam waktu yang lama.

Secara sederhana, tema besar (*tag line*) perjuangan PKS ditetapkan oleh Lajnah Pemenangan Pemilu (LPP) dalam Munas II di Bali Tanggal 20 Februari 2008 sebagai “BERSIH, PEDULI dan PROFESIONAL”, walaupun memang bukan klaim sepihak, bahwa PKS adalah satu-satunya partai yang bersih dan peduli terhadap nasib rakyat. Namun maksudnya PKS menginginkan dan memperjuangkan seluruh komponen masyarakat akan lahirnya “Kepemimpinan Nasional yang Bersih dari Korupsi dan Peduli dengan Nasib Rakyat”.

Berikut ini adalah 21 Platform yang diagendakan oleh PKS;⁸²

- Pemantapan Ekonomi Makro
- Pemantapan Otonomi Daerah

⁸² Hidayat Nurwahid, *Menyelamatkan Bangsa “Platform Kebijakan PK-Sejahtera”*, (Jakarta; DPP PKS & al-I’tishom Cahaya Ummat, 2004), h. 58-63

- Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
- Perjuangan Petani
- Perjuangan Buruh
- Perjuangan Nelayan
- Usaha Kecil dan Menengah
- Politik Nasional
- Pertahanan Keamanan
- Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
- Politik Luar Negeri
- Pendidikan Nasional
- Kepeloporan Pemuda
- Perempuan Indonesia
- Pembinaan Keluarga
- Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan
- Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Industri
- Seni Budaya dan Pariwisata
- Dakwah dan Pembinaan Ummat Beragama
- Komunikasi dan Informasi

Selain 21 Platform yang dibangun, PKS juga mempunyai agenda principal bersama, diantaranya;⁸³

⁸³ Hidayat Nurwahid, *Menyelamatkan Bangsa "Platform Kebijakan PK-Sejahtera"*, h. 46-48

1. Penegakan Hukum dan pemenuhan rasa keadilan yang tidak bisa ditawar-tawar
2. Pemerataan kesejahteraan seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan sebagai syarat minimal untuk kebangkitan ekonomi nasional
3. Perluasan pendidikan serta pembaharuan etika dan budaya merupakan pangkal pemulihan jati diri dan kepribadian bangsa
4. Perekatan kembali (*Comentation*) jiwa keumatan dan kebangsaan, melalui peran kepemimpinan yang berkarakter pemersatu, pelayan dan teladan bagi seluruh rakyat
5. Penegakan kedaulatan bangsa, dimulai dengan memelihara batas-batas wilayah negara kesatuan, secara fisik, laut dan udara
6. Perlindungan harkat kemanusiaan
7. Berperan serta dalam mewujudkan wajah peradaban dunia

Selain itu PKS menentukan terobosan-terobosan yang diharapkan membawa perubahan fundamentalis dengan mengambil inisiatif kecil yang berdaya ungkit besar untuk menyelesaikan masalah kebangsaan, antara lain,⁸⁴

1. Membangun organisasi yang solid dan berdisiplin tinggi sebagai role model kekuatan reformis
2. Mencetak kader-kader pemimpin yang amanah, kapabel dan kompeten, serta konsisten dalam menjalankan tugas public

⁸⁴ Hidayat Nurwahid, *Menyelamatkan Bangsa "Platform Kebijakan PK-Sejahtera"*, 49-56

3. Melakukan pendidikan politik kerakyatan yang otentik dan membebaskan, bukan dengan politik uang dan intimidasi
4. Membangun hubungan lintas kelompok dan lintas kepentingan dengan memprioritaskan kepentingan ummat dan bangsa yang lebih luas
5. Membina moral generasi muda terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa dalam menemukan jati diri mereka di tengah terpaan modernisasi dan globalisasi budaya
6. Menumbuhkan budaya dan gaya hidup yang sejalan dengan tuntunan syari'at serta kesantunan masyarakat
7. Merintis solidaritas nasional dan internasional dalam merespon masalah yang berkembang
8. Mengembangkan Pos Wanita Keluarga Sejahtera seagai pusat pelayanan keluarga untuk kesehatan ibu dan anak
9. Mendorong terselenggaranya pendidikan berongkos murah dengan kualitas tetap terjaga, seperti pendirian Sekolah Terbuka atau Sekolah Rakyat yang menampung anggota masyarakat yang tidak mampu
10. Memelopori usaha swadaya berskala mikro dengan bantuan permodalan melalui Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), yang kemudain berkemabang menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
11. Mendukung Sepenuhnya pengelolaan pers yang jujur, dan bertanggungjawab sebagai mediator komunikasi public
12. Membangun gerakan rakyat (*civil society*) yang mandiri dan berdaya dalam lingkup wilayah dan bidang tugas masing-masing

13. Menyemai bibit kepakaran dalam berbagai bidang ilmu dan aspek pembangunan dengan mendukung lembaga pemikiran (*think tank*) atau lembaga riset swasta dan pemerintah
14. Memompa jiwa sportifitas dalam beragam untuk kegiatan olahraga dan kepanduan yang dapat memperkuat semangat bela negara
15. Membentuk posko kemanusiaan di sejumlah daerah konflik dengan mengerahkan tenaga medis dan paramedic serta sukarelawan
16. Menumbuhkan kesadaran atas kelestarian sumber daya dalam bentuk kegiatan pecinta alam dan aksi peduli lingkungan

c. PKS dan Islam Politik di Indonesia

Hubungan antara negara dan ummat Islam di masa lalu banyak diwarnai dengan pengalaman gerakan-gerakan yang bahkan mengarah pada perlawanan dan pemberontakan.⁸⁵ Perlawanan tersebut disadari bersumber dari ide-ide dan dasar teoritis penciptaan masa depan kehidupan Indonesia. Ide dan konsep “Negara Islam” misalnya, adalah sebetuk perbedaan yang mengarah kepada perlawanan yang sangat antara ummat Islam dan negara di awal-awal kemerdekaan.

Pemberlakuan UU yang mengatur hal-hal yang paling mendasar, seperti ideology sebuah ormas keagamaan atau asas sebuah partai politik – apalagi berbasis agama- menjadi penting agar mampu meredam semangat perlawanan yang nilai-nilainya memang tumbuh subur dalam ajaran-ajaran normatif agama.

⁸⁵ Lihat Kajian Tentang *pertentangan pemberontakan Islam*, misalnya; dalam Karl Jackson, *Kewibawaan Tradisional Islam dan Pemberontakan*; Kasus Darul Islam Jawa Barat, (Jakarta; Pustaka Utama Grafity, 1990)

Atau setidaknya, dengan pengaturan pada level struktur kehidupan modern yang bernama negara, kehendak dan pandangan sebagian umat dapat dibelokkan sesuai dengan kepentingan dan kehendak penguasa.

Konsepsi pembelokan atau pengarahannya itu bersumber dari penempatan agama sebagai *variable individual* dan dianggap tidak berhubungan dengan berbagai permasalahan politik kenegaraan. Disinilah letak gagasan modernisasi yang dipandang membawa serta didalamnya sekularisasi, yaitu berusaha menempatkan agama hanya sebagai modal dasar pembangunan dan arah perubahan social. Agama bersama kebudayaan dalam kedudukan fungsionalnya dipandang tidak memiliki hubungan structural dengan *variable ekonomi, politik dan kenegaraan*. Cara pandang semacam inilah yang menjadi landasan dikeluarkannya kebijakan UU No.05 th 1985 yang dimaksudkan untuk menghapus ciri asas partai politik yang berasas Islam.

Dengan diberlakukannya UU tersebut pemerintah Orde Baru menunjukkan dengan berbagai cara ketidaksukaannya terhadap aksi-aksi mahasiswa dan umat Islam. Sehingga persetujuan antara pemerintah dan mahasiswa pun tidak dapat dihindarkan. Puncaknya adalah ketika 1977 dan 1978, mahasiswa kembali bergerak dan membuat suhu politik memanas sehingga menyebabkan dikeluarkannya keputusan pembubaran *Student Government*. Namun, selang waktu yang tidak begitu lama, pemerintah mengeluarkan kebijakan NKK/BKK yang memberikan control sepenuhnya gerakan mahasiswa kepada pihak birokrat kampus.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa keterpurukan kondisi masyarakat Islam atas rezim Orde Baru-lah yang kemudian menimbulkan ruang bagi mahasiswa untuk mencari strategi dan solusi yang kemudian menghantarkan mereka kedalam gerakan keagamaan yang berbasis kampus yang dikenal dengan nama gerakan dakwah kampus, sehingga kemudian dari para aktivis dakwah kampus inilah terlahir sebuah partai yang fenomenal yaitu Partai Keadilan dan kemudian mentransformasikan diri menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

PKS merupakan partai Islam yang mempunyai tujuh karakteristik;

1. *Moralis*; PKS berupaya menjadikan komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku individu dan politiknya atau berusaha menampilkan sisi moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam
2. *Profesional*; hal ini dimaksudkan kedalam pembentukan pribadi dengan memperhatikan aspek intelektualitas, sikap kritis dan sensitivitas yang lebih dalam aktivitas partai
3. *Patriotik*; kehidupan berpartai adalah perjuangan. Diatas landasan inilah semangat dikobarkan dalam upaya meraih cita-cita masa depan
4. *Moderat*; karakter ini sesungguhnya merupakan karakter Islam itu sendiri. Menurut DR. Yusuf Qordhowi, moderat (*al-Wasthiyah*) berarti keseimbangan (*at-tawazun*). Karakteristik moderat yang ditampilkan oleh PKS inilah yang menjadikan PKS berbeda dengan partai lain. Sikap kemoderatan PKS ditunjukkan pada saat masih bernama PK, yaitu saat menentukan untuk berkoalisi dengan PAN, dan juga saat memperjuangkan

“Piagam Jakarta”, sedangkan partai Islam lain seperti; PPP, PBB, Masyumi memperjuangkan ide Amandemen UUD 1945

5. *Demokrat*; adalah menerima nilai-nilai universal demokrasi sebagai bentuk pengakuan kepada manusia dalam tanggungjawabnya sebagai khalifatullah
6. *Reformis*; PKS akan menempatkan posisinya sebagai reformis serta berusaha konsisten menjauhi segala bentuk karakter dan sifat-sifat yang menimbulkan kerusakan
7. *Independen*; PKS menyatakan sebagai partai dakwah akan tetap berada pada posisi kemerdekaan (independensi) dalam artian yang sebenarnya.⁸⁶

Karakteristik-karakteristik yang dimiliki PKS merupakan gambaran dari ketidaksamaan PKS dengan Islam politik lain yang ada di Indonesia.

⁸⁶Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* hal 29-30

BAB III

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

B. Sejarah Lahirnya PKS

Sejarah lahirnya Partai Keadilan yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera tak lepas dari kondisi riil sejarah umat Islam Indonesia dari Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto di era orde baru. Itu bisa dilihat dari diskriminasi yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini terhadap umat Islam. Partai Keadilan adalah partai politik yang didirikan oleh sejumlah aktivis muslim Indonesia baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa pendiri Partai Keadilan yang berasal dari kalangan kampus dalam negeri yang diantaranya berasal dari mantan aktivis Universitas Negeri ternama di Indonesia, seperti, UI, IPB, UNDIP, ITB dan UGM.

Lahirnya gerakan dakwah kampus yang merupakan cikal bakal kemunculan kader-kader Partai Keadilan di era reformasi berawal dari munculnya kelompok anak muda yang memiliki semangat tinggi dalam mempelajari dan mengamalkan Islam, sebagai respon dari tekanan politik yang dilakukan pemerintah orde baru ketika itu terhadap umat Islam, dan juga adanya ruang publik yang relatif lapang yang bernama masjid atau mushalla kampus, tempat dimana idealisme kaum muda Islam itu mengalami persemaian ideal secara tepat. Sementara masjid kampus adalah basis yang dijadikan benteng pertahanan sekaligus basis gerakan dan faktor diatas membuat anak-anak muda bersemangat dalam perjuangan dakwah Islam yang semuanya bermula dari masjid Salman ITB (Institut Teknologi Bandung). Kelompok santri inilah yang pertama kali membuat kelompok-kelompok kecil bercirikan Islam.

Mereka terlembagakan dalam lingkungan usrah-usrah⁸⁷ yang akrab dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Orientasi ke-ikhwanul muslimin-an inilah yang menjadi pintu masuk bagi alumni Timur Tengah sebagai narasumber atau penterjemah gagasan-gagasan Islam Timur Tengah di Indonesia, mereka terlibat dalam kegiatan dakwah kampus. Kenyataan bahwa Timur Tengah merupakan wilayah yang memiliki keterikatan erat dengan Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah dan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor agama dan politik, di mana sejak lama Timur Tengah telah memberikan kontribusi pemikiran dan gerakan dalam dinamika keagamaan dan politik di Indonesia.

Pada era sebelum kemerdekaan bermunculan setelah pendirinya berinteraksi dengan pemikiran dan gerakan Islam di Arab Saudi maupun Mesir contohnya, Muhammadiyah. PKS yang terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, gerakan tarbiyah yang merupakan tulang punggung dan pendukung utama partai ini mencoba untuk memformulakan ajaran ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari.⁸⁸

Namun bayang-bayang Ikhwanul Muslimin dalam diri partai ini membuat banyak pengamat Islam dan politik menganggap PKS tidak ada bedanya dengan kelompok-kelompok fundamentalis saat ini, karena mengingat Ikhwanul Muslimin dalam persepsi mereka adalah organisasi fundamentalis terlarang di Mesir yang dianggap ancaman bagi kelangsungan pemerintah yang berkuasa apabila dilihat dari sisi politik.

⁸⁷ Usrah adalah istilah dalam Bahasa Arab yang artinya “keluarga”, merupakan bentuk gerakan keagamaan yang dikembangkan oleh para aktivis mahasiswa Islam di masjid Salman ITB dan kemudian dikenal di kalangan aktivis muda Islam pada akhir 70 an dan awal 80-an

⁸⁸ Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera; Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, (Bandung; Harakatuna, 2005) h, 59

Momen keterbukaan politik yang diawali sejak dekade 1990-an telah menjadikan model dakwah tarbiyah ini semakin luas. Keterbukaan politik yang diawali pemerintah ini, ditambah dengan kecenderungan mengakomodasi kepentingan ummat Islam telah membawa angin segar bagi dakwah-dakwah dikampus. Bagi gerakan tarbiyah, era keterbukaan ini membawa berkah yang luar biasa untuk ekspansi gerakan-gerakan kampus. Usaha-usaha untuk kembali berpartisipasi dalam dinamika politik dan social Indonesia semakin terbuka. Aktivis-aktivis gerakan ini mulai meluaskan sayapnya. Kesempatan untuk partisipasi langsung dalam kancah politik nasional menjadi terbuka setelah rezim yang berkuasa selama 32 tahun mengalami kehancuran.⁸⁹

Lengsernya Soeharto memungkinkan iklim kebebasan mulai terkuak, akan tetapi bukan berarti perjuangan untuk merealisasikan cita-cita dakwah sudah selesai. Perjalanan masih panjang karena dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam masih jauh dari tuntunan ajaran Islam. Struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat belum kondusif bagi upaya penumbuhan kepribadian Islam yang dicita-citakan. Sedangkan dalam bidang kesejahteraan umat Islam dapat dikatakan sebagai penghuni terbesar dari mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Perjuangan gerakan dakwah harus dilanjutkan. Musyawarah yang dilakukan oleh para aktifis dakwah Islam akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa iklim yang berkembang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya peraihan cita-cita, mewujudkan bangsa dan negara Indonesia

⁸⁹ Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera; Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, h 69

yang diridhoi Allah SWT. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam merupakan bentuk transformasi terakhir yang dijalani oleh gerakan dakwah kampus, guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak orang, maka akhirnya merekapun sepakat untuk mengokohkan sebuah partai yang diberi nama Partai Keadilan.⁹⁰

Partai Keadilan didirikan dengan sebuah keputusan yang diambil berdasarkan survey yang dilakukan kepada para aktivis gerakan dakwah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Inti pertanyaan yang diajukan dalam jajak pendapat tersebut adalah bentuk apa yang ditampilkan untuk muncul ke tengah public pada era reformasi, apakah bentuk organisasi massa atau organisasi politik, atau tetap mempertahankan penampilan yang selama ini digunakan yaitu dalam bentuk yayasan atau lembaga-lembaga dakwah.⁹¹

Bentuk transformasi GDK (Gerakan Dakwah Kampus) menjadi Partai Keadilan (PK) barangkali bentuk transformasi paling fenomenal yang dilakukan oleh gerakan dakwah ini. Dikatakan fenomenal karena beberapa alasan, diantaranya;

- Pilihan mendirikan partai politik merupakan bentuk pemunculan publik yang paling utuh dari gerakan dakwah yang selama ini bergerak dengan banyak nama dan banyak kantong-kantongnya itu.

⁹⁰ Sekretariat DPP Partai Keadilan, *Sekilas Partai Keadilan*, (Jakarta:DPP Partai Keadilan, Desember 1998) Cet-1, h.18

⁹¹ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* hal 228

- Pilihan untuk mendirikan partai politik itu adalah sebuah keputusan yang tidak pernah diduga sebelumnya bahkan oleh para kadernya sendiri dan memicu kontroversi
- Pilihan tersebut membawa konsekuensi pada masuknya gerakan dakwah ke dalam politik praktis dengan logika dan sistemnya sendiri yang di masa lalu merupakan sesuatu yang sempat mereka jauhi. Artinya selama ini trade mark mereka adalah aktivitas dakwah sedangkan berpolitik selama ini hampir-hampir mereka tidak pernah sentuh⁹²

Menurut Nur Mahmudi Isma'il (Presiden PK pertama), menyebut akar histories dari ideologis Partai Keadilan sangatlah panjang.⁹³ Karena itu sangat sulit untuk mengelompokkan mereka ke dalam genre politik tertentu, karena dalam sejarahnya pada level yang nyaris tidak bersentuhan dengan kekuatan politik manapun.⁹⁴

Kemunculan awal gerakan dakwah kampus yang menjadi cikal bakal Partai Keadilan ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran kalangan modernis Islam yang masa lalu direpresentasikan dengan baik oleh Masyumi-tidak secara otomatis membuat jamaah gerakan dakwah ini juga mewakilkan aspirasi politiknya kepada penerus-penerus Masyumi tersebut.⁹⁵ Sebelumnya

⁹² Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* hal 215-216

⁹³ Republika 10 Agustus 1998, h.3. Sementara dalam Majalah Tempo, edisi 18 Januari 1999, h.58, Nur Mahmudi menyebutkan akar histories itu hampir selama 20 tahun

⁹⁴ Menurut Fahri Hamzah, salah seorang deklarator PK, para pengurus PK merupakan personel baru yang selama ini tidak pernah tampil baik di masa Orde Baru maupun Orde Lama "Para pengrus PK murni orang-orang baru, yaitu dari kelompok muda yang akar historisnya memang bisa dicarikan, mereka itu sebelumnya tidak ada yang ikut Golkar, PPP, maupun PDI, apalagi PKI" (Republika, 10 Agustus 1998) h.3

⁹⁵ Dalam konteks Orde Baru, penerus Masyumi itu adalah sebuah partai bernama Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang kemudian berubah menjadi Muslimin Indonesia (MI), pada

memang ada dugaan bahwa kelompok aktivis dakwah yang mendirikan Partai Keadilan ini mempunyai kedekatan emosional dan politik dengan kelompok Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), organisasi dakwah yang didirikan para mantan aktivis Masyumi dan juga tempat dimana sejumlah tokoh gerakan dakwah ini sebelumnya berbasis. Akan tetapi pasca reformasi jelaslah sudah perbedaan diantara keduanya. DDII membidani lahirnya Partai Bulan Bintang (PBB), sedangkan anak-anak muda aktivis Tarbiyah ini mendirikan Partai Keadilan. Para aktivis gerakan dakwah ini memakai proses reformasi yang terjadi sebagai Harakatul Ishlah (gerakan perbaikan) yang merupakan buah dari komitmen dakwah yang selama ini mereka kembangkan.⁹⁶

Partai Keadilan didirikan pada tanggal 20 Juli 1998, dan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di lapangan Masjid al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan jumlah massa yang hadir pada saat itu lebih dari 50.000 orang.⁹⁷ Kehadiran Partai Keadilan dalam pentas perpolitikan Indonesia pasca jatuhnya Soeharto menjadi sebuah fenomena yang menakjubkan banyak pihak. Betapa tidak, dari seluruh partai besar yang ada pada era reformasi, hanya PK-lah yang konstituennya tidak berasal dari kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas politik yang pernah eksis sebelumnya, juga sulit memastikan mereka dari bagian-Bagian mainstream Islam seperti NU dan Muhammadiyah.⁹⁸

tahun 1973, MI “dikpsa” berfusi dengan beberapa partai Islam lain menjadi partai politik baru yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Republika, 08 Mei 2000)h.8

⁹⁶ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* hal 220-221

⁹⁷ Republika 10 Agustus 1998, h.3

⁹⁸ Panjimas edisi 20 Februari-05 Maret 2003 h.39

Dari segi kelahirannya PK sangat dipengaruhi oleh gerakan Islam di Mesir yaitu Ikhwanul Muslimin. Tesis ini diakui oleh pemikir ternama Ikhwanul Muslimin DR. Yusuf al-Qardhowi, namun hal ini dibantah oleh Sekjend PK H. Anis Matta, Lc, ia menegaskan, “Konteks pernyataan DR Yusuf al-Qordhowi diatas menjelaskan, bahwa pengaruh Ikhwanul Muslimin ada di seluruh dunia dan salah satu yang dekat dengan pemikiran IM di Indonesia adalah PK”⁹⁹. Namun demikian Presiden PK yang kedua DR Hidayat Nurwahid mengatakan “Substansi itu lebih penting daripada nama, nama besarpun tak ada nilainya kalau tidak dijabarkan dalam kehidupan”¹⁰⁰, tetapi lain lagi pendapat yang dikemukakan oleh Cendekiawan Muslim, Nurcholis Madjid, ia berpendapat bahwa Partai Keadilan tidak mengambil contoh atau inspirasi dari mana-mana, ia mempunyai style tersendiri bagi seorang yang terpelajar.¹⁰¹

Bulan Agustus 1999, pesta demokrasipun digelar dan PK merupakan salah satu peserta Pemilu saat itu, pada tanggal 2 Agustus 1999 PK menandatangani hasil penghitungan suara Pemilu. Prestasi perolehan suara pada saat itu cukup membuat banyak kalangan berdecak kagum, PK masuk dalam urutan tujuh besar partai pemenang Pemilu, PK meraih 1.436.565 suara atau 1,36 % dari total suara dan menempatkan tujuh wakilnya di DPR RI (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Provinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). Bahkan untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perolehan suara PK melebihi Partai Kebangkitan Bangsa dan

⁹⁹ Panjimas edisi 20 Februari-05 Maret 2003, h.11 (Wawancara dengan H.Anis Matta)

¹⁰⁰ Nandang Burhanuddin, *Penegakan Syariat Islam menurut PK* (Jakarta; Al-Jannah Pustaka, Februari 2004), h.24

¹⁰¹ Dikutip dari www.pk-sejahtera.or, rubric liputan media tanggal 1 Mei 1999

Partai Bulan Bintang (PBB) yang memiliki hubungan histories dengan NU dan Masyumi.¹⁰²

Pada pesta demokrasi tahun 2004, pemerintah membuat peraturan baru untuk peserta Pemilu, yaitu partai-partai yang ingin menjadi peserta Pemilu 2004 baik partai baru maupun partai lama harus memenuhi 2% atau lebih perolehan suara dari pendukungnya. Maka pada tanggal 17 April 2003, PK mengadakan Musyawarah Majelis Syuro XIII (Musyawarah Nasional Istimewa) di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi dan menghasilkan keputusan untuk merekomendasikan PK untuk bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2002 M atau bertepatan dengan 7 Shafar 1423 H, selanjutnya dideklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Silang Monas Jakarta yang dihadiri 40.000 massa.¹⁰³

Sesuai hasil Musyawarah Nasional Istimewa Partai Keadilan pada tanggal 17 April 2003 di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi yang merekomendasikan penggabungan Partai Keadilan (PK) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita, maka mereka menandatangani kesepakatan di hadapan notaries pada tanggal 3 Juli 2003 untuk menggabungkan diri dalam sebuah partai yang disepakati bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik

¹⁰² Nandang Burhanuddin, *Penegakan Syariat Islam menurut PK*, h. 25

¹⁰³ Dikutip dari www.pk-sejahtera.org

secara moral, intelektual, dan professional. Karena itu, PKS sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.

Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai, dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini, sebagai partai yang menduduki peringkat 6 dalam Pemilu 2004 lalu.

Dalam menjalankan roda organisasi dan aktivitasnya, PKS dibingkai oleh Piagam Deklarasi, Visi dan Misi, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), kebijakan dasar partai dan peraturan-peraturan lainnya yang mengikat seluruh anggota partai. Roda organisasi dikendalikan oleh sebuah Dewan Pimpinan Pusat (*Central Board*) yang berpusat di Jakarta yang dikelola secara full time, selain itu ada Dewan Pimpinan Wilayah (*Regional Board*) dan Dewan Pimpinan Daerah (*District Board*) yang mengelola wilayah setingkat propinsi dan kota/kabupaten.

Saat ini, PKS memiliki pengurus di 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW=setingkat provinsi), 312 Dewan Pimpinan Daerah (DPD=setingkat kota/kabupaten) dan 2155 Dewan Pimpinan Cabang (DPC=setingkat kecamatan) di seluruh Indonesia. Selain itu, PKS juga memiliki 13 perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Pusat Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PIPKS).

PKS adalah partai politik modern yang terorganisir secara baik dan rapi. Hal ini tercapai berkat manajemen yang baik dan kontribusi dari kader-kadernya

yang saat ini tercatat lebih dari 400.000 kader yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri.¹⁰⁴

B. Visi dan Misi Partai

Visi Umum:

- “SEBAGAI PARTAI DA’WAH PENEGAK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT DAN BANGSA.”

Visi Khusus:

- PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN OPINI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

5. Partai da’wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
7. Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
8. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

MISI

¹⁰⁴ Dikutip dari www.pk-sejahtera.or.id/organisasi.php.op=struktur

8. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
9. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
10. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
11. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
12. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
13. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihsatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
14. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.¹⁰⁵

C. Sistem Pengkaderan dan Agenda-agenda Partai Keadilan Sejahtera

a. PKS Sebagai Partai Kader

1. Sistem Pembinaan

Metamorfosa gerakan Islam memasuki tahapan baru ketika lahirnya Partai Keadilan mengalami transformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan pelanjut perjuangan. Pola rekrutmen dan pembinaan yang diterapkan adalah melalui halaqoh-halaqoh tarbiyah yang sekarang tidak hanya ada di masjid-masjid kampus.

¹⁰⁵ Dikutip dari www.pk-sejahtera.or.id/organisasi.php.op=struktur

Pola hubungan dalam proses pendidikan antar aktifis dakwah diatur dalam sebuah strata yang ketat, dimana intensitas keterlibatan seorang aktifis diatur dalam sebuah tata kerja yang rapih.

Proses pembinaan yang ada di PKS dilaksanakan dengan pola-pola pembinaan dalam system tarbiyah seperti liqo', dauroh, rihlah, mabit, dll. Program-program pembinaan yang ada bukan hanya diperuntukkan bagi anggota yang baru masuk (pendatang), melainkan diperuntukkan bagi semua tingkat. Hal itu ditunjukkan dari program pertemuan dan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan satu pecan sekali di kepengurusan DPP PKS.

Pertemuan dan pembinaan agama tersebut bersifat komprehensif (menyeluruh), terkadang pembinaan tersebut dilakukan pada bagian masing-masing departemen yang ada secara terpisah atau secara penggabungan dari seluruh deapartemen yang ada, dari tingkat DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sampai DPRa (Dewan Pimpinan Ranting).

Adapun tingkat pengkaderan yang ada di Partai Keadilan Sejahtera adalah;

- Jenjang Pemula
- Jenjang Madya; Kader memiliki sifat-sifat merasakan urgensi berkorban dengan waktu dan harta, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam lingkup amal jama'I dan melakukan pembelaan terhadap dakwah
- Jenjang Dewasa; Kader melaksanakan semua tugas dan beban yang diminta, disertai upaya-upaya pengenalan berbagai kondisi dakwah (partai) dan sejarahnya. Kader menjadi seorang sufi total dari segi ruhiyah,

bercorak disiplin militer dari segi praktek dan tidak merasa terpaksa dalam beramal

- Jenjang Ahli; Kader melanjutkan tujuan kaderisasi Anggota Dewasa, sekaligus menjadi cermin atau teladan bagi kader dalam pelaksanaan tugas-tugas dakwah.

2. Manajemen Organisasi

Dalam rangka membentuk organisasi yang baik, maka seseorang perlu memperhatikan prinsip-prinsip organisasi dan mempunyai manajemen organisasi yang baik. Para ahli memberikan beragam prinsip-prinsip organisasi yang dapat diringkas sebagai berikut;

9. Mempunyai tujuan yang jelas
10. Terdapat jenjang kepemimpinan dan system kepemimpinan yang layak
11. Mempunyai satu kesatuan perintah/komando
12. Terdapat pembagian wewenang yang jelas antar pemimpin
13. Terdapat system pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang jelas
14. Terdapat system pengendalian /rentang kendali
15. Terdapat garis koordinasi antara pimpinan dan anggota organisasi
16. Terdapat fleksibilitas cara pelaksanaan berbagai kegiatannya

Melihat poin-poin persyaratan agar bisa dikategorikan kedalam organisasi yang baik tersebut sebenarnya sudah dimiliki oleh PKS, misalnya; tujuan pendirian partai termanifestasi ke dalam visi dan misi yang jelas yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu. Kejelasan tentang jenjang kepemimpinan dan sistemnya terlihat pada struktur organisasi dan tugas-tugas pengurus organisasi

yang jelas. Memiliki satu kesatuan komando, misalnya; dalam system kepengurusan ada Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) yang menjabat sebagai lembaga tertinggi partai.

b. Strategi Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera

Prinsip emas atau *golden principle* yang harus diperjuangkan bersama oleh seluruh komponen menurut PKS adalah mewujudkan “Ekonomi Nasional yang Mandiri, Adil dan Sejahtera”.

Menegakkan prinsip syuro dalam partai, menurut mantan Presiden PKS, DR.H.M. Hidayat Nurwahid mempengaruhi proses penegakkan prinsip demokrasi dalam skala nasional. Musathil dapat meraih cita-cita bangsa yang adil, demokratis, dan sejahtera, apabila PKS tidak memulainya sendiri, PKS harus senantiasa mematangkan diri dalam proses belajar di bawah naungan pentadbiran Ilahi.

Dalam hal penjaringan suara konstituen itu, peran sebuah platform menjadi penting selain memiliki AD/ART dan Prinsip Kebijakan yang diperjuangkan. Kejelasan platform merupakan modal yang berharga bagi para kader dan simpatisan untuk memperkenalkan partai di tengah masyarakat yang beragam. Kejelasan Platform PKS dituntut untuk tidak hanya sebagai kajian, akan tetapi memanifestasikan platform tersebut kedalam kegiatan yang nyata.

Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa kehadiran PKS dalam lapangan ekonomi, social, budaya dan kegiatan keagamaan jauh melampaui tugas-tugas politik formal yang kita gencarkan. PKS telah menanam investasi moral (moral investmen) dan memupuk modal social (*social capital*) dalam waktu yang lama.

Secara sederhana, tema besar (*tag line*) perjuangan PKS ditetapkan oleh Lajnah Pemenangan Pemilu (LPP) dalam Munas II di Bali Tanggal 20 Februari 2008 sebagai “BERSIH, PEDULI dan PROFESIONAL”, walaupun memang bukan klaim sepihak, bahwa PKS adalah satu-satunya partai yang bersih dan peduli terhadap nasib rakyat. Namun maksudnya PKS menginginkan dan memperjuangkan seluruh komponen masyarakat akan lahirnya “Kepemimpinan Nasional yang Bersih dari Korupsi dan Peduli dengan Nasib Rakyat”.

Berikut ini adalah 21 Platform yang diagendakan oleh PKS;¹⁰⁶

- Pemantapan Ekonomi Makro
- Pemantapan Otonomi Daerah
- Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
- Perjuangan Petani
- Perjuangan Buruh
- Perjuangan Nelayan
- Usaha Kecil dan Menengah
- Politik Nasional
- Pertahanan Keamanan
- Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
- Politik Luar Negeri
- Pendidikan Nasional
- Kepeloporan Pemuda
- Perempuan Indonesia

¹⁰⁶ Hidayat Nurwahid, *Menyelamatkan Bangsa “Platform Kebijakan PK-Sejahtera”*, (Jakarta; DPP PKS & al-I’tishom Cahaya Ummat, 2004), h. 58-63

- Pembinaan Keluarga
- Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan
- Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Industri
- Seni Budaya dan Pariwisata
- Dakwah dan Pembinaan Ummat Beragama
- Komunikasi dan Informasi

Selain 21 Platform yang dibangun, PKS juga mempunyai agenda principal bersama, diantaranya;¹⁰⁷

8. Penegakan Hukum dan pemenuhan rasa keadilan yang tidak bisa ditawar-tawar
9. Pemerataan kesejahteraan seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan sebagai syarat minimal untuk pembangkitan ekonomi nasional
10. Perluasan pendidikan serta pembaharuan etika dan budaya merupakan pangkal pemulihan jati diri dan kepribadian bangsa
11. Perekatan kembali (*Comentation*) jiwa keumatan dan kebangsaan, melalui peran kepemimpinan yang berkarakter pemersatu, pelayan dan teladan bagi seluruh rakyat
12. Penegakan kedaulatan bangsa, dimulai dengan memelihara batas-batas wilayah negara kesatuan, secara fisik, laut dan udara
13. Perlindungan harkat kemanusiaan

¹⁰⁷ Hidayat Nurwahid, *Menyelamatkan Bangsa "Platform Kebijakan PK-Sejahtera"*, h. 46-48

14. Berperan serta dalam mewujudkan wajah peradaban dunia

Selain itu PKS menentukan terobosan-terobosan yang diharapkan membawa perubahan fundamentalis dengan mengambil inisiatif kecil yang berdaya ungkit besar untuk menyelesaikan masalah kebangsaan, antara lain;¹⁰⁸

17. Membangun organisasi yang solid dan berdisiplin tinggi sebagai role model kekuatan reformis

18. Mencetak kader-kader pemimpin yang amanah, kapabel dan kompeten, serta konsisten dalam menjalankan tugas public

19. Melakukan pendidikan politik kerakyatan yang otentik dan membebaskan, bukan dengan politik uang dan intimidasi

20. Membangun hubungan lintas kelompok dan lintas kepentingan dengan memprioritaskan kepentingan ummat dan bangsa yang lebih luas

21. Membina moral generasi muda terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa dalam menemukan jatidiri mereka di tengah terpaan modernisasi dan globalisasi budaya

22. Menumbuhkan budaya dan gaya hidup yang sejalan dengan tuntunan syari'at serta kesantunan masyarakat

23. Merintis solidaritas nasional dan internasional dalam merespon masalah yang berkembang

24. Mengembangkan Pos Wanita Keluarga Sejahtera seagai pusat pelayanan keluarga untuk kesehatan ibu dan anak

¹⁰⁸ Hidayat Nurwahid, *Menyelamatkan Bangsa "Platform Kebijakan PK-Sejahtera"*, 49-56

25. Mendorong terselenggaranya pendidikan berongkos murah dengan kualitas tetap terjaga, seperti pendirian Sekolah Terbuka atau Sekolah Rakyat yang menampung anggota masyarakat yang tidak mampu
26. Memelopori usaha swadaya berskala mikro dengan bantuan permodalan melalui Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), yang kemudain berkembang menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
27. Mendukung Sepenuhnya pengelolaan pers yang jujur, dan bertanggungjawab sebagai mediator komunikasi public
28. Membangun gerakan rakyat (*civil society*) yang mandiri dan berdaya dalam lingkup wilayah dan bidang tugas masing-masing
29. Menyemai bibit kepakaran dalam berbagai bidang ilmu dan aspek pembangunan dengan mendukung lembaga pemikiran (*think tank*) atau lembaga riset swasta dan pemerintah
30. Memompa jiwa sportifitas dalam beragam untuk kegiatan olahraga dan kepanduan yang dapat memperkuat semangat bela negara
31. Membentuk posko kemanusiaan di sejumlah daerah konflik dengan mengerahkan tenaga medis dan paramedic serta sukarelawan
32. Menumbuhkan kesadaran atas kelestarian sumber daya dalam bentuk kegiatan pecinta alam dan aksi peduli lingkungan

c. PKS dan Islam Politik di Indonesia

Hubungan antara negara dan ummat Islam di masa lalu banyak diwarnai dengan pengalaman gerakan-gerakan yang bahkan mengarah pada perlawanan

dan pemberontakan.¹⁰⁹ Perlawanan tersebut disadari bersumber dari ide-ide dan dasar teoritis penciptaan masa depan kehidupan Indonesia. Ide dan konsep “Negara Islam” misalnya, adalah sebetulnya perbedaan yang mengarah kepada perlawanan yang sangat antara umat Islam dan negara di awal-awal kemerdekaan.

Pemberlakuan UU yang mengatur hal-hal yang paling mendasar, seperti ideology sebuah ormas keagamaan atau asas sebuah partai politik – apalagi berbasis agama- menjadi penting agar mampu meredam semangat perlawanan yang nilai-nilainya memang tumbuh subur dalam ajaran-ajaran normatif agama. Atau setidaknya, dengan pengaturan pada level struktur kehidupan modern yang bernama negara, kehendak dan pandangan sebagian umat dapat dibelokkan sesuai dengan kepentingan dan kehendak penguasa.

Konsepsi pembelokan atau pengarahannya itu bersumber dari penempatan agama sebagai variable individual dan dianggap tidak berhubungan dengan berbagai permasalahan politik kenegaraan. Disinilah letak gagasan modernisasi yang dipandang membawa serta didalamnya sekularisasi, yaitu berusaha menempatkan agama hanya sebagai modal dasar pembangunan dan arah perubahan social. Agama bersama kebudayaan dalam kedudukan fungsionalnya dipandang tidak memiliki hubungan structural dengan variable ekonomi, politik dan kenegaraan. Cara pandang semacam inilah yang menjadi landasan dikeluarkannya kebijakan UU No.05 th 1985 yang dimaksudkan untuk menghapus ciri asas partai politik yang berasas Islam.

¹⁰⁹ Lihat Kajian Tentang *pertentangan pemberontakan Islam*, misalnya; dalam Karl Jackson, *Kewibawaan Tradisional Islam dan Pemberontakan*; Kasus Darul Islam Jawa Barat, (Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1990)

Dengan diberlakukannya UU tersebut pemerintah Orde Baru menunjukkan dengan berbagai cara ketidaksukaannya terhadap aksi-aksi mahasiswa dan umat Islam. Sehingga persetujuan antara pemerintah dan mahasiswa pun tidak dapat dihindarkan. Puncaknya adalah ketika 1977 dan 1978, mahasiswa kembali bergerak dan membuat suhu politik memanas sehingga menyebabkan dikeluarkannya keputusan pembubaran *Student Government*. Namun, selang waktu yang tidak begitu lama, pemerintah mengeluarkan kebijakan NKK/BKK yang memberikan control sepenuhnya gerakan mahasiswa kepada pihak birokrat kampus.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa keterpurukan kondisi masyarakat Islam atas rezim Orde Baru-lah yang kemudian menimbulkan ruang bagi mahasiswa untuk mencari strategi dan solusi yang kemudian menghantarkan mereka kedalam gerakan keagamaan yang berbasis kampus yang dikenal dengan nama gerakan dakwah kampus, sehingga kemudian dari para aktivis dakwah kampus inilah terlahir sebuah partai yang fenomenal yaitu Partai Keadilan dan kemudian mentransformasikan diri menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

PKS merupakan partai Islam yang mempunyai tujuh karakteristik;

8. *Moralis*; PKS berupaya menjadikan komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku individu dan politiknya atau berusaha menampilkan sisi moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam
9. *Profesional*; hal ini dimaksudkan kedalam pembentukan pribadi dengan memperhatikan aspek intelektualitas, sikap kritis dan sensitivitas yang lebih dalam aktivitas partai

10. *Patriotik*; kehidupan berpartai adalah perjuangan. Diatas landasan inilah semangat dikobarkan dalam upaya meraih cita-cita masa depan

11. *Moderat*; karakter ini sesungguhnya merupakan karakter Islam itu sendiri. Menurut DR. Yusuf Qordhowi, moderat (*al-Wasthiyah*) berarti keseimbangan (*at-tawazun*). Karakteristik moderat yang ditampilkan oleh PKS inilah yang menjadikan PKS berbeda dengan partai lain. Sikap kemoderatan PKS ditunjukkan pada saat masih bernama PK, yaitu saat menentukan untuk berkoalisi dengan PAN, dan juga saat memperjuangkan “Piagam Jakarta”, sedangkan partai Islam lain seperti; PPP, PBB, Masyumi memperjuangkan ide Amandemen UUD 1945

12. *Demokrat*; adalah menerima nilai-nilai universal demokrasi sebagai bentuk pengakuan kepada manusia dalam tanggungjawabnya sebagai khalifatullah

13. *Reformis*; PKS akan menempatkan posisinya sebagai reformis serta berusaha konsisten menjauhi segala bentuk karakter dan sifat-sifat yang menimbulkan kerusakan

14. *Independen*; PKS menyatakan sebagai partai dakwah akan tetap berada pada posisi kemerdekaan (*independensi*) dalam artian yang sebenarnya.¹¹⁰

Karakteristik-karakteristik yang dimiliki PKS merupakan gambaran dari ketidaksamaan PKS dengan Islam politik lain yang ada di Indonesia.

¹¹⁰Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* hal 29-30

Lengsernya Soeharto memungkinkan iklim kebebasan mulai terkuak, akan tetapi bukan berarti perjuangan untuk merealisasikan cita-cita dakwah sudah selesai. Perjalanan masih panjang karena dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam masih jauh dari tuntunan ajaran Islam. Struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat belum kondusif bagi upaya penumbuhan kepribadian Islam yang dicita-citakan. Sedangkan dalam bidang kesejahteraan umat Islam dapat dikatakan sebagai penghuni terbesar dari mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Perjuangan gerakan dakwah harus dilanjutkan. Musyawarah yang dilakukan oleh para aktifis dakwah Islam akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa iklim yang berkembang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya peraihian cita-cita, mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang diridhoi Allah SWT. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam merupakan bentuk transformasi terakhir yang dijalani oleh gerakan dakwah kampus, guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak orang, maka akhirnya merekapun sepakat untuk mengokohkan sebuah partai yang diberi nama Partai Keadilan.¹¹¹

Partai Keadilan didirikan dengan sebuah keputusan yang diambil berdasarkan survey yang dilakukan kepada para aktivis gerakan dakwah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Inti pertanyaan yang diajukan dalam jajak pendapat tersebut adalah bentuk apa yang ditampilkan untuk muncul ke tengah public pada era reformasi, apakah bentuk organisasi massa atau organisasi politik, atau tetap

¹¹¹ Sekretariat DPP Partai Keadilan, Sekilas Partai Keadilan, (Jakarta:DPP Partai Keadilan, Desember 1998) Cet-1, h.18

mempertahankan penampilan yang selama ini digunakan yaitu dalam bentuk yayasan atau lembaga-lembaga dakwah.¹¹²

Bentuk transformasi GDK (Gerakan Dakwah Kampus) menjadi Partai Keadilan (PK) barangkali bentuk transformasi paling fenomenal yang dilakukan oleh gerakan dakwah ini. Dikatakan fenomenal karena beberapa alasan, diantaranya;

- Pilihan mendirikan partai politik merupakan bentuk pemunculan publik yang paling utuh dari gerakan dakwah yang selama ini bergerak dengan banyak nama dan banyak kantong-kantongnya itu.
- Pilihan untuk mendirikan partai politik itu adalah sebuah keputusan yang tidak pernah diduga sebelumnya bahkan oleh para kadernya sendiri dan memicu kontroversi
- Pilihan tersebut membawa konsekuensi pada masuknya gerakan dakwah ke dalam politik praktis dengan logika dan sistemnya sendiri yang di masa lalu merupakan sesuatu yang sempat mereka jauhi. Artinya selama ini trade mark mereka adalah aktivitas dakwah sedangkan berpolitik selama ini hampir-hampir mereka tidak pernah sentuh¹¹³

Menurut Nur Mahmudi Isma'il (Presiden PK pertama), menyebut akar histories dari ideologis Partai Keadilan sangatlah panjang.¹¹⁴ Karena itu sangat sulit untuk mengelompokkan mereka ke dalam genre politik tertentu, karena dalam

¹¹² Ali Said Damanik, hal 228

¹¹³ Ali Said Damanik, hal 215-216

¹¹⁴ Republika 10 Agustus 1998, h.3. Sementara dalam Majalah Tempo, edisi 18 Januari 1999, h.58, Nur Mahmudi menyebutkan akar histories itu hampir selama 20 tahun

sejarahnya pada level yang nyaris tidak bersentuhan dengan kekuatan politik manapun.¹¹⁵

Kemunculan awal gerakan dakwah kampus yang menjadi cikal bakal Partai Keadilan ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran kalangan modernis Islam yang masa lalu direpresentasikan dengan baik oleh Masyumi-tidak secara otomatis membuat jamaah gerakan dakwah ini juga mewakilkan aspirasi politiknya kepada penerus-penerus Masyumi tersebut.¹¹⁶ Sebelumnya memang ada dugaan bahwa kelompok aktivis dakwah yang mendirikan Partai Keadilan ini mempunyai kedekatan emosional dan politik dengan kelompok Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), organisasi dakwah yang didirikan para mantan aktivis Masyumi dan juga tempat dimana sejumlah tokoh gerakan dakwah ini sebelumnya berbasis. Akan tetapi pasca reformasi jelaslah sudah perbedaan diantara keduanya. DDII membidani lahirnya Partai Bulan Bintang (PBB), sedangkan anak-anak muda aktivis Tarbiyah ini mendirikan Partai Keadilan. Para aktivis gerakan dakwah ini memakai proses reformasi yang terjadi sebagai Harakatul Ishlah (gerakan perbaikan) yang merupakan buah dari komitmen dakwah yang selama ini mereka kembangkan.¹¹⁷

Partai Keadilan didirikan pada tanggal 20 Juli 1998, dan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di lapangan Masjid al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta

¹¹⁵ Menurut Fahri Hamzah, salah seorang deklarator PK, para pengurus PK merupakan personel baru yang selama ini tidak pernah tampil baik di masa Orde Baru maupun Orde Lama “Para pengurus PK murni orang-orang baru, yaitu dari kelompok muda yang akar historisnya memang bisa dicarikan, mereka itu sebelumnya tidak ada yang ikut Golkar, PPP, maupun PDI, apalagi PKI” (Republika, 10 Agustus 1998) h.3

¹¹⁶ Dalam konteks Orde Baru, penerus Masyumi itu adalah sebuah partai bernama Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang kemudian berubah menjadi Muslimin Indonesia (MI), pada tahun 1973, MI “dikpsa” berfusi dengan beberapa partai Islam lain menjadi partai politik baru yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Republika, 08 Mei 2000)h.8

¹¹⁷ Ali Said Damanik, hal 220-221

Selatan dengan jumlah massa yang hadir pada saat itu lebih dari 50.000 orang.¹¹⁸

Kehadiran Partai Keadilan dalam pentas perpolitikan Indonesia pasca jatuhnya Soeharto menjadi sebuah fenomena yang menakjubkan banyak pihak. Betapa tidak, dari seluruh partai besar yang ada pada era reformasi, hanya PK-lah yang konstituennya tidak berasal dari kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas politik yang pernah eksis sebelumnya, juga sulit memastikan mereka dari bagian-bagian mainstream Islam seperti NU dan Muhammadiyah.¹¹⁹

Dari segi kelahirannya PK sangat dipengaruhi oleh gerakan Islam di Mesir yaitu Ikhwanul Muslimin. Tesis ini diakui oleh pemikir ternama Ikhwanul Muslimin DR. Yusuf al-Qardhowi, namun hal ini dibantah oleh Sekjend PK H. Anis Matta, Lc, ia menegaskan, “Konteks pernyataan DR Yusuf al-Qordhowi diatas menjelaskan, bahwa pengaruh Ikhwanul Muslimin ada di seluruh dunia dan salah satu yang dekat dengan pemikiran IM di Indonesia adalah PK”¹²⁰. Namun demikian Presiden PK yang kedua DR Hidayat Nurwahid mengatakan “Substansi itu lebih penting daripada nama, nama besarpun tak ada nilainya kalau tidak dijabarkan dalam kehidupan”¹²¹, tetapi lain lagi pendapat yang dikemukakan oleh Cendekiawan Muslim, Nurcholis Madjid, ia berpendapat bahwa Partai Keadilan tidak mengambil contoh atau inspirasi dari mana-mana, ia mempunyai style tersendiri bagi seorang yang terpelajar.¹²²

¹¹⁸ Republika 10 Agustus 1998, h.3

¹¹⁹ Panjimas edisi 20 Februari-05 Maret 2003 h.39

¹²⁰ Panjimas edisi 20 Februari-05 Maret 2003, h.11 (Wawancara dengan H.Anis Matta)

¹²¹ Nandang Burhanuddin, Penegakan Syariat Islam menurut PK (Jakarta; Al-Jannah Pustaka, Februari 2004), h.24

¹²² Dikutip dari www.pk-sejahtera.or, rubric liputan media tanggal 1 Mei 1999

Bulan Agustus 1999, pesta demokrasipun digelar dan PK merupakan salah satu peserta Pemilu saat itu, pada tanggal 2 Agustus 1999 PK menandatangani hasil penghitungan suara Pemilu. Prestasi perolehan suara pada saat itu cukup membuat banyak kalangan berdecak kagum, PK masuk dalam urutan tujuh besar partai pemenang Pemilu, PK meraih 1.436.565 suara atau 1,36 % dari total suara dan menempatkan tujuh wakilnya di DPR RI (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Provinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). Bahkan untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perolehan suara PK melebihi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang memiliki hubungan histories dengan NU dan Masyumi.¹²³

Pada pesta demokrasi tahun 2004, pemerintah membuat peraturan baru untuk peserta Pemilu, yaitu partai-partai yang ingin menjadi peserta Pemilu 2004 baik partai baru maupun partai lama harus memenuhi 2% atau lebih perolehan suara dari pendukungnya. Maka pada tanggal 17 April 2003, PK mengadakan Musyawarah Majelis Syuro XIII (Musyawarah Nasional Istimewa) di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi dan menghasilkan keputusan untuk merekomendasikan PK untuk bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2002 M atau bertepatan dengan 7 Shafar 1423 H, selanjutnya dideklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Silang Monas Jakarta yang dihadiri 40.000 massa.¹²⁴

Sesuai hasil Musyawarah Nasional Istimewa Partai Keadilan pada tanggal 17 April 2003 di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi yang merekomendasikan penggabungan Partai Keadilan (PK) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

¹²³ Nandang Burhanuddin, Penegakan Syariat Islam menurut PK, h. 25

¹²⁴ Dikutip dari www.pk-sejahtera.org

karena memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita, maka mereka menandatangani kesepakatan di hadapan notaries pada tanggal 3 Juli 2003 untuk menggabungkan diri dalam sebuah partai yang disepakati bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan professional. Karena itu, PKS sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.

Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai, dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini, sebagai partai yang menduduki peringkat 6 dalam Pemilu 2004 lalu.

Dalam menjalankan roda organisasi dan aktivitasnya, PKS dibingkai oleh Piagam Deklarasi, Visi dan Misi, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), kebijakan dasar partai dan peraturan-peraturan lainnya yang mengikat seluruh anggota partai. Roda organisasi dikendalikan oleh sebuah Dewan Pimpinan Pusat (Central Board) yang berpusat di Jakarta yang dikelola secara full time, selain itu ada Dewan Pimpinan Wilayah (Regional Board) dan Dewan Pimpinan Daerah (District Board) yang mengelola wilayah setingkat provinsi dan kota/kabupaten.

Saat ini, PKS memiliki pengurus di 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW=setingkat provinsi), 312 Dewan Pimpinan Daerah (DPD=setingkat kota/kabupaten) dan 2155 Dewan Pimpinan Cabang (DPC=setingkat kecamatan)

di seluruh Indonesia. Selain itu, PKS juga memiliki 13 perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Pusat Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PIPKS).

PKS adalah partai politik modern yang terorganisir secara baik dan rapi. Hal ini tercapai berkat manajemen yang baik dan kontribusi dari kader-kadernya yang saat ini tercatat lebih dari 400.000 kader yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri.¹²⁵

C. Sistem Pengkaderan dan Agenda-agenda Partai Keadilan Sejahtera

a. PKS Sebagai Partai Kader

1. Sistem Pembinaan

Metamorfosa gerakan Islam memasuki tahapan baru ketika lahirnya Partai Keadilan mengalami transformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan pelanjut perjuangan. Pola rekrutmen dan pembinaan yang diterapkan adalah melalui halaqoh-halaqoh tarbiyah yang sekarang tidak hanya ada di masjid-masjid kampus.

Pola hubungan dalam proses pendidikan antar aktifis dakwah diatur dalam sebuah strata yang ketat, dimana intensitas keterlibatan seorang aktifis diatur dalam sebuah tata kerja yang rapih.

Proses pembinaan yang ada di PKS dilaksanakan dengan pola-pola pembinaan dalam system tarbiyah seperti liqo', dauroh, rihlah, mabit, dll. Program-program pembinaan yang ada bukan hanya diperuntukkan bagi anggota yang baru masuk (pendatang), melainkan diperuntukkan bagi semua tingkat. Hal

¹²⁵ Dikutip dari www.pk-sejahtera.or.id/organisasi.php.op=struktur

itu ditunjukkan dari program pertemuan dan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan satu pecan sekali di kepengurusan DPP PKS.

Pertemuan dan pembinaan agama tersebut bersifat komprehensif (menyeluruh), terkadang pembinaan tersebut dilakukan pada bagian masing-masing departemen yang ada secara terpisah atau secara penggabungan dari seluruh departemen yang ada, dari tingkat DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sampai DPRa (Dewan Pimpinan Ranting).

Adapun tingkat pengkaderan yang ada di Partai Keadilan Sejahtera adalah;

- Jenjang Pemula; Kader memiliki
- Jenjang Madya; Kader memiliki sifat-sifat merasakan urgensi berkorban dengan waktu dan harta, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam lingkup amal jama'I dan melakukan pembelaan terhadap dakwah
- Jenjang Dewasa; Kader melaksanakan semua tugas dan beban yang diminta, disertai upaya-upaya pengenalan berbagai kondisi dakwah (partai) dan sejarahnya. Kader menjadi seorang sufi total dari segi ruhiyah, bercorak disiplin militer dari segi praktek dan tidak merasa terpaksa dalam beramal
- Jenjang Ahli; Kader melanjutkan tujuan kaderisasi Anggota Dewasa, sekaligus menjadi cermin atau teladan bagi kader dalam pelaksanaan tugas-tugas dakwah.

2. Manajemen Organisasi

Dalam rangka membentuk organisasi yang baik, maka seseorang perlu memperhatikan prinsip-prinsip organisasi dan mempunyai manajemen organisasi yang baik. Para ahli memberikan beragam prinsip-prinsip organisasi yang dapat diringkas sebagai berikut;

17. Mempunyai tujuan yang jelas
18. Terdapat jenjang kepemimpinan dan system kepemimpinan yang layak
19. Mempunyai satu kesatuan perintah/komando
20. Terdapat pembagian wewenang yang jelas antar pemimpin
21. Terdapat system pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang jelas
22. Terdapat system pengendalian /rentang kendali
23. Terdapat garis koordinasi antara pimpinan dan anggota organisasi
24. Terdapat fleksibilitas cara pelaksanaan berbagai kegiatannya

Melihat poin-poin persyaratan agar bisa dikategorikan kedalam organisasi yang baik tersebut sebenarnya sudah dimiliki oleh PKS, misalnya; tujuan pendirian partai termanifestasi ke dalam visi dan misi yang jelas yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu. Kejelasan tentang jenjang kepemimpinan dan sistemnya terlihat pada struktur organisasi dan tugas-tugas pengurus organisasi yang jelas. Memiliki satu kesatuan komando, misalnya; dalam system kepengurusan ada Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) yang menjabat sebagai lembaga tertinggi partai.

B. Strategi Pemenangan PEMILU PK-Sejahtera

Prinsip emas atau *golden principle* yang harus diperjuangkan bersama oleh seluruh komponen menurut PKS adalah mewujudkan “Ekonomi Nasional yang Mandiri, Adil dan Sejahtera”.

Menegakkan prinsip syuro dalam partai, menurut mantan Presiden PKS, DR.H.M. Hidayat Nurwahid mempengaruhi proses penegakkan prinsip demokrasi dalam skala nasional. Musathil dapat meraih cita-cita bangsa yang adil, demokratis, dan sejahtera, apabila PKS tidak memulainya sendiri, PKS harus senantiasa mematangkan diri dalam proses belajar di bawah naungan pentadbiran Ilahi.

Dalam hal penjangiran suara konstituen itu, peran sebuah platform menjadi penting selain memiliki AD/ART dan Prinsip Kebijakan yang diperjuangkan. Kejelasan platform merupakan modal yang berharga bagi para kader dan simpatisan untuk memperkenalkan partai di tengah masyarakat yang beragam. Kejelasan Platform PKS dituntut untuk tidak hanya sebagai kajian, akan tetapi memmanifestasikan platform tersebut kedalam kegiatan yang nyata.

Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa kehadiran PKS dalam lapangan ekonomi, social, budaya dan kegiatan keagamaan jauh melampaui tugas-tugas politik formal yang kita gencarkan. PKS telah menanam investasi moral (moral investmen) dan memupuk modal social (social capital) dalam waktu yang lama.

Secara sederhana, tema besar (tag line) perjuangan PKS ditetapkan oleh Lajnah Pemenangan Pemilu (LPP) dalam Munas II di Bali Tanggal 20 Februari 2008 sebagai “BERSIH, PEDULI dan PROFESIONAL”, walaupun memang bukan klaim sepihak, bahwa PKS adalah satu-satunya partai yang bersih dan

peduli terhadap nasib rakyat. Namun maksudnya PKS menginginkan dan memperjuangkan seluruh komponen masyarakat akan lahirnya “Kepemimpinan Nasional yang Bersih dari Korupsi dan Peduli dengan Nasib Rakyat”.

Berikut ini adalah 21 Platform yang diagendakan oleh PKS;¹²⁶

- Pemantapan Ekonomi Makro
- Pemantapan Otonomi Daerah
- Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
- Perjuangan Petani
- Perjuangan Buruh
- Perjuangan Nelayan
- Usaha Kecil dan Menengah
- Politik Nasional
- Pertahanan Keamanan
- Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
- Politik Luar Negeri
- Pendidikan Nasional
- Kepeloporan Pemuda
- Perempuan Indonesia
- Pembinaan Keluarga
- Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan
- Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Industri

¹²⁶ Hidayat Nurwahid, *Menyelamatkan Bangsa “Platform Kebijakan PK-Sejahtera”*, (Jakarta; DPP PKS & al-I’tishom Cahaya Ummat, 2004), h. 58-63

- Seni Budaya dan Pariwisata
- Dakwah dan Pembinaan Ummat Beragama
- Komunikasi dan Informasi

Selain 21 Platform yang dibangun, PKS juga mempunyai agenda principal bersama, diantaranya; ¹²⁷

15. Penegakan Hukum dan pemenuhan rasa keadilan yang tidak bisa ditawar-tawar
16. Pemerataan kesejahteraan seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan sebagai syarat minimal untuk pembangkitan ekonomi nasional
17. Perluasan pendidikan serta pembaharuan etika dan budaya merupakan pangkal pemulihan jati diri dan kepribadian bangsa
18. Perekatan kembali (Comentation) jiwa keumatan dan kebangsaan, melalui peran kepemimpinan yang berkarakter pemersatu, pelayan dan teladan bagi seluruh rakyat
19. Penegakan kedaulatan bangsa, dimulai dengan memelihara batas-batas wilayah negara kesatuan, secara fisik, laut dan udara
20. Perlindungan harkat kemanusiaan
21. Berperan serta dalam mewujudkan wajah peradaban dunia

Selain itu PKS menentukan terobosan-terobosan yang diharapkan membawa perubahan fundamentalis dengan mengambil inisiatif kecil yang berdaya ungkit besar untuk menyelesaikan masalah kebangsaan, antara lain; ¹²⁸

¹²⁷ Hidayat Nurwahid, *Menyelamatkan Bangsa "Platform Kebijakan PK-Sejahtera"*, h. 46-48

33. Membangun organisasi yang solid dan berdisiplin tinggi sebagai role model kekuatan reformis
34. Mencetak kader-kader pemimpin yang amanah, kapabel dan kompeten, serta konsisten dalam menjalankan tugas public
35. Melakukan pendidikan politik kerakyatan yang otentik dan membebaskan, bukan dengan politik uang dan intimidasi
36. Membangun hubungan lintas kelompok dan lintas kepentingan dengan memprioritaskan kepentingan ummat dan bangsa yang lebih luas
37. Membina moral generasi muda terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa dalam menemukan jatidiri mereka di tengah terpaan modernisasi dan globalisasi budaya
38. Menumbuhkan budaya dan gaya hidup yang sejalan dengan tuntunan syari'at serta kesantunan masyarakat
39. Merintis solidaritas nasional dan internasional dalam merespon masalah yang berkembang
40. Mengembangkan Pos Wanita Keluarga Sejahtera seagai pusat pelayanan keluarga untuk kesehatan ibu dan anak
41. Mendorong terselenggaranya pendidikan berongkos murah dengan kualitas tetap terjaga, seperti pendirian Sekolah Terbuka atau Sekolah Rakyat yang menampung anggota masyarakat yang tidak mampu

42. Memelopori usaha swadaya berskala mikro dengan bantuan permodalan melalui Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), yang kemudain berkembang menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
43. Mendukung Sepenuhnya pengelolaan pers yang jujur, dan bertanggungjawab sebagai mediator komunikasi public
44. Membangun gerakan rakyat (civil society) yang mandiri dan berdaya dalam lingkup wilayah dan bidang tugas masing-masing
45. Menyemai bibit kepakaran dalam berbagai bidang ilmu dan aspek pembangunan dengan mendukung lembaga pemikiran (think tank) atau lembaga riset swasta dan pemerintah
46. Memompa jiwa sportifitas dalam beragam untuk kegiatan olahraga dan kepanduan yang dapat memperkuat semangat bela negara
47. Membentuk posko kemanusiaan di sejumlah daerah konflik dengan mengerahkan tenaga medis dan paramedic serta sukarelawan
48. Menumbuhkan kesadaran atas kelestarian sumber daya dalam bentuk kegiatan pecinta alam dan aksi peduli lingkungan

C. PKS dan Islam Politik di Indonesia

Hubungan antara negara dan ummat Islam di masa lalu banyak diwarnai dengan pengalaman gerakan-gerakan yang bahkan mengarah pada perlawanan dan pemberontakan.¹²⁹ Perlawanan tersebut disadari bersumber dari ide-ide dan dasar teoritis penciptaan masa depan kehidupan Indonesia. Ide dan konsep “Negara Islam” misalnya, adalah sebetulnya perbedaan yang mengarah kepada

¹²⁹ Lihat Kajian Tentang *pertentangan pemberontakan Islam*, misalnya; dalam Karl Jackson, *Kewibawaan Tradisional Islam dan Pemberontakan*; Kasus Darul Islam Jawa Barat, (Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1990)

perlawanan yang sangat antara umat Islam dan negara di awal-awal kemerdekaan.

Pemberlakuan UU yang mengatur hal-hal yang paling mendasar, seperti ideology sebuah ormas keagamaan atau asas sebuah partai politik – apalagi berbasis agama- menjadi penting agar mampu meredam semangat perlawanan yang nilai-nilainya memang tumbuh subur dalam ajaran-ajaran normatif agama. Atau setidaknya, dengan pengaturan pada level struktur kehidupan modern yang bernama negara, kehendak dan pandangan sebagian umat dapat dibelokkan sesuai dengan kepentingan dan kehendak penguasa.

Konsepsi pembelokan atau pengarahannya itu bersumber dari penempatan agama sebagai variable individual dan dianggap tidak berhubungan dengan berbagai permasalahan politik kenegaraan. Disinilah letak gagasan modernisasi yang dipandang membawa serta didalamnya sekularisasi, yaitu berusaha menempatkan agama hanya sebagai modal dasar pembangunan dan arah perubahan social. Agama bersama kebudayaan dalam kedudukan fungsionalnya dipandang tidak memiliki hubungan structural dengan variable ekonomi, politik dan kenegaraan. Cara pandang semacam inilah yang menjadi landasan dikeluarkannya kebijakan UU No.05 th 1985 yang dimaksudkan untuk menghapus ciri asas partai politik yang berasas Islam.

Dengan diberlakukannya UU tersebut pemerintah Orde Baru menunjukkan dengan berbagai cara ketidaksukaannya terhadap aksi-aksi mahasiswa dan umat Islam. Sehingga persetujuan antara pemerintah dan mahasiswa pun tidak dapat dihindarkan. Puncaknya adalah ketika 1977 dan 1978, mahasiswa kembali

bergerak dan membuat suhu politik memanas sehingga menyebabkan dikeluarkannya keputusan pembubaran Student Government. Namun, selang waktu yang tidak begitu lama, pemerintah mengeluarkan kebijakan NKK/BKK yang memberikan control sepenuhnya gerakan mahasiswa kepada pihak birokrat kampus.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa keterpurukan kondisi masyarakat Islam atas rezim Orde Baru-lah yang kemudian menimbulkan ruang bagi mahasiswa untuk mencari strategi dan solusi yang kemudian menghantarkan mereka kedalam gerakan keagamaan yang berbasis kampus yang dikenal dengan nama gerakan dakwah kampus, sehingga kemudian dari para aktivis dakwah kampus inilah terlahir sebuah partai yang fenomenal yaitu Partai Keadilan dan kemudian mentransformasikan diri menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

PKS merupakan partai Islam yang mempunyai tujuh karakteristik;

15. *Moralis*; PKS berupaya menjadikan komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku individu dan politiknya atau berusaha menampilkan sisi moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam
16. *Profesional*; hal ini dimaksudkan kedalam pembentukan pribadi dengan memperhatikan aspek intelektualitas, sikap kritis dan sensitivitas yang lebih dalam aktivitas partai
17. *Patriotik*; kehidupan berpartai adalah perjuangan. Diatas landasan inilah semangat dikobarkan dalam upaya meraih cita-cita masa depan
18. *Moderat*; karakter ini sesungguhnya merupakan karakter Islam itu sendiri.
Menurut DR.Yusuf Qordhowi, moderat (al-Wasthiyah) berarti

keseimbangan (at-tawazun). Karakteristik moderat yang ditampilkan oleh PKS inilah yang menjadikan PKS berbeda dengan partai lain. Sikap kemoderatan PKS ditunjukkan pada saat masih bernama PK, yaitu saat menentukan untuk berkoalisi dengan PAN, dan juga saat memperjuangkan “Piagam Jakarta”, sedangkan partai Islam lain seperti; PPP, PBB, Masyumi memperjuangkan ide Amandemen UUD 1945

19. *Demokrat*; adalah menerima nilai-nilai universal demokrasi sebagai bentuk pengakuan kepada manusia dalam tanggungjawabnya sebagai khalifatullah

20. *Reformis*; PKS akan menempatkan posisinya sebagai reformis serta berusaha konsisten menjauhi segala bentuk karakter dan sifat-sifat yang menimbulkan kerusakan

21. *Independen*; PKS menyatakan sebagai partai dakwah akan tetap berada pada posisi kemerdekaan (independensi) dalam artian yang sebenarnya.

Karakteristik-karakteristik yang dimiliki PKS merupakan gambaran dari ketidaksamaan PKS dengan Islam politik lain yang ada di Indonesia.

BAB IV

PENGARUH IDEOLOGI IKHWANUL MUSLIMIN TERHADAP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI INDONESIA

Islam adalah sistem yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah suatu tatanan hidup yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi dan negara. Adalah Partai Keadilan Sejahtera yang para pendiri dan pendukungnya meyakini keuniversalan ajaran Islam melingkupi seluruh kehidupan manusia dan kemanusiaan.¹³⁰

Keuniversalan ajaran Islam yang diyakini oleh para pendiri dan pendukung PKS menjadikan PKS sebagai salah satu partai Islam di Indonesia yang mempunyai ideologi yang khas (berbeda) dengan partai Islam lainnya yang ada di Indonesia. Keyakinan tersebut justeru menjadikan PKS sangat mirip dengan pergerakan Islam lainnya di dunia, terutama Ikhwanul Muslimin. Sampai seorang pemikir Ikhwan kontemporer Prof. DR. Yusuf al-Qordhowi mengidentikkan PKS sebagai kepanjangan tangan dari Ikhwanul Muslimin. H. Anis Matta, Lc (saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jendral Partai Keadilan) tidak menampik pengaruh Ikhwanul Muslimin, tapi ia menegaskan, bahwa pengaruhnya hanya sebatas pemikiran dan wacana saja.¹³¹

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan salah seorang deklarator PKS, Ir. H. Untung Wahono, M.Si, Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukan) DPP PKS, beliau mengatakan bahwa PKS memang mempunyai banyak persamaan pemikiran dengan Ikhwanul Muslimin walaupun tidak dalam

¹³⁰ DPP PK, *Jatidiri PK*, Pustaka Tarbiyatuna, 2002, h. 20

¹³¹ Nandang Burhanuddin, *Penegakkan Syari'at Islam Menurut PKS* (Jakarta; Al-Jannah Pustaka, 2004), h. 98

keterkaitan organisasi.¹³² Ungkapan tersebut diperkuat lagi oleh Bapak H. Sunmandjaya Rukmandis, SH (Anggota MPP PKS) yang mengatakan bahwa walaupun PKS bukan sepenuhnya wujud dari jamaah Ikhwanul Muslimin tetapi PKS akan berusaha menselaraskan diri agar PKS tidak keluar dari prinsip-prinsip dakwah Ikhwanul Muslimin.¹³³ Lepas dari kemiripan tersebut, satu hal yang pasti bahwa pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan dasar partai dalam bidang politik dan pengembangan agama.

A. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin dalam Bidang Politik

Untuk menambah kejelasan kita tentang kemiripan PKS dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, berikut akan dijelaskan tentang prinsip-prinsip kebijakan dasar partai, diantaranya;¹³⁴

1. Syumuliyah (Komprehensif)

Maksudnya adalah lengkap dan integral; yaitu kebijakan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, prespektif dan sinkronisasi. Peletakan prinsip Syumuliyah sebagai prinsip kebijakan dasar partai sangat sesuai dengan asas atau ideologi yang dimiliki PKS yang menjadikan Islam sebagai sistem yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan.

2. Al-Ishlah (Perbaikan)

¹³² Wawancara Pribadi dengan Ir. H. Untung Wahono, M.Si, Ketua Dept. Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS, 20 Februari 2008, bertempat di kompleks DPR/MPR, gedung Nusantara I lantai 13; Ruangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

¹³³ Wawancara Pribadi, Bapak H. Sunmandjaya Rukmandis, SH, Anggota MPP PKS, 15 April 2008, bertempat di Ciomas Kabupaten Bogor (Rumah Kediaman Narasumber)

¹³⁴ Ali Said Damanik, *Fenomena PK, Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Bandung; Teraju, September 2002) h, 281. Penjelasan tentang kebijakan ini juga ada di DPP PK, *Sikap Kami; Kumpulan Seruan, Pernyataan Politik, Bayanat dan Pidato Politik DPP PK*, Jakarta, 2001. Kebijakan juga di muat dalam AD/ART tahun 2005/2006, bab Prinsip Kebijakan

Dalam hal ini, kebijakan yang ditempuh berorientasi pada perbaikan individu, masyarakat, pemerintah dan negara. Kebijakan ini dibuktikan dari adanya karakteristik reformis yang dimiliki PKS yang konsisten menjauhi segala bentuk karakter dan sifat-sifat yang menimbulkan kerusakan.

3. **Al-Syari'ah** (Konstitusional)

Kebijakan ini selalu mempertimbangkan aspek fleksibilitas dan legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Kitab suci menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik.

4. **Al-Wasath** (Moderat)

Dalam hal ini kebijakan, program, sikap dan perilaku sejalan dengan masyarakat Muslim yang “pertengahan” (Ummatan Wasathan), jauh dari kesan ekstrimitas dan eksageritas.

5. **Al-Istiqamah** (Komitmen dan Konsisten)

Dalam hal ini, kebijakan, program dan langkah operasional harus istiqamah (taat asas) konsisten dan istimrar (kontinyu).

6. **Al-Numuw Wa Al-Tathawwur** (Tumbuh dan Berkembang)

Ini dimaksudkan agar kebijakan, program dan langkah operasional harus concern dengan pengembangan SDM, akselerasi dan ekspansi potensi.

7. **Al-Tadarruj Wa Al-Tawazun** (Bertahap, Seimbang dan Proporsional)

Dalam hal ini kiprah partai baik individu maupun kolektif lengkap dengan kebertahapan dan keseimbangan yang sesuai dengan sunnatullah.

8. **Al-Awlawiyat Wa Al-Mashlahah** (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan)

Maksudnya; bahwa kebijakan, program dan langkah operasional selalu memperhatikan aspek strategis dan taktis sehingga efektif dan efisien. Kepentingan umat selalu menjadi pertimbangan utama dan pertama.

9. **Al-Mustaqbaliyah** (Orientasi Masa Depan)

Adalah kebijakan dan program yang selalu dikaitkan dengan dimensi waktu (masa lalu, kini dan akan datang) sehingga melahirkan sifat optimis dan penuh perhitungan.

10. **Al-Alamiyah** (Bagian dari Dakwah Sedunia)

Kebijakan yang diambil dan program yang dicanangkan selaras dengan kebijakan dakwah yang bersifat 'alami dan tunduk pada sunnatudda'wah serta tidak mengabaikan persoalan khas wilayah negaranya.

Untuk menambah kejelasan dan kemiripan gerakan PKS dengan Ikhwanul Muslimin, maka penulis juga akan menjelaskan prinsip-prinsip pemikiran Ikhwanul Muslimin selain dari *Arkanul Bai'ah* dan *Ushulul 'Isyriin* yang telah dijelaskan dalam bab II. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pemikiran Ikhwanul Muslimin, diantaranya;¹³⁵

1. Rabbaniyah

Dikatakan Rabbaniyah karena landasan yang menjadi poros bagi sasaran dakwahnya adalah agar manusia mengenal Tuhannya. Landasan ini merupakan kunci pertama bagi pemecahan serangkaian problem kemanusiaan yang disebabkan oleh kejumudan dan materialisme yang menguasai seluruh dunia.

¹³⁵ Abdul Hamid al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam; Peta Pemikiran Hasan al-Banna*, terj (Solo; Era Intermedia, Agustus, 2001) cet ke 2, h 110-115.

Walaupun Rabbaniyah tidak termasuk dalam prinsip kebijakan PKS, akan tetapi dalam buku Penegakan Syari'at Islam menurut PK, karya H. Nandang Burhanuddin, Lc, M.Si dijelaskan bahwa Rabbaniyah merupakan karakteristik ajaran Islam yang merupakan dasar dari keyakinan mereka (PKS). Dalam buku tersebut dijelaskan Rabbaniyah artinya Islam adalah agama atau jalan hidup yang bersumber dari Tuhan, bukan kreasi dari manusia juga bukan kreasi dari Nabi yang membawanya.¹³⁶

2. Al-'Alamiyah (Universal)

Disebut 'alamiyah karena ditujukan kepada seluruh ummat manusia. Dalam konteks ini mereka tidak mengklaim lebih utama kecuali dengan taqwa. Mereka tidak meyakini prinsip rasialisme, tidak mendukung fanatisme, ras dan warna kulit. Sebaliknya mereka menyeru kepada persaudaraan yang adil diantara anak manusia.

3. Istimewa

Istimewa dikarenakan Ikhwan berinteraksi dengan kitab Allah, menjadikannya sebagai sumber inspirasi dan bimbingan sehingga mereka yakin bahwa Islam adalah makna integral dan universal.

4. Syumuliyah (Komprehensif)

Dalam hal ini komprehensif artinya memiliki fikrah yang melingkupi seluruh aspek perbaikan di tengah masyarakat dan merepresentasikan segala gagasan pembaharuan yang telah dirumuskan.

5. Ilmiah

¹³⁶ Nandang Burhanuddin, *Penegakkan Syari'at Islam Menurut PKS* h, 99

Pada kesempatan ini Hasan al-Banna menekankan pentingnya ilmu dalam proyek kebangkitan ummat. Al-Qur'an tidak membedakan ilmu dunia dan ilmu agama, bahkan berpesan akan keduanya menghimpun ilmu-ilmu dalam satu ayat, menganjurkannya serta menjadikan pengetahuan sebagai jalan untuk takut pada-Nya dan untuk mengenal-Nya.

6. Rasional

Dalam hal ini maksud dari rasional adalah mengendalikan dorongan hati dengan pandangan akal, dan menerangi pancaran akal dengan gelora hati serta menyertai imajinasi dengan kebenaran hakikat dan realitas.

7. Independen

Tentang karakter ini dijelaskan bahwa dakwah tidak mengenal persekutuan karena tabiatnya adalah kesatuan.

8. Amaliah

Tentang sifat amaliah dijelaskan bahwa aspek kerja harus diutamakan daripada propaganda, karena Allah SWT hanya akan menilai amal yang nyata yang akan dijadikan timbangan kebaikan.

9. Moderat

Menurut Hasan al-Banna prinsip ini memungkinkan mereka untuk mempersembahkan gagasan pemikiran dan proyek Islami mereka sebagai model budaya alternatif yang akan menjadi saksi atas ummat manusia seluruhnya. Dari sepuluh prinsip yang terlihat pada kebijakan-kebijakan dasar PKS yang termuat dalam AD/ART, bab prinsip kebijakan. Ada beberapa poin yang sama maksud

dan tujuannya dengan yang ada pada karakteristik Ikhwanul Muslimin, diantaranya adalah;

- a. Dalam kebijakan dasar PKS ada *Syumuliyah* (Komprehensif), di karakteristik Ikhwanul Muslimin pun ada poin Syumuliyah. Mengenai arti dari Syumuliyah sendiri dari kedua belah pihak telah dijelaskan sebelumnya bahwa antara Ikhwanul Muslimin dan Partai Keadilan Sejahtera sama-sama memandang bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, tidak dapat diparsialkan kemudian diambil bagian tertentu saja dari agama Islam. Hal ini menandakan bahwa PKS secara tidak langsung mendapatkan pengaruh Ikhwanul Muslimin yang notabene buku dan pemikiran para tokohnya menjadi inspirasi maupun rujukan bagi kader PKS.
- b. Dalam kebijakan dasar PKS ada *al-Wasath* (Moderat) sama dengan yang ada pada karakteristik Ikhwanul Muslimin. Mengenai arti dari *al-Wasath* sendiri telah dijelaskan sebelumnya yaitu bahwa sebuah organisasi Islam sudah selayaknyalah menjadi organisasi yang moderat, tidak terlalu ekstrem tetapi juga tidak terlampau lunak, akan tetapi ada di tengah kedua sifat tersebut. Hal ini menandakan sikap yang diambil oleh PKS sama persis dengan yang diterapkan Ikhwanul Muslimin
- c. Dalam kebijakan dasar PKS ada *al-Awlawiyat wal Maslahah* (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan), sedangkan dalam karakteristik Ikhwanul Muslimin ada *amaliah*. Walaupun berbeda

dari sudut istilah, tetapi substansinya ada kesamaan, yaitu bahwa amal harus diutamakan daripada propaganda. Sedangkan prioritas amal harus didahulukan kepada yang paling dibutuhkan bagi orang banyak. Hal ini berarti antara PKS dan Ikhwanul Muslimin ada persamaan persepsi dan paradigma.

- d. Dalam kebijakan dasar PKS ada *al-'Alamiyah* (Universal), sama dengan yang ada pada karakteristik Ikhwanul Muslimin. Mengenai maksud dari *al-'Alamiyah* sendiri telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu bahwa manusia berasal dari satu keturunan, oleh karena di belahan bumi manapun berada manusia khususnya umat Islam adalah bersaudara dengan ummat Islam lainnya tidak dapat dipisahkan walaupun berbeda negara. Hal ini menandakan sikap PKS dengan Ikhwanul Muslimin satu visi.

Dari kesamaan-kesamaan yang telah diuraikan diatas antara karakteristik Ikhwanul Muslimin dan kebijakan dasar PKS, kita dapat menarik kesimpulan bahwa PKS dan Ikhwanul Muslimin memiliki kesamaan visi, walaupun hal ini tidak bisa menjadi kesimpulan yang mengikat. Karena boleh jadi kesamaan tersebut hanya kebetulan saja dikarenakan IM dan PKS sama-sama organisasi Islam yang seluruh kebijakannya bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist yang menjadi pedoman ummat Islam secara umum.

B. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin dalam Bidang Dakwah

Pengaruh konsep ideologi Ikhwanul Muslimin dapat lebih mudah diidentifikasi dalam bidang keagamaan, hal tersebut dapat kita lihat dalam

tahapan-tahapan dakwah yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Tahapan-tahapan tersebut di antaranya;¹³⁷

1. *Tabligh* (Penyampaian)

Tabligh dalam dakwah bil-lisan yang biasanya berbentuk ceramah-ceramah atau taushiyah-taushiyah yang bersifat umum. Sasarannya adalah khalayak ramai dengan materi-materi ceramah yang bersifat kemasyarakatan, agar dapat membentuk pola pikir keislaman yang lebih baik dan benar pada masyarakat umum.

2. Ta'lim (Pengajian)

Pada tahap ini dakwah yang dilakukan lebih sistematis dan tematis, yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 10-15 orang yang dibina oleh seorang *Murabbi* (pendidik) yang sering dikenal dengan istilah *liqo'*, program dalam tahapan ini diperuntukkan untuk semua kader dari seluruh jenjang.

3. Takwin (Pembentukan)

Pada tahap ini dakwah yang dilakukan adalah dengan pembentukan dan pembinaan kader. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya team kaderisasi dan kegiatan yang dilaksanakan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan bermacam-macam, diantaranya; Dauroh, Mabit, Rihlah atau bentuk yang rutin seperti *Tastqif*. Tujuan dari dakwah tahap ini adalah terjadinya internalisasi Islam dalam kepribadian kader atau melaksanakan dakwah untuk pembebasan aqidah dari

¹³⁷ **Majalah Sabili** (edisi khusus), no 09, thn 2003, h. 140. Penjelasan tentang tahapan ini juga dijelaskan dalam buku Nani Machendrawati dan Agus Ahmad Syafei, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001) h. 31-34

sistem aqidah yang menjadikan keinginan subyektif menuju sistem aqidah ‘alamiah yang meng-Esakan Allah secara murni.

4. Tandzim (Pembinaan dan Penataan Kader)

Pada tahapan ini, internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk konstitusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas *sosial*. Dalam hal ini, PKS menata kader menjadi beberapa jenjang, diantaranya; Jenjang Pemula, Muda, Madya, Dewasa, Ahli, Purna dan Kehormatan. Tujuan dari pola atau tahap penataan dan pembentukan tersebut telah penulis jabarkan dalam bab sebelumnya yaitu bab III point sistem pembinaan.

5. Tanfidz (Pelaksanaan)

Tahap ini biasanya disebut dengan sikap aksi, karena tahap ini merupakan aplikasi atau pelaksanaan amal jama’i menuju produktifitas kerja dakwah yang optimal. Karena PKS merupakan partai politik peserta PEMILU, maka tanfidz menjadi satu hal yang mesti dilakukan dalam rangka menjadi “Pelayan Ummat”. Saat ini PKS tidak saja menjalankan aktifitas politiknya dalam segmen lembaga *legislatif* di parlemen saja, baik di tingkat pusat (DPR/MPR RI) maupun di daerah-daerah (DPRD I dan DPRD II), tetapi sudah ada yang beraktifitas dalam lembaga eksekutif di daerah-daerah seiring dengan digulirkannya sistem otonomi daerah yang berlanjut dengan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau yang lebih dikenal dengan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah).

Dari kelima tahapan dakwah tersebut, terlihat banyak kemiripannya dengan tahapan dakwah yang dimiliki oleh gerakan Ikhwanul Muslimin, bahkan dapat dikatakan bahwa tahapan dakwah PKS mengadopsi tahapan dakwah

Ikhwanul Muslimin. Berikut ini adalah konsep-konsep dakwah Ikhwanul Muslimin, diantaranya;

1. Ta'rif (Pengenalan)

Tahap ini adalah tahap penyampaian, pengenalan dan penyebaran fikroh sehingga bisa sampai kepada khalayak dari segala tingkatan *sosial*,¹³⁸ agar masyarakat mengenal dengan baik fikrah dan muatannya maka tindakan-tindakan yang dilakukan adalah;¹³⁹

- Menjelaskan pemikiran secara benar kepada orang
- Mengenalkan secara detail hakikat jamaah
- Revitalisasi peran ulama dalam politik
- Meletakkan politik sebagai pengendali aktifitas

Mengenai fase ta'rif ini, Imam Hasan al-Banna menuturkan semua orang ingin berperan dalam aktifitas dan ikut memelihara prinsip jama'ah, maka ia dapat berhubungan dengan jama'ah. Dalam fase atau tahapan ini, ketaatan tanpa reserve tidak dituntut dan tidak diharuskan. Cukuplah jika ia telah memberi penghormatan terhadap aturan-aturan dan prinsip-prinsip umum jama'ah.¹⁴⁰

2. Takwin (Pembentukan)

Dalam tahapan ini dakwah ditegakkan dengan melakukan seleksi terhadap anasir positif yang layak untuk memikul beban jihad dan untuk menghimpun

¹³⁸ Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, terj. (Solo; Era Intermedia, April 2001), h. 232

¹³⁹ Abdul Hamid al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam; Peta Pemikiran Hasan al-Banna*, h. 206

¹⁴⁰ Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, terj. (Solo; Era Intermedia, 2000) h. 81

berbagai bagian darinya. Sistem dakwah pada fase ini bersifat tasawuf murni dalam tataran ruhani dan militer murni dalam tataran operasional.¹⁴¹

Dalam buku lain, Imam Hasan al-Banna juga menerangkan bahwa pada fase ini dilakukan seleksi terhadap aktifitas yang sudah terekrut, mengkoordinasikan dan memobilisasikan untuk berinteraksi dengan objek dakwah.¹⁴²

Aksi-aksi yang dilakukan dalam tahap ini adalah;¹⁴³

- Membentuk panitia konstitusi
- Membentuk team perumus Undang-undang
- Mempersiapkan program perbaikan integral
- Menganalisis secara sistematis realitas yang ada

3. Tanfidz (Pelaksanaan)

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan amal jama'I menuju produktifitas kerja dakwah yang optimal atau tahap perjuangan dakwah dengan meletakkan program-program yang dapat diaplikasikan.¹⁴⁴ Beberapa aksi dalam tahap ini adalah;¹⁴⁵

- Berusaha untuk masuk dalam majlis parlemen
- Mobilisasi Massa
- Meningkatkan Tuntunan

¹⁴¹ Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, h. 182

¹⁴² Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, h. 232

¹⁴³ Abdul Hamid al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam; Peta Pemikiran Hasan al-Banna*, h. 207

¹⁴⁴ Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, h. 233

¹⁴⁵ Abdul Hamid al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam; Peta Pemikiran Hasan al-Banna*, h. 208

Dari uraian di atas mengenai tahapan dakwah yang dilakukan PKS maupun IM sangat mirip sekali, walaupun IM membagi tahapan dakwahnya menjadi tiga tahap, tetapi dari segi substansi tidak ada perbedaan. Jika PKS membagi tahapan dakwahnya menjadi lima tahapan, menurut analisa penulis itu merupakan penyempurnaan metode dakwah yang telah dikembangkan oleh Ikhwanul Muslimin sebelumnya. Adapun rincian dari kesamaan tahapan dakwah tersebut ialah;

- a. Jika Ikhwanul Muslimin tahap pertamanya menggunakan istilah *Ta'rif* (Pengenalan) untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat dengan program-program yang telah di jelaskan sebelumnya, maka PKS membagi tahapan ta'rif ini menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah *Tabligh*; penyampaian ajaran Islam kepada masyarakat secara massal dan terbuka. Lalu tahap kedua adalah pengenalan selanjutnya dilakukan secara khusus dalam tahapan ta'lim. Dalam tahap ta'lim ini, selain pesertanya adalah orang yang sangat tertarik sekali dengan ajaran Islam dan tentunya menjadi lebih sedikit dibandingkan ketika tahap tabligh sebelumnya, juga materi yang disampaikannya pun sudah lebih dalam dan mendetail.
- b. Kalau Ikhwanul Muslimin menempatkan *takwin* (Pembentukan) sebagai tahapan keduanya sebagai tindak lanjut dari pengenalan yang sudah dilakukan. Dalam tahapan takwin ini Ikhwanul Muslimin melakukan seleksi untuk menyaring orang-orang yang mau turut berjuang bersamanya. Maka PKS pun menggunakan istilah yang sama seperti yang ada pada Ikhwanul Muslimin dengan penerapan yang sama pula. Tetapi

bedanya PKS melanjutkan lagi pada tahapan ini dengan tahapan Tandzim (Penataan), dalam tahapan penataan ini PKS mengorganisir seluruh anggotanya dengan struktur dan jenjang yang teratur. Dalam tahapan ini sebenarnya antara PKS dan Ikhwanul Muslimin ada pada substansi yang sama, hanya PKS melakukan penyempurnaan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

- c. Dalam tahapan akhir dari metode dakwah yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dan PKS adalah sama, yaitu *Tanfidz* (Pelaksanaan). Ini adalah muara dari tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelumnya, hakikat tahapan dakwah yang hakiki sebenarnya ada pada tahapan ini, seperti apa yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Antara PKS dan Ikhwanul Muslimin tidak ada perbedaan baik dari segi istilah maupun dari segi aplikasinya.

Dari paparan dan deskripsi tentang berbagai kebijakan politik dan tahapan dakwah yang dimiliki oleh PKS, kita dapat melihat jelas bahwa secara tataran konseptual ada kesamaan dengan Ikhwanul Muslimin, akan tetapi dari segi pelaksanaan atau dari sudut aplikasi ataupun tehnik tentu ada perbedaan, semuanya tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada.

Walaupun banyak kemiripan baik dari segi konseptual maupun aplikasinya, tetapi salah seorang tokoh senior dan juga pendiri PK, mantan anggota DPR/MPR RI periode 1999-2004 dari Fraksi Reformasi (unsure Partai Keadilan), Bapak Ir. H. Untung Wahono, M.Si.¹⁴⁶ Ia menjelaskan; tidak menolak

¹⁴⁶ *Wawancara Pribadi* dengan Bapak Ir. H. Untung Wahono, M.Si

anggapan banyak orang, bahwa PKS merupakan kepanjangan tangan dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, bahkan salah seorang tokohnya (Ikhwanul Muslimin) saat ini yaitu Prof. DR. Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul “ Islam abad 21; Refleksi Abad 20 dan Agenda Masa Depan” juga mengakui hal tersebut. Tetapi Bapak Ir. H. Untung juga tidak berani mengakuinya secara langsung bahwa PKS merupakan sepenuhnya wujud dari gerakan Ikhwanul Muslimin, walaupun demikian Bapak Ir. H. Untung menjelaskan lagi bahwa PKS akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelaraskan diri agar tidak keluar dari prinsip-prinsip dakwah yang dijalankan oleh Ikhwanul Muslimin.

Sementara H. Sunmandjaya Rukmandis, seorang Deklarator PKS punya pendapat sendiri mengenai keterkaitan hubungan PKS dan Ikhwanul Muslimin. Ia secara tegas menyanggah hal tersebut dengan dalih bahwa setiap partai politik yang ada di Indonesia harus dijalankan dan dihidupkan oleh orang Indonesia sendiridan hal ini telah diatur dalam undang-undang partai politik. Tetapi walaupun demikian, ia juga mengakui bahwa inspirasi gerakan Partai Kedilan Sejahtera di dapatkan dari buku-buku yang ditulis oleh tokoh Ikhwanul Muslimin, dengan demikian secara konseptual dan semangat pergerakan ada keterkaitan yang cukup erat antara PKS dan Ikhwanul Muslimin.

Lain lagi apa yang dikatakan oleh Ust. Rahmat Abdulla (Alm) mantan ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP PKS 2000-2005), ia menjelaskan bahwa manhaj Ikhwanul Muslimin begitu tinggi standarnya baik dari segi keilmuan maupun dari segi ibadahnya. Oleh karena itu ia merasa malu jika ia secara pribadi maupun PKS sebagai institusi dianggap sebagai bagian dari jama'ah Ikhwanul

Muslimin, karena ia sendiri belum sanggup untuk melakukannya. Tetapi jika orang masih saja menganggap bahwa PKS merupakan bagian dari Ikhwanul Muslimin, ia hanya bisa menjawab alhamdulillah, walaupun pada kenyataannya itu adalah hanya anggapan orang saja.¹⁴⁷

C. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Konsep *Tarbiyah* (Pembinaan Kader)

Tarbiyah bukan segala-galanya, namun yang segala-galanya tak akan bisa diraih tanpa melalui *tarbiyah*. Ucapan Musthafa Mashur ini sangat terkenal di kalangan aktivis Partai Keadilan Sejahtera. Konsep *tarbiyah* dalam bentuk aplikatif adalah genuine dari pemikiran Hasan al-Banna yang diterapkan pada Jama'ah Ikhwanul Muslimin, konsep ini bersinggungan dengan para aktivis Partai Keadilan Sejahtera yang sebelumnya lebih dikenal dengan aktivis *tarbiyah*. Melalui proses *tarbiyah*, aktivis Partai Keadilan Sejahtera membina kadernya sehingga menjadi kader yang istiqamah.

Tarbiyah berarti pendidikan. *Tarbiyah*¹⁴⁸ yang dimaksudkan kalangan Ikhwanul Muslimin adalah pendidikan dalam artian yang formal maupun informal. *Tarbiyah* dalam artian pendidikan formal terbukti dengan mendirikan 2000 sekolah oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir. Sedangkan dalam konteks informal berarti pembinaan. *Tarbiyah* dalam makna pembinaan atau takwin (pembentukan), seperti apa yang dilakukan oleh Hasan al-Banna, ketika pertama-tama melakukan gerakan dakwah di Ismailiyah yaitu dengan melakukan pengajian-pengajian kecil (dihadiri 5-10 orang) di berbagai tempat.

¹⁴⁷ **Majalah Sabili**, Edisi No 03, Th IX 1 Agustus 2001/11 Jumadil Awwal, 1422. h. 78

¹⁴⁸ Hamid al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, hal 191

Ali Abdul Halim Mahmud dalam kitab *Wasailut Tarbiyah 'Inda Ikhwanil Muslimin*¹⁴⁹ (perangkat-perangkat *Tarbiyah* Ikhwanul Muslimin) mendefinisikan kegiatan *tarbiyah* sebagai cara ideal berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (berupa kata-kata) maupun secara tidak langsung (berupa keteladanan) dengan system dan perangkat yang khas, untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang “lebih baik”.

Dalam konsepsi Partai Keadilan Sejahtera, *tarbiyah* adalah core (inti) dari segala aktivitas atau semua kegiatan. Apapun yang dilakukan memiliki nilai pembinaan atau pendidikan atau untuk meningkatkan kualitas keislaman dan harakah (gerakan). Karena itu, Partai Keadilan Sejahtera memandang persoalan pembinaan atau *tarbiyah* ini menjadi sesuatu yang sifatnya inti, bahkan keterlibatan partai ini di parlemen atau yang di kabinet yang konsep dasarnya tidak bisa dilepaskan dari konsep pembinaan dalam artian yang luas (kualitas pembinaan seseorang). Maka nyaris mustahil Partai Keadilan Sejahtera meninggalkan aspek *tarbiyah* sebagai sesuatu yang harus ditekankan.¹⁵⁰

Pedoman di atas berangkat dari pengertian *tarbiyah* bahwa *tarbiyah* itu mempunyai proses penumbuhan pembinaan yang sifatnya menyeluruh, artinya seluruh sisi kemanusiaan itu sendiri, baik intelektualitas ataupun juga kemampuan skill juga kualitasnya. *Tarbiyah* sendiri mempunyai dua kategori, *pertama*, *tarbiyah bashariyah* yaitu proses pendidikan yang manusia terlibat langsung, ada tempat, alat, sarana, dalam arti yang formal.

¹⁴⁹ Irwan Prayitno, *al-Tarbiyah al-Islamiyah al-Harakiyah, Tarbiyatuna*, 2002, hal 2

¹⁵⁰ Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, (Solo;Era Intermedia, 1999, hal 21

Kedua, yang juga selalu ditekankan adalah *tarbiyah rabbaniyah*, yaitu perekayasanya Allah SWT, misalnya kita dalam melakukan aksi apapun, disitu bisa jadi banyak kita temukan yang sifatnya nilai-nilai *tarbiyah* yang sesungguhnya itu karunia dari Allah SWT. Dalam Partai Keadilan Sejahtera sangat dipentingkan tentang *tarbiyah Bashariyah*, karena akan dituntut untuk membuat kurikulum tentang pembinaan keislaman, kemampuan berdakwah dan sebagainya.¹⁵¹

Dalam pandangan Ihsan Tanjung, aktivis halaqah (kumpulan) di kampus Universitas Indonesia tahun 1980-an, bahwa inti kegiatan *tarbiyah* terletak pada cara ideal dalam berinteraksi, karena pihak pertama yang menentukan sukses atau gagalnya kegiatan *tarbiyah* adalah pengelola *tarbiyah*, atau sang murabbi (Pembina).¹⁵²

Seorang *Murabbi* (Pendidik) menyadari bahwa dalam men-*tarbiyah* para *mutarabbi* (anak didik) berurusan dengan fitrah manusia secara keseluruhan. Murabbi tidak hanya men-*tarbiyah* aspek intelektual, emosional, spiritual dan fisik, tapi aspek akhlak yang itu dalam pengajarannya harus dipraktekkan bukan diteorikan.¹⁵³ Karena itu sang murabbi perlu memiliki *quwwatu al-tatsir* (daya pengaruh yang membekas) sebab murabbi tidak saja dituntut mendidik melalui lisan, tapi juga keteladanan. Murabbi dituntut selalu sadar bahwa setiap gerak-gerik dan penampilan dirinya bernuansa pedagogis (*tarbawi*). Selain itu, agar

¹⁵¹ *Ibid*, hal 25

¹⁵² Ihsan Arlansyah Tanjung, “*Tarbiyah Perjalanan dan Harapan*” (Tarbiyatuna, 2002) hal.60

¹⁵³ *Ibid*, hal 61

perubahan mutarabbi ke arah yang lebih baik, dapat berlangsung; seorang murabbi dituntut menguasai *manhaj* dan *wasail* dalam proses *tarbiyah*.

Untuk mencapai *tarbiyah* yang maksimal, maka ada beberapa tujuan *tarbiyah* yang harus dicapai. *Pertama*, *tarbiyah* harus memberikan gambaran yang utuh tentang *Syumuliyatul Islam* (universalitas Islam). Bahwa Islam yang diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril adalah agama yang sempurna, didalamnya terdapat berbagai macam aturan hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, peradaban, dan undang-undang, ilmu dan peradilan materidan kekayaan alam, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana Islam adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar.¹⁵⁴

Tujuan *kedua*, adalah membentuk kepribadian Muslim yang mempunyai kekuatan jiwa yang besar yang tercermin dalam keteguhan akidahnya, keluhuran akhlaknya, kebersihan hatinya, kebaikan tingkah lakunya baik dalam ibadah, masyarakat maupun *tanzim* (struktur)¹⁵⁵. *Tarbiyah* juga mampu memotivasi seseorang untuk siap berkorban demi kepentingan Islam dan dapat membawa kepada kesadaran prinsip Islam, dan mengontrolnya dari berbagai kesalahan.¹⁵⁶

Tujuan *ketiga*, dari *tarbiyah* adalah mengantarkan masyarakat kepada penghambaan diri manusia kepada Allah saja, yang diaplikasikan dalam seluruh hidupnya. Penghambaan yang didasarkan pada kesaksian “*la ilaha illallah Muhammadur rasulullah*” (tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan

¹⁵⁴ Irwan Prayitno, *al-Tarbiyah al-Islamiah al-Harakiyah*, hal 4

¹⁵⁵ *Ibid*, hal 10

¹⁵⁶ *Ibid*, hal 29

Allah) penghambaan yang dicapai melalui *tarbiyah* ini terwujud dalam bentuk kepercayaan, peribadatan dan pelaksanaan syariat.¹⁵⁷

Dari tujuan-tujuan tersebut bisa disimpulkan bahwa *tarbiyah* merupakan proses pembelajaran baik formal maupun informal untuk melahirkan seorang yang responsif dan peduli atas situasi kondisi yang terjadi di lingkungannya, yakni seseorang tersebut melihat berbagai persoalan yang terjadi dengan perspektif yang Islami serta turut menyelesaikan persoalan kemasyarakatan tersebut secara akhlaqul karimah, elegan dan rasional.

Faktor kunci yang harus dipahami oleh para aktivis *tarbiyah* adalah bahwa *tarbiyah* merupakan proses panjang yang tak akan pernah henti. Karena itu, kontinuitas *tarbiyah* dan peningkatan kualitas kader dalam *tarbiyah* sangat dipentingkan. Hasan al-Banna mengatakan, jalan yang kita tempuh ini merupakan jalan yang panjang lagi banyak kesulitan, barangsiapa yang ingin memetik buahnya di masa panen hendaklah ia bersabar akan tetapi siapa yang memetikinya sebelum masanya akan merasakan hasil usahanya.¹⁵⁸

Untuk mencapai tujuan *tarbiyah*, maka diperlukan beberapa sarana yang dapat memfasilitasi sehingga terwujudnya tujuan *tarbiyah* secara maksimal dijelaskan sifatnya sangat fleksibel dan sangat beragam, tergantung keperluan dan keadaan peserta *tarbiyah*. Adapun sarana *tarbiyah* (wasail *tarbiyah*) adalah;

1. Halaqah

¹⁵⁷ *Ibid*, hal 31

¹⁵⁸ DH.al-Yusni, “*Dasar Kelanggengan Tarbiyah*” (Tarbiyatuna; 2002) hal 3

Halaqah adalah sarana utama *tarbiyah* imaniyah tsaqafiyah dalam dinamika kelompok dengan jumlah anggota maksimal 12 orang¹⁵⁹. Adapun fungsi dari halaqah sebagai sarana pembinaan dasar-dasar aqidah, akhlak, ibadah dan tsaqafah. Juga sebagai sarana pelatihan dan pembiasaan beramal jama'I dalam mengaktualisasikan diri dalam mewujudkan nilai-nilai keislaman.¹⁶⁰

Halaqah biasanya diadakan di rumah-rumah anggota halaqah, di masjid, mushalla, sekolah dan bisa juga di taman. Frekuensi halaqah biasanya sekali dalam sepekan dengan lama pertemuan 2 – 3 jam. Aktivitas halaqah biasanya diisi dengan membaca al-Qur'an atau hadis, membahas materi halaqah.

2. Taushiyah

Taushiyah adalah sarana latihan peserta untuk menyampaikan materi dan menumbuhkan kepekaan ruhiyah serta kedalaman fikriyah. Sasaran dari *tarbiyah* adalah untuk menanamkan nilai-nilai tarbawi dalam diri peserta serta membangkitkan kesadaran dan kerinduan peserta kepada ilmu pengetahuan. Dari taushiyah ini peserta diharapkan akan mampu menyampaikan materi halaqah, taushiyah biasanya dilakukan antara 10 – 20 menit.¹⁶¹

3. Daurah

Daurah adalah sarana intensif untuk membekali peserta dengan metode dan pengalaman penting untuk mengembangkan keahlian, menambah pengetahuan yang tidak mungkin dilaksanakan murabbi. Adapun sasaran daurah adalah untuk meningkatkan produktivitas peserta dalam aml dakwah dan *tarbiyah*,

¹⁵⁹ *Manajemen Tarbiyah Angkatan Pemula*, DPP Partai Keadilan Sejahtera Departemen Kaderisasi (Jakarta; 2003) hal 29

¹⁶⁰ *Ibid*, hal 30

¹⁶¹ *Ibid*, hal 32-33

juga untuk menambah efektivitas dan efisiensi pencapaian focus dan muwashafat peserta.¹⁶²

4. Rihlah

Rihlah adalah sarana *tarbiyah* yang dilaksanakn secara jama'I dan lebih terarah pada aspek fisik. Kedudukan rihlah di antara sarana *tarbiyah* yang lain sangatlah penting untuk menciptakan suasan ukhuwah islamiyah dan kedisiplinan secara fisik. Sasaran yang hendak dicapai dari rihlah agar peserta mempraktekkan nilai-nilai Islam, khususnya dalam mempererat ukhuwah dengan mengenali peserta rihlah lainnya secara mendalam. Dengan aktivitas fisik diharapkan peserta *tarbiyah* mempunyai fisik yang sehat, serta menghilangkan rasa jenuh dari rutinitas keseharian dan memperbaharui semangat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah menanamkan rasa kebersamaan dalam bekerja (*'amal jama'i*) dalam kepantiaan rihlah.

Rihlah biasanya diadakan di suatu tempat yang jauh dari kebisingan kota dan mempunyai jarak tempuh perjalanan yang jauh. Hal ini dimaksudkan untuk penerapan semua etika perjalanan dan penilaian terhadap kedisiplinan dari persiapan segala keperluan. Adapun cara rihlah biasanya mengadakan olahraga, senam, lari dan berbagai permainan, kemudian membahas tema tentang kedisiplinan, komitmen, ukhuwah, *tsiqah* atau mencari solusi dari persoalan dakwah yang ada.¹⁶³

5. Penugasan

¹⁶² **Ibid**, hal 33

¹⁶³ **Ibid**, hal 35-37

Penugasan adalah sarana pembelajaran dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta untuk melakukan aktivitas *tarbiyah*. Sasaran yang ingin dicapai adalah mengenali potensi diri dan kemampuan peserta, juga untuk meningkatkan kesungguhan peserta dalam melaksanakan tugas, serta peserta diharapkan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari tugas yang diberikan. Dalam penugasan ini biasanya murabbi memberikan tugas kepada mutarabbi.¹⁶⁴

6. Seminar

Seminar adalah sarana *tarbiyah* berupa pertemuan dengan lebih dari satu pembicara pakar untuk membahas permasalahan tertentu. Sasarannya adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan informasi actual dan objektif dan yang tak kalah pentingnya adalah meningkatkan kemampuan berfikir kritis, logis dan sistematis.¹⁶⁵

7. Mabit

Mabit adalah sarana *tarbiyah* ruhiyah dengan menginap bersama dan menghidupkan malam dengan beribadah. Sasarannya adalah untuk menguatkan hubungan dengan Allah dan kecintaan kepada Rasulullah, baik secara ruhi fikri maupun ‘amali, serta meneladani hidup Rasulullah dan salafus shalih dan mengeratkan ukhuwah dan nuansa Islami.

Pelaksanaan mabit biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dilakukan setelah jam 8 malam, acara dimulai dengan mendengarkan dan membaca al-Qur’an lalu menyampaikan nasihat (*taujih*), lalu tidur dan bangun tengah malam untuk tahajjud atau qiyamul lail, kemudian *muhasabah* (introspeksi diri)

¹⁶⁴ *Ibid*, hal 38-39

¹⁶⁵ *Ibid*, hal 39

disambung dengan sahur untuk puasa sunat, lalu shalat subuh kemudian berdzikir dengan membaca *ma'tsurat*.¹⁶⁶

8. Mukhayam

Mukhayam adalah sarana *tarbiyah* jasadiyah melalui latihan fisik dan simulasi ketaatan agar para peserta siap menjadi prajurit dakwah dan siap menerapkan nilai Islam di tengah masyarakat. Sasarannya adalah untuk membiasakan peserta hidup di alam terbuka dengan sarana dan prasarana yang sederhana, meningkatkan sikap indibath (disiplin) terhadap peraturan dan membiasakan peserta untuk memperhatikan *tarbiyah* jasadiyah, shihhiyah (kesehatan) dan bi'yah (menjaga dan melestarikan lingkungan).

Acara mukhayam biasanya diadakan 3 kali selama satu tahun. Adapun tempat mukhayam biasanya di bumi perkemahan atau tempat yang diizinkan untuk berkemah, memenuhi syarat untuk hiking dan camping, tidak jauh dari pemukiman penduduk dan jauh dari tempat berbahaya dan maksiat.¹⁶⁷

9. Taklim Rutin Partai

Taklim Rutin Partai adalah sarana *tarbiyah* untuk anggota pemula terdaftar dan sarana untuk silaturrahi bagi seluruh kader dan simpatisan dalam satu DPRa atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Kegiatan tersebut biasanya diadakan dalam majelis pekanan, tabligh akbar bulanan, yasinan malam jum'at atau dalam pengajian iqra. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kesenangan peserta untuk mengikuti pengajian, sehingga dapat ditingkatkan untuk mengikuti halaqah. Juga

¹⁶⁶ *Ibid*, hal 40-41, *Ma'tsurat* adalah kumpulan doa-doa shaheh yang dikumpulkan Hasan al-Banna dalam sebuah buku kecil, biasanya dibaca pagi dan sore

¹⁶⁷ *Ibid*, hal 42

agar tersampainya materi-materi umum tentang Islam dan meningkatkan interaksi dan silaturahmi antara peserta kader dan simpatisan.¹⁶⁸

10. Baca Buku

Baca buku adalah sarana *tarbiyah* untuk pendalaman pemahaman, penambahan wawasan dan peningkatan intelektualitas melalui media cetak yang berisi informasi. Buku yang perlu dibaca adalah buku-buku yang disesuaikan dengan bidang studi, buku laris yang berkaitan dengan dakwah dan *tarbiyah*. Biasanya peserta diminta untuk membuat resume buku yang dibaca dan sebulan sekali didiskusikan dengan murabbinya.

Sasarannya adalah untuk meningkatkan efektivitas *tarbiyah* dzatiah peserta, melatih peserta untuk mengkritisi pemikiran orang lain, meningkatkan minat baca di kalangan peserta untuk menuangkan ide-ide dan gagasan dalam bentuk lisan dan tulisan dan menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap topic yang sedang dibahas murabbi.¹⁶⁹

Menurut penulis, apa yang menjadi sarana *tarbiyah* dari PKS pada dasarnya sama dengan sarana *tarbiyah* yang digagas Hasan al-Banna, yang diaplikasikan dalam Ikhwanul Muslimin, yang terdiri dari *tarbiyah* (pembinaan) ruhiyah (spiritual), jasadiyah (fisik) dan akal. Ketiga unsure ini mendapatkan porsi yang seimbang dalam *tarbiyah* baik yang digagas Hasan al-Banna maupun yang diterapkan PKS.

Adapun yang membedakan antara *tarbiyah* yang digagas Hasan al-Banna dengan konsep *tarbiyah* PKS terletak pada sarana yang dipakai. Terlihat jelas,

¹⁶⁸ *Ibid*, hal 45

¹⁶⁹ *Ibid*, hal 49

hanya ada empat istilah yang sama dengan sarana *tarbiyah* Ikhwanul Muslimin yaitu rihlah, mukhayam, dauroh dan mabit, selebihnya adalah istilah-istilah yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dakwah di Indonesia. Hal ini terjadi karena menurut Sunmandjaya Rukmandis¹⁷⁰ pada awalnya semuanya mengaji. Istilah halaqah pun diambil dari tradisi ulama Indonesia. Pendapat Sunmandjaya Rukmandis sama dengan pemikiran Abu Ridho bahwa *tarbiyah* merupakan warisan khazanah Islam, di zaman Nabi pun halaqah-halaqah sudah ada.

Adapun sarana *tarbiyah* lainnya itu bukan cangkokan dari Ikhwanul Muslimin lalu diterapkan di Indonesia, namun hal itu terjadi seiring tuntutan kegiatan dengan banyaknya buku terjemahan dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa meskipun konsep *tarbiyah* adalah genuine dari konsep pemikiran Hasan al-Banna, pengaruhnya di Indonesia khususnya bagi aktivis Partai Keadilan Sejahtera hanya menjadi inspirator, di tingkat aplikasi terjadi modifikasi dan reformulasi yang cukup signifikan di Partai Keadilan Sejahtera.

D. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Konsep Negara Islam

Di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai yang lahir di masa reformasi. Partai Keadilan Sejahtera baik dalam visi, misi, manifesto maupun dalam tujuannya yang termaktub dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) nya tidak menyebutkan akan mendirikan negara Islam. Meski Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa antara Islam dan negara (politik) tak bisa dipisahkan, namun mendirikan negara Islam adalah persoalan

¹⁷⁰ Wawancara Pribadi, Tb. Sunmandjaya Rukmandis, Deklarator PKS, Jakarta 20 Mei 2008

lain. Demikian juga dengan penerapan syariat Islam bukan sesuatu yang harus menjad dagangan politik, tapi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan.

Munawir Syadzali dalam bukunya *Islam dan Tata Negara*¹⁷¹ memandang ada tiga konsepsi dalam memahami hubungan antara Islam dan negara. *Pertama*, Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah; Muhammad Rasyid Ridha, Hasan al-Banna, Abul ‘Ala al-Maududi, Sayyid Quthb dan lain-lain.

Kedua, Islam dalam pengertian Barat, yang tak memiliki hubungan apapun dengan urusan kenegaraan, dasarnya adalah bahwa Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Abd al-Raziq dan Thaha Husein. *Ketiga* adalah para pemikir yang menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, sehingga para pemikir tersebut menolak anggapan bahwa dalam Islam terdapat system ketatanegaraan.

Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Aliran ini mengatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat system ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Walaupun tidak mengakui adanya negara Islam, para pemikir mengharuskan adanya pengadopsian terhadap tata nilai etika Islam dalam pengelolaan negara dan dalam membangun akuntabilitas pemerintahan. Tokoh

¹⁷¹ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta;UIP 1993) hal 2

yang cukup menonjol dalam aliran ini adalah DR Muhammad Husein Haykal penulis buku *Hayatu Muhammad dan Fi Manzil al-Wahyi*.¹⁷²

Hasan al-Banna dalam mengungkapkan pikirannya tentang negara Islam menggunakan dua istilah; negara Islam (*daulah Islamiyah*) dan memperbaiki negara (*Islahud daulah*), kedua istilah ini digunakan secara *resiprokal*. Karena itu dalam memahami pemikiran Hasan al-Banna tentang negara Islam terjadi dwiinterpretasi. Mendirikan negara Islam, artinya mengganti pemerintahan yang ada dengan cara apapun dan mendeklarasikan sebagai negara Islam (seperti revolusi Iran). Kedua, karena negara ini milik umat Islam dan dikendalikan oleh orang-orang Islam yang *fasiq* (rusak), maka sudah sepatutnyalah negara ini diperbaiki dengan menerapkan nilai-nilai Islam.¹⁷³

Interpretasi kedua inilah yang dipahami Anis Matta, sebenarnya Hasan al-Banna tidak secara persis mengatakan mendirikan negara Islam (*daulah Islamiyah*), yang al-Banna katakana adalah memperbaiki negara (*Islahud Daulah*). Artinya memperbaiki negara yang sudah ada yang dihuni mayoritas Islam. Ketika Hasan al-Banna berbicara tentang negara Islam di sebuah negara yang dihuni mayoritas Muslim, karenanya dia tidak perlu mengatakan mendirikan negara Islam, tetapi perlu mengelola negara ini dengan cara Islam. *Islahud Daulah* ini bisa dilihat dari tahapan kerja Partai Keadilan Sejahtera adalah membangun pribadi Muslim, keluarga Muslim, masyarakat Muslim memperbaiki negara Muslim.¹⁷⁴

¹⁷² *Ibid*, hal 3-6

¹⁷³ Zainal Abidin Ahmad, (*Membangun Negara Islam*, (Yogyakarta;Pustaka Iqra 2001) hal 1-2

¹⁷⁴ *Ibid*, hal 6

Menurut Hasan al-Banna negara Islam adalah negara yang merdeka, yang tegak di atas syari'at Islam, bekerja dalam rangka menerapkan system sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsipnya yang lurus, dan menyampaikan dakwahnya yang bijak ke segenap umat manusia.¹⁷⁵ Negara Islam tidak akan pernah tegak kecuali di atas fondasi dakwah, karena negara Islam adalah negara yang mempunyai keinginan kuat untuk menegakkan misi, bukan sekedar bagan sturuktur, bukan pula pemerintahan yang matrealistis dan gersang tanpa ruh di dalamnya. Demikian juga dengan dakwah, tidak mungkin tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan yang menjaga, menyebarkan dan mengukuhkannya.¹⁷⁶

Dalam konteks ini, mengapa perlu negara Islam, karena salah satu tugas negara Islam adalah untuk menjaga keimanan. Sebab menyebarkan Islam dengan berkhotbah saja tidak cukup, tetapi mesti dibantu oleh kekuatan negara. Jika negara tidak menjaga Islam, maka dikhawatirkan kekuasaannya akan jatuh. Menurut Al-Banna selama negara Islam belum tegak, maka seluruh kaum muslimin berdosa, mereka bertanggungjawab di hadapan Allah, karena pengabaian mereka untuk menegakkannya dan keengganan mereka untuk mewujudkannya.¹⁷⁷

Menurut KH. Sofyan Tsauri (Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kabupaten Bogor), yang terpenting adalah bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu hadir dalam kaidah kehidupan dan kemudian publik mengarahkan potensinya untuk tidak melakukan kezaliman pada apapun dan siapapun dan tidak menghabiskan waktu dengan perdebatan yang tidak berujung pangkalnya.

¹⁷⁵ Hamid al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, hal 189

¹⁷⁶ *Ibid.*, hal 193

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal 105

Didirikannya Partai Keadilan Sejahtera adalah dengan tujuan yang sudah sangat jelas dalam rangka “mewujudkan bangsa dan negara yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Dengan kata lain, PKS ingin menciptakan negara berkeadilan dan berkesejahteraan.

KH. Sofyan Tsauri juga menjelaskan bahwa tidaklah penting menangkap wacana negara Islam atau bukan negara Islam, karena negara ini milik umat Islam. Sejak awal kita mengidentifikasi diri kalau kita bukan orang luar negeri ini, tapi sebagai bagian dari negeri ini. Dulu orang mengelola negara dengan cara secular, sekarang kita ingin mengelola negara ini dengan cara Islam, itu intinya.

Karena itu, Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah mengusung negara Islam ataupun syari'at Islam.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Wawancara Pribadi dengan KH. Sofyan Tsauri, Kantor DPD PKS Kab. Bogor, tanggal 25 Mei 2008

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara dengan beberapa pengurus DPP PKS dan dari data-data yang penulis dapatkan tentang Ikhwanul Muslimin dan Partai Keadilan Sejahtera dari buku-buku, artikel, data-data yang ada di internet, telah penulis jabarkan dalam skripsi ini dari bab I sampai IV, dan dalam bab terakhir ini penulis mencoba menyimpulkannya.

Adapun kesimpulan ini berpatokan dari identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah yang diantaranya;

1. Partai Keadilan Sejahtera secara konseptual dari segi pemikiran, ideologi, semangat dan cita-cita terpengaruh dan memiliki beberapa kesamaan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Tetapi secara organisasi maupun struktural, sejauh analisa penulis lakukan melalui hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa pengurus DPP PKS dan melalui data-data yang penulis dapatkan, maka dapat dikatakan bahwa PKS tidak mempunyai hubungan maupun keterikatan secara struktural dengan gerakan Ikhwanul Muslimin
2. Proses pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera terjadi melalui proses transfer pemikiran yang dibawa oleh para sarjana-sarjana dari Timur Tengah tahun 1980-an yang membentuk sebuah gerakan yang terkenal dengan istilah “*Tarbiyah*”. Proses transfer pemikiran juga melalui media buku-buku dan tulisan lepas lainnya. Hal ini

dapat dibuktikan dengan banyaknya buku-buku karya tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang kemudian diterjemahkan oleh orang-orang yang saat ini aktif di Partai Keadilan Sejahtera. Tidak hanya sebatas menerjemahkan dan menerbitkan, tetapi banyak tokoh PKS yang memberikan kata pengantar maupun menganalisisnya secara lebih mendalam yang dikenal dengan istilah “*Nazharat*”. Bukti lainnya adalah banyaknya kader PKS yang mengkaji buku-buku Ikhwanul Muslimin dalam forum-forum mereka.

3. Walaupun secara ideologi PKS terinspirasi dari ideologi Ikhwanul Muslimin, tetapi PKS dalam mengaplikasikan konsep tersebut tidak mempraktekkan secara kaku dan letterlux. Akan tetapi PKS menerapkannya secara selektif dan kondisional atau disesuaikan dengan kebutuhan dalam situasi dan kondisi yang ada. Dan kata-kata yang lebih tepat untuk semuanya ini adalah bahwa PKS mengadopsi secara selektif ideologi Ikhwanul Muslimin

B. Saran-saran

Pada kesempatan kali ini penulis menghadirkan beberapa saran yang menurut penulis cukup relevan untuk memberikan wawasan dan pengembangan selanjutnya, diantaranya;

1. Aktifitas yang dilakukan oleh DPP PKS melalui wadah partai politik harus dikembangkan lebih jauh lagi dari program-program dan aktifitas yang telah dilaksanakan. Sehingga kontribusinya benar-benar dapat dinikmati tidak hanya sebagai partisipas ummat

dalam bidang politik, tetapi juga bisa menjadi Problem Solving terhadap persoalan atau problematika yang dihadapi umat seperti pembelaan terhadap kaum dhu'afa, menentang bahkan menghapuskan kebijaksanaan yang bisa mendeskredikan umat serta mengupayakan kemudahan-kemudahan birokrasi serta segala hal yang akan membawa kepada kemaslahatan umat.

2. Mengembangkan budaya politik “Adi Luhung”; yaitu politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan *Fatsoen* politiknya, kesantunan dalam berpolitik dan menghindari konflik-konflik yang bisa menimbulkan perpecahan dan pengkotak-kotakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan yang utama adalah PKS harus tetap menjaga konsistensinya dan eksistensinya sehingga layak untuk dijadikan “*Uswah Hasanah*” bagi partai politik lain.

Akhirnya semua kembali kepada apa yang telah diusahakan demi tegaknya nilai-nilai Islam tanpa mengurangi esensi yang terkandung dalam ajaran Islam, sehingga nilai-nilai Islam menjadi ajaran yang selalu dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Banna, Hasan, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, terj, Solo; Era Intermedia 2001.
-, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin II*, terj, Solo; Era Intermedia 2002.
-, *Memoar Hasan Al Banna; Untuk Dakwah Para Da'iyah*, terj, Solo; Era Intermedia 2000
- Al Ghazali, Abdul Hamid, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam; Peta Pemikiran Hasan Al Banna*, terj, Solo; Era Intermedia 2001
- Al Khatib, M. Abdullah dan Hamid, M. Abdul Halim, *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan; Kajian Analitik terhadap Risalah Ta'alim*, terj, Bandung; Asy Syamil, 2001
- Al Qardhawi, Yusuf, *70 Tahun al-Ikhwan al Muslimun; Kilas Balik Dakwah Tarbiyah dan Jihad*, terj, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999
- Al Wa'iy, Taufiq Yusuf, *Pemikiran Politik Kontemporer al Ikhwan al Muslimun; Studi Analitis, Observatif dan Dokumentatif*, terj, Solo; Era Intermedia 2003
- Aziz, Abdul, Tolhah Imam dan Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1996
- Aziz, Jum'ah Amin Abdul, *Tsawabit dalam Manhaj Gerakan Ikhwan; Analisis terhadap Prinsip-prinsip yang Baku dan Dinamis dalam Manhaj Gerakan Ikhwanul Muslimin*, terj, Bandung, Asy Syamil, 2002
- Burhanuddin, Nandang, *Penegakan Syari'at Islam menurut Partai Keadilan*, Jakarta; Al Jannah, 2004
- Chirzin, Muhammad, *Jihad menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Zhilal*, terj, Solo; Era Intermedia 2001

Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta, Teraju, 2002

DPP PK, *Tarbiyah Menjawab Tantangan; Refleksi 20 Tahun Pembaharuan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta, Robbani Press, 2002

....., *Jati Diri PK*, Pustaka Tarbiyatuna, 2002

....., *Jati Diri PK*, PT Bina Fannytama, tanpa tahun

....., *Sekilas Partai Keadilan*, Jakarta 1998

DPP PK Sejahtera, *Menyelamatkan Bangsa; Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, Jakarta, Al I'tishom, 2004

....., *Visi dan Misi PK Sejahtera*, Jakarta, 2004

Fatah, Eef Saefullah, *Catatan Atas Gagalnya Orde Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998

Fatah, Shalah Abdul, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Sayyid Quthb*, terj, Solo; Era Intermedia 2001

Fathiyakan, *Revolusi Hasan Al Banna; Gerakan Ikhwanul Muslimin Dari Sayyid Quthb Sampai Rasyid al Ganusyri*, terj, Jakarta, Harakah, 2002

Hamid, Abdul Halim, *Di Medan Dakwah Bersama Dua Imam; Ibnu Taimiyah dan Hasan Al Banna*, terj, Solo; Era Intermedia 2001

Hawa, Sa'id, *Membina Angkatan Mujahid*, terj, Jakarta, Ishlah Press, 1995

Jackson, Karl. D, *Kewibawaan Tradisional , Islam dan Pemberontakan; Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta; Pustaka Utama Grafity, 1990

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, Bandung, Mizan, 1997

Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran; Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj, Jakarta; Al I'tishom 2003

Mahendrawati, Nani dan Agus Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung; Remaja Rosda Karya, 2001

Mahmud, Ali Abdul Halim, *Ikhwanul Muslimin Konsep Gerakan Terpadu, Jilid I*, terj, Jakarta; Gema Insani Press, 1997

Shah, M. Aunul Abied, *Islam Garda Depan ; Mosaik Pemikiran Timur Tengah*, terj, Bandung; Mizan, 2001

Siddiq, Mahfudz, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi*, Solo; Era Intermedia, Oktober 2000

Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta; UI Press, 1990

Syukur, Abdul *Gerakan Ushrah di Indonesia; Peristiwa Lampung 1989*, Jogjakarta; Penerbit Ombak, 2003

Tim Departemen Kaderisasi DPP PKS, *Profil Kader PKS*, Bandung; PT Syamil Cipta Media, Agustus 2004

....., *Seri Manhaj Tarbiyah; Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*, Jakarta; DPP PKS, 2003

Usman, Fathi, Dr., *Ikhwanul Muslimin Membedah Demokrasi*, terj, Jakarta; Media Da'wah, cet, ke II, 1994

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Khoirunnisa, Ema, Skripsi; *Peran Media Sabili dalam Penyiaran Dakwah Islam*, UIN, Fak. Dakwah, Jurusan KPI, 2003

Hatta, Muhammad, Disertasi; *Ikhwanul Muslimin (Kajian dari Konsep dan Strategi Dakwah)*, Jakarta; Pasca Sarjana UIN, 2001

